



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

**PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA
DI KAWASAN REGIONAL**

Disusun Oleh:

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Instansi : Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT III ANGKATAN XII
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI**

2019



LEMBAR PENGESAHAN PROYEK PERUBAHAN

PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL

Disusun Oleh:

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS

NIP : 197002191998032002

Instansi : Sekretariat Jenderal Dan Badan Kehormatan

Peserta Diklat,

Warsiti Alfiah, SIP, DESS

**Menyetujui
Mentor,**

(Endah TD Retnoastuti, SS, M.Phil)

**Menyetujui
Coach,**

(Dr Ahmad Taufik, S.Sos, M.Si)



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja/Instansi : Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

adalah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, dengan judul Proyek Perubahan:

"PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL"

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Proyek Perubahan yang merupakan *output* dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, saya menyatakan bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka panjang Proyek Perubahan tersebut di atas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai.

Mengetahui
Mentor/Atasan Langsung,

Endah TD Retroastuti, SS, M.Phil
NIP.1968020419922001

Jakarta, Mei 2019
Yang menyatakan,

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP.197002191998032002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta diklat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI
Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019

2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB)

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir.Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

3. Proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil diklat. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020 dan jangka panjang pada Juni 2020 hingga 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Mengetahui

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 196611141997031001

Jakarta, Mei 2019

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN PROYEK PERUBAHAN (LPP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI
Program : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019
Judul LPP : PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA
DI KAWASAN REGIONAL

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

- memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh/sebagian Laporan Proyek Perubahan (LPP) saya tersebut di atas kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara;
- memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* untuk kepentingan akademik kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penyusun/pencipta; dan
- bersedia dan bertanggung jawab sepenuhnya jika di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta, tanpa melibatkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam Laporan Proyek Perubahan (LPP) ini.

Jakarta, Mei 2019

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP.197002191998032002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi *Allah Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat-NYA sehingga Laporan Proyek Perubahan ini yang berjudul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" dapat diselesaikan tepat waktu dengan lancar. Laporan Proyek Perubahan ini merupakan dokumen wajib bagi persyaratan kelulusan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 di Jakarta.

Ucapan terima kasih tidak terhingga disampaikan kepada para pihak yang telah mendukung dengan tulus ikhlas terselesaiannya Laporan Proyek Perubahan ini, antara lain :

1. Yth Bapak Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Si, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Periode 2014 - 2019, atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
2. Yth Ibu Amelia Anggraini, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Periode DPR RI 2014 – 2019 dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (A-17), atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
3. Yth Bapak Ir. Indra Iskandar, M.Si, Sekretaris Jenderal DPR RI sejak 2018, atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
4. Yth Ibu Dra. Damayanti, M.Si, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2015, atas kesediaannya sebagai Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan/arahan/masukan, dukungan penuh, dan testimoni sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat selesai dengan lancar
5. Yth Bapak Yohannes O.I Tahapari, SH, M.Si., Kepala Biro Pemberitaan Parlemen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan Yth Bapak Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H., Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), atas kesediaannya memberikan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan ini.

6. Yth Ibu Endah Tjahjani Dwirastuti, SS, M.Phil, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2016, atas kesediaannya sebagai Mentor dan telah tulus ikhlas memberikan bimbingan/arahan/masukan, dukungan penuh, dan testimoni sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat selesai dengan lancar
7. Yth Bapak Dr. Ahmad Taufik, Widya Iswara Kementerian Sekretariat Negara RI, atas kesediaannya sebagai *Coach* yang telah tulus ikhlas dan rajin memberikan bimbingan/arahan/masukan, dukungan penuh, dan telah memperjuangkan Proyek Perubahan ini sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat selesai dengan lancar
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia beserta jajaran, khususnya Yth Bapak Novi Muryanto, atas pelayanan yang prima sehingga pelatihan berjalan lancar dan sukses.
9. Yth Bapak Sartomo, SS, M.Si, Kepala Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota selaku Ketua Pelaksana PPID Unit Kerja di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Yth Bapak Chairi Patria, SIP, M.SI, Kepala Bagian Sekretariat Organisasi Kerja Sama Internasional, serta Yth Ibu Suprihartini, Kepala Bagian Sekretariat Komisi I, atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
10. Yth Bapak Mario Pandu Dewono selaku Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* sejak 2017 atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
11. Yth Saudara Adhi Dwinanda Oktavian selaku *Field Producer* CNN Indonesia atas kesediaannya memberikan dukungan penuh dan testimoni terhadap Proyek Perubahan ini.
12. Teman-teman Tim Efektif yang berada di Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional dan di Bagian Data dan Teknologi Informasi serta Tenaga Ahli BKSAP yang telah mendukung penuh dan memperjuangkan sekuat tenaga Proyek Perubahan ini sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat selesai tepat waktu dengan lancar
13. Teman-teman ANGDUBEL yang telah memberikan kenangan indah, nuansa *supportif* dan *relaxe* selama masa pendidikan dan pelatihan berlangsung

14. Orang tua penulis, Bapak Kamijo dan Ibu Sumiyatun, dan keluarga (adik-adik, keponakan-keponakan) yang tiada putus-putusnya selalu mendo'akan yang terbaik, memberikan dukungan materiil moril spirituil sehingga Laporan Proyek Perubahan ini dapat selesai tepat waktu dengan lancar
15. Berbagai pihak yang tidak mencukupi tempatnya jika disebutkan satu persatu namun akan selalu diingat di hati atas dukungannya sehingga Laporan ini dapat selesai tepat waktu dengan lancar.

Semoga Laporan Proyek Perubahan ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi inspirasi untuk inovasi yang lebih maju, modern dan kekinian.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
I. Latar Belakang	1
1. Pendahuluan	1
2. Permasalahan	24
II. Tujuan dan Manfaat	32
1. Tujuan	32
2. Manfaat	32
III. Deskripsi Proyek dan Ruang Lingkup	34
1. Deskripsi Proyek	34
2. Ruang Lingkup	38
IV. Identifikasi Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>), Tim Efektif dan Tatakelola Proyek Perubahan	39
1. Identifikasi Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	39
2. Tim Efektif	45
3. Tatakelola Proyek Perubahan	47
V. Rencana Tahapan dan Capaian (<i>Milestones</i>)	51
VI. Faktor Keberhasilan	57
VII. Hasil Pelaksanaan	58
1. Pembangunan Website http://diparlin.dpr.go.id	58
2. Telaah Hasil Sidang/konferensi Regional	63
3. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Strategi Mengatasinya/Kendala/Masalah	68
VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi	70
1. Kesimpulan	70
2. Rekomendasi	71
IX. Lampiran <i>Evidence</i>	72
X. Penutup	75

I. LATAR BELAKANG

1. Pendahuluan

Peran diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Tata Tertib DPR tersebut berdasarkan atas Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mandat fungsi diplomasi DPR RI ini tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

a. Landasan Hukum Diplomasi Parlemen Indonesia

“Ketentuan perundang-undangan” atau “ketentuan peraturan perundang-undangan” diatas dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang menjadi landasan hukum pelaksanaan diplomasi DPR RI, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Bab III Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 20A menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri lebih jauh mengatur kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 6). Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan (Pasal 4).

Pasal 71 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur wewenang DPR RI untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.

Pasal 201 *juncto* Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib juga menugaskan DPR untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara sahabat dan calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.

“Ketentuan perundang-undangan” atau “ketentuan peraturan perundang-undangan” tersebut diatas memberikan mandat kepada DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk turut berperan serta mendukung diplomasi Pemerintah dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia.

b. Pelaksana Diplomasi Parlemen Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap (Pasal 83 dan Pasal 113) dan mempunyai tugas antara lain “membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral, maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota parlemen

negara lain” (Pasal 116). Definisi tugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini sesuai dengan tugas DPR, sebagaimana diatur pada Pasal 72, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah; dan menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 70 menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Sedangkan Pasal 69 menegaskan bahwa fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah.

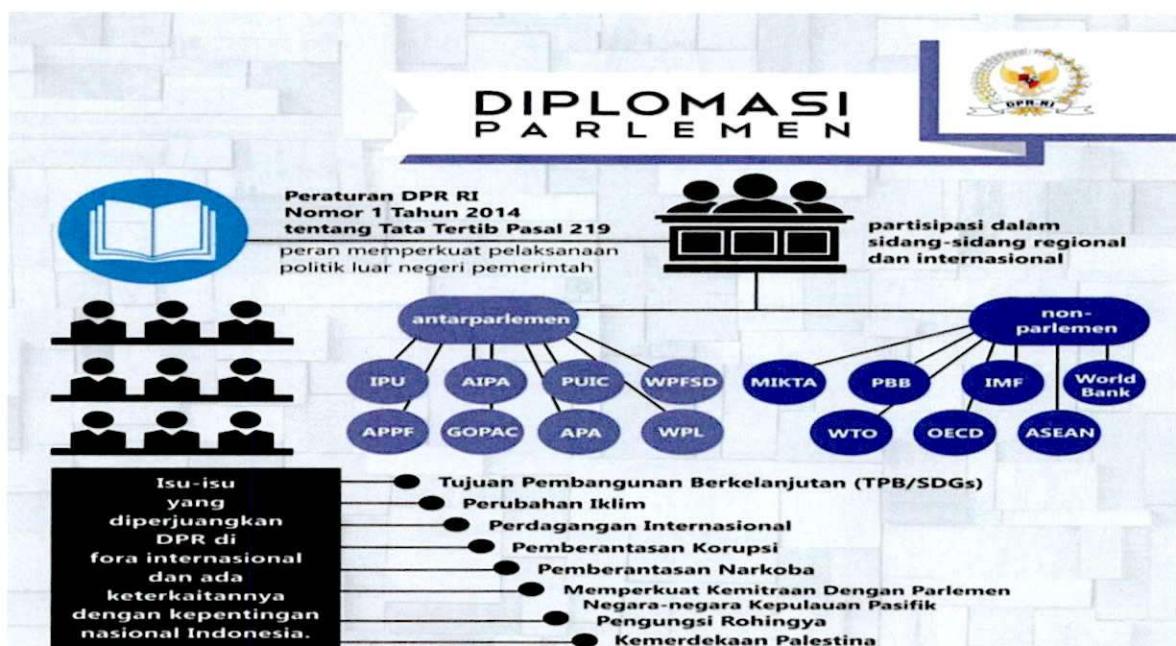
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Badan Kerja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap (Pasal 219) dan bertugas antara lain “mengembangkan, membina dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain” (Pasal 75 *juncto* Pasal 77).

Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang lebih dikenal dengan sebutan BKSAP, pada awalnya terbentuk saat dilangsungkannya Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Juni 1974. Ketika itu, Sidang memutuskan untuk membubarkan lembaga *Indonesian Inter-Parliamentary Organization (I IPO)* dan sekaligus mengesahkan berdirinya Panitia Kerja Sama Antar Parlemen (PKSAP) sesuai keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 27/PIMP/IV/73 tanggal 7 Juni 1974.

Dengan meningkatnya keterlibatan DPR RI di forum internasional dan meluasnya masalah-masalah yang ditangani, status kepanitiaan PKSAP tersebut ditingkatkan wewenangnya, yaitu melalui pembentukan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang kedudukan, susunan dan tugasnya dicantumkan dalam

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/DPR RI/IV/78-79 tanggal 28 Juni 1979 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Pada perkembangannya hingga dewasa ini, kedudukan BKSAP diperkuat melalui “Ketentuan perundang-undangan” atau “ketentuan peraturan perundang-undangan” yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKSAP melaksanakan diplomasi parlemen melalui kerangka kerja multilateral di tingkat internasional dan regional, kerangka kerja bilateral dan diplomasi individu sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

BKSAP DPR RI periode 2014-2019 kemudian membagi anggotanya yang berjumlah 50 orang Anggota kedalam 4 (tiga) *Desk* yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Ketua BKSAP. *Desk* adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam Rapat Pleno BKSAP untuk memudahkan koordinasi. Adapun 4 (empat) *Desk* dalam organisasi BKSAP itu, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2, adalah :

- **Desk Kerja Sama Internasional** bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerja sama internasional yang meliputi IPU, PUIC, GOPAC, IPAIT, PGA, OECD, serta badan-badan dibawah PBB dan organisasi internasional lainnya.
- **Desk Kerja Sama Regional** bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama regional yang meliputi AIPA, APA, APPF, ASEPA, MSEAP, dan organisasi regional lainnya termasuk badan-badan ASEAN, APEC, ASEM.
- **Desk Kerja Sama Bilateral** bertugas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerja sama bilateral yang meliputi kegiatan teknis BKSAP dengan negara sahabat, kegiatan GKS, kunjungan delegasi Parlemen Negara sahabat, pengiriman Delegasi Muhibah DPR RI dan delegasi Alat Kelengkapan Dewan lain ke luar negeri.
- **Desk Kunjungan Individu Anggota** bertugas untuk menangani kegiatan masing-masing Anggota DPR yang akan melakukan acara meningkatkan kerja sama terkait isu tertentu melalui pendekatan personal.

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

c. Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional

Sesuai pembagian *Desk* yang telah disepakati pada awal periode jabatan DPR RI 2014 - 2019, Desk Kerja Sama Regional BKSAP melaksanakan diplomasi parlemen melalui kerangka kerja multilateral di tingkat regional dengan keanggotaan DPR RI pada organisasi atau forum parlemen regional yang memiliki pengaruh kuat di kawasan. Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan lingkup geografis kawasan dimana Indonesia termasuk di dalamnya, yang dewasa ini meliputi 5 (lima) cakupan lingkup kawasan, yaitu kawasan Asia, kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia – Afrika, kawasan Asia – Eropa, dan kawasan Asia – Pasifik. Organisasi pemerintah, misalnya ASEAN melalui pertemuan *ASEAN – AIPA Interface Meeting*, juga bekerja sama dengan mengundang para Anggota Parlemen untuk turut berperan serta menyampaikan pandangan pada pembahasan berbagai isu yang saat itu menjadi kepentingan bersama negara-negara kawasan.

Sejak pembentukannya pada tahun 1974, BKSAP menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi atau forum parlemen regional di kawasan, antara lain :

Kawasan Asia Tenggara



Association of South East Asian Nations Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) — www.aipasecretariat.org

AIPA beranggotakan 10 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.

AIPA merupakan transformasi dari *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) dan ditetapkan pada Sidang Umum ke-27 AIPO Tahun 2005 di Cebu - Filipina. AIPO merupakan inisiatif Indonesia atas kemajuan ASEAN dan dibentuk pada tanggal 2 September 1977 melalui penandatanganan *Statutes of AIPO* dan beranggotakan

parlemen-parlemen negara-negara ASEAN dalam rangka menumbuhkan kesepahaman bersama untuk mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan menjembatani pemecahan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama negara-negara ASEAN. Sidang Umum AIPO merupakan forum tertinggi sebagai pembuat keputusan AIPO (*policy making body*) dalam bentuk resolusi, *joint communique*, dll. Setelah Sidang Umum ke-1 AIPO pada tanggal 26 – 28 September 1978 di Singapura, Sidang Umum AIPO diselenggarakan rutin sekali setahun di negara-negara Anggota AIPO secara bergiliran sesuai urutan alfabetis negara-negara Anggota AIPO. Pada Sidang Umum ke-27 AIPO tahun 2006 di Cebu City, Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA atas kesepakatan negara-negara anggota untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama *AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)* sebagaimana tercantum dalam *Preamble* dan Pasal I Statuta AIPA.

Di dalam AIPA terdapat forum-forum untuk pembahasan isu khusus, misalnya *AIPA Caucus* untuk membahas tindak lanjut keputusan AIPA, *AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)* untuk membahas isu narkoba, dan *AIPA Women Meeting* untuk membahas isu perempuan dan anak.



SEAPAC beranggotakan 12 (dua belas) negara yaitu Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam.

Dibentuk pada tanggal 31 Maret 2005 di Manila, Philippines, SEAPAC merupakan perwakilan dari *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* di kawasan Asia Tenggara. GOPAC adalah satu-satunya organisasi

parlemen berjaringan internasional dengan tujuan tunggal memberantas korupsi diseluruh dunia melalui pencapaian kepemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh parlemen. GOPAC memiliki perwakilan-perwakilan regional di seluruh dunia dan *National Chapter*/ Gugus Tugas Nasional di beberapa negara (semacam Kelompok anggota Parlemen yang perduli pada gerakan anti korupsi di level nasional). Forum tertinggi SEAPAC adalah *General Meeting* dimana keputusan dalam bentuk Deklarasi diadopsi. DPR RI memegang jabatan sebagai Chair GOPAC selama periode 2015-2017 dan periode 2017-2019.

Kawasan Asia Pasifik



Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)

APPF beranggotakan 27 negara yaitu : Australia, Kamboja, Kanada, Kosta Rika, Ekuador, Chile, China, Kolombia, Fiji, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Mongolia, New Zealand, Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, AS, Vietnam dan Observer (Brunei Darussalam).

APPF dibentuk berdasarkan *Tokyo Declaration* pada Januari 1993 di Tokyo-Jepang. Pada awalnya, APPF adalah *Asian-Pacific Parliamentarians Forum* yang merupakan gagasan Yasuhiro Nakasone (Mantan Perdana Menteri Jepang dan Anggota Parlemen Jepang) agar para anggota parlemen seluruh Asia-Pasifik, khususnya negara-negara yang tergabung dalam *Asia-Pacific Economic Forum (APEC)*, berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah bersama di kawasan Asia Pasifik. APPF awal beranggotakan 9 negara (Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, New Zealand, Filipina, Korea Selatan, Singapura dan Amerika Serikat) yang mengadakan *Preparatory Meeting* pada bulan Agustus 1991 di Singapura dan menghasilkan keputusan antara lain :

- a. APPF bertujuan menggalang kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan ekonomi.
- b. APPF bersifat terbuka dan tidak eksklusif serta tidak menjurus kepada terbentuknya blok.
- c. APPF bukan kerjasama militer, tetapi menaruh perhatian khusus terhadap masalah-masalah perdamaian dan keamanan di wilayahnya.
- d. Cara mengambil keputusan adalah secara konsensus sebagai hasil dari bertukar-pendapat dan bertukar pengalaman.
- e. Kerjasama ini walaupun bersifat legislatif, namun bukan merupakan tandingan dari organisasi internasional yang sudah ada (yang bersifat eksekutif) tetapi justru merupakan komplementari dari *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Pacific Economic Cooperation Conference (PECC)* dan *Pacific Basin Economic Council (PBEC)*.

Sidang Pleno APPF merupakan forum tertinggi dimana keputusan-keputusan APPF dalam bentuk resolusi atau deklarasi diputuskan.



***Asia Pacific Parliamentarians' Conference on
Environment and Development (APPCED)***

APPCED beranggotakan 46 negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu : Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Canada, Chile, People's Republic of China, Cook Islands, Fiji, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Republic of Kazakhstan, Republic of Kiribati, Republic of Korea, Republic of Kyrgyzstan, Democratic Republic of Mexico, Malaysia, Republic of Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Laos People's Democratic Republic, Mongolia, Nepal, New Zealand, Republic of Nauru, Republic of Palau, Norfolk Island, Pakistan, Northern Marianas, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russian Federation, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Syria, Thailand, Kingdom of Tonga, Tuvalu, Republic of Vanuatu, United States of America and Vietnam.

Dibentuk pada Juni 1993 di Seoul – Korea Selatan, APPCED merupakan satunya wadah konferensi para anggota parlemen yang perhatian (*concern*) dan secara konsisten membahas masalah pembangunan dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik. Sidang Umum APPCED merupakan forum tertinggi dimana keputusan-keputusan APPCED dalam bentuk resolusi atau deklarasi diputuskan.



Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)

<http://ksap.dpr.go.id/ipp>

Selain bergabung dengan organisasi regional yang telah ada, DPR RI juga melakukan inisiatif untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan Asia – Pasifik dengan menyelenggarakan konferensi pertama *Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* pada tahun 2018 yang menghasilkan *Chair's Summary* dan DPR RI berperan sebagai *leading role* pada pertemuan tersebut. Tujuan utama pembentukan IPPP adalah untuk menghadapi ancaman gerakan Organisasi Papua Merdeka dengan cara merangkul negara-negara Pasifik di bidang kerjasama ekonomi dan lingkungan hidup.

IPPP dipersiapkan untuk menjadi pertemuan tahunan dan menghasilkan keputusan untuk kepentingan bersama Indonesia dan Pasifik. Anggota IPPP adalah 14 parlemen dari negara-negara Pasifik yang tergabung dalam *Pacific Islands Forum (PIF)* yakni Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Australia dan Selandia Baru dikecualikan karena merupakan negara maju.

Kawasan Asia Eropa



Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP)

Secara prinsip, keanggotaan ASEP adalah parlemen nasional dari negara anggota ASEM dan Parlemen Eropa.

ASEP Meeting merupakan forum pertemuan anggota parlemen dari Negara anggota *Asia-Europe Meeting (ASEM)* untuk membahas isu-isu seputar tiga pilar ASEM (*the political pillar, the economic and financial pillar, and the cultural and intellectual pillar*) dan hasil pertemuan berupa deklarasi ditujukan untuk memberikan masukan kepada ASEM khususnya pada pertemuan Tingkat Tinggi.



Meeting of the Speakers of Eurasian Countries' Parliaments (MSEAP)

www.mseap.org

Anggota MSEAP adalah parlemen dari negara-negara yang membentang antara Eropa, Asia dan Timur Tengah.

Pertemuan ini merupakan inisiatif bersama antara Parlemen Rusia dan Parlemen Korea Selatan guna membahas keragaman politik, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Eurasia agar menjadi kekuatan pendorong untuk memperoleh kemakmuran bersama.

Indonesia telah aktif di MSEAP sejak pertemuan pertama MSEAP pada tanggal 19-20 April 2016 di Moscow, Russia. Kehadiran Indonesia dalam pertemuan MSEAP memiliki nilai strategis baik dalam penguatan hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eurasia maupun dalam kerangka kerja sama antar parlemen

regional AIPA dengan mitra-mitra dialog AIPA. Peran serta DPR RI diharapkan dapat mendorong kebijakan nasional Indonesia terkait kerjasama perdagangan internasional, anti terorisme, dialog antar agama dan kejahatan transnasional serta isu krusial lainnya.

Pada penutupan pertemuan MSEAP akan dibuat *final statement* yang memuat kebulatan tekad untuk meningkatkan kerjasama antar-parlemen negara-negara di Eropa dan Asia. Statement yang antara lain menekankan dukungan legislatif bagi pengembangan dialog antar-parlemen dan peningkatan kerja sama multilateral di bidang politik, ekonomi, hukum dan kemanusiaan, anti terorisme, energi dan perlindungan lingkungan hidup.

Kawasan Asia – Afrika



ASIAN AFRICAN PARLIAMENTARY CONFERENCE (AAPC)

DPR RI belum bergabung dengan organisasi yang membidangi kerja sama Asia – Afrika. Untuk itu, DPR RI menginisiasi pertemuan pertama parlemen Asia Afrika yang diharapkan dapat mempererat kerjasama Asia-Afrika dengan semangat Konferensi Asia - Afrika 1955. *First Asian – African Parliamentary Conference (AAPC)* diselenggarakan pada bulan April 2015 di Jakarta dan dihadiri oleh 39 negara dari 54 negara Asia – Afrika. AAPC menghasilkan kesepakatan Deklarasi berjudul “Menuju Kemitraan yang lebih kuat untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia” yang memuat komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan kedaulatan wilayahnya sesuai tahun 1967; komitmen untuk terlibat sedini mungkin dalam agenda pembangunan global SDGs; dan ide pembentukan *Asia Africa Parliamentary Group*.

Kawasan Asia



Asian Parliamentary Assembly (APA)

— <http://www.asianparliament.org/>

APA beranggotakan 42 parlemen dan 16 parlemen observer dan organisasi parlemen regional, yaitu : Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan Republic, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palau, Palestine, Philippines, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Thailand, Tonga, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.

APA merupakan organisasi parlemen di Asia yang dibentuk pada Sidang Umum ke-7 AAPP (*Association of Asian Parliamentarian for Peace*) tahun 2006 di Teheran, Iran. AAPP menekankan pada masalah perdamaian di kawasan Asia, kemudian ditransformasikan APA guna membahas perkembangan ekonomi, sosial dan nilai-nilai budaya di Asia dan merespon tantangan-tantangan baru yang akan membawa negara-negara Asia kepada kerjasama yang lebih erat. APA diyakini dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan di kawasan Asia, antara lain: meningkatkan kebebasan dan keadilan sosial; Perluasan bidang kerjasama dan perluasan pengetahuan guna meningkatkan kemajuan dan kesamaan di antara anggotanya; memanfaatkan sumber daya manusia dan alam sesuai kepentingan negara anggota melalui kerjasama.

d. Tahapan Pelaksanaan Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional

Untuk melaksanakan diplomasi parlemen di kawasan regional tersebut, Desk Kerja Sama Regional BKSAP melakukan proses penyiapan bahan/materi rapat dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: tahapan sebelum Sidang/Konferensi; tahapan pada

saat Sidang/Konferensi, dan tahapan setelah Sidang/Konferensi. Proses penyiapan bahan/ materi rapat *desk* kerja sama regional BKSAP dijelaskan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI*

Tahapan sebelum Sidang/Konferensi Regional

Sebelum menghadiri Sidang/Konferensi Regional, Bagian Set. KSR mendukung Deks Kerja Sama Regional BKSAP dengan penyiapan rapat-rapat dan bahan/materi rapat dalam bentuk *draft* berupa resolusi, *joint-communique*, deklarasi, rekomendasi, *points of intervention*, *speech/remarks*, *memorandum of understanding (MoU)*, *statement*, dan lain sebagainya.

Untuk penyusunan bahan/materi rapat tersebut, Bagian Set. KSR mengacu pada hasil Sidang/Konferensi Regional sebelumnya dan masukan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait dengan isu yang dibahas. Bahan/materi rapat diperoleh secara tertulis maupun hasil dari tatap muka langsung pada rapat-rapat persiapan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait.

Hasil penyusunan bahan/materi yang telah mendapatkan persetujuan dari BKSAP, akan dibahas sebagai masukan Indonesia dari sudut pandang parlemen DPR RI pada Sidang/Konferensi Regional yang dihadiri.

Tahapan pada saat Sidang/Konferensi Regional

Kemudian *draft* tersebut dibahas delegasi dalam Sidang/ Konferensi regional. Biasanya, pada saat pembahasan, *draft* tersebut mengalami revisi karena perkembangan politik terkini yang sedang terjadi. Misalnya membahas masalah Palestina dan pada saat Sidang berlangsung terjadi serangan Israel kepada rakyat Palestina dengan korban lebih banyak, maka *draft* pidato/resolusi/statement ditambahkan klausul bahwa Indonesia mengutuk serangan tersebut yang sebelumnya tidak disiapkan untuk masuk sebagai poin pernyataan Indonesia.

Pada fase ini, Delegasi BKSAP juga membuat *press release* yang disampaikan melalui website www.dpr.go.id. Delegasi BKSAP juga menyampaikan berita melalui akun media sosial resmi DPR RI (Tweeter @DPR_RI ; Facebook @DPRRI; Instagram @dpr_ri ; Youtube @DPRRI) sebagai informasi aktual dan *real time* atas kinerja BKSAP kepada masyarakat luas. Meskipun Sekretariat di Biro KSAP yang menyusun *press release* tersebut, namun *press release* sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4, termasuk *output* kinerja dari Biro Pemberitaan Parlemen.

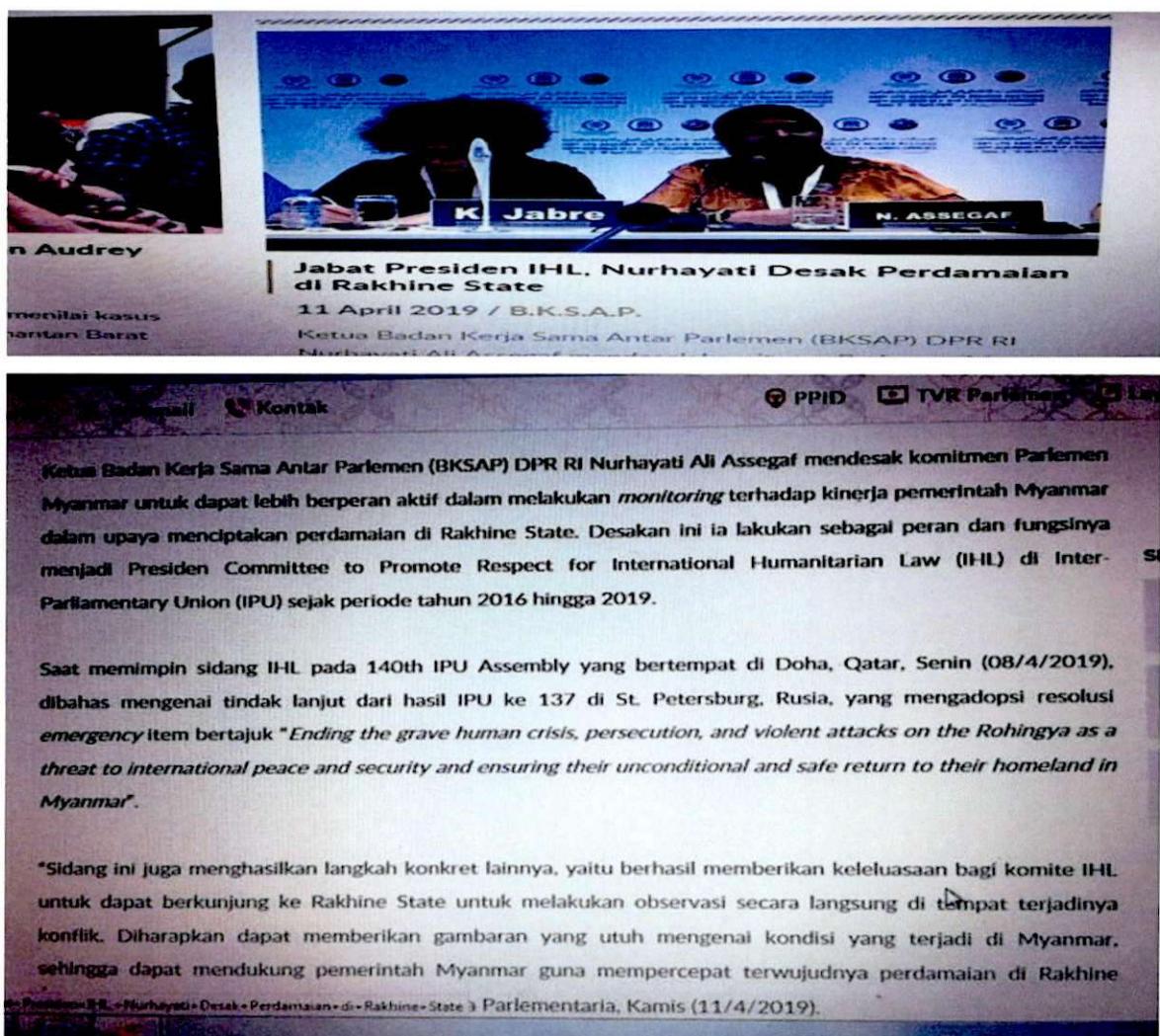
Setelah pembahasan dan perdebatan antar delegasi, Sidang/Konferensi regional tersebut akan menetapkan keputusan berupa resolusi/ *joint-communique*/ deklarasi/rekomendasi/*Chair's Summary* untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing parlemen di tingkat nasional.

Tahapan setelah Sidang/Konferensi Regional

Hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional tersebut akan menjadi bahan/materi rapat pada penyiapan bahan/materi rapat Sidang/Konferensi Regional selanjutnya. Hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional tersebut yang berupa resolusi/ *joint-communique*/ deklarasi/rekomendasi disampaikan dalam bentuk surat tertulis, dengan model sebagaimana pada Gambar 5, kepada Komisi DPR/ Lembaga/Kementerian/Instansi

Pemerintah terkait guna ditindaklanjuti di tingkat nasional. Hingga saat ini belum ada mekanisme pengawasan melekat dari BKSAP terhadap Komisi DPR/Lembaga/Kementerian/Instansi Pemerintah terkait dalam hal implementasi tindak lanjut hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional tersebut.

Guna transparansi dan keterbukaan informasi publik, hasil Sidang/Konferensi Regional perlu diinformasikan pula kepada masyarakat agar masyarakat turut memantau implementasi hasil Sidang/Konferensi Regional secara optimal di tingkat nasional demi kepentingan rakyat.



Gambar 4. Contoh *Press Release* yang dibuat oleh BKSAP DPR RI pada saat menghadiri sidang/konferensi regional



Gambar 5. Contoh Surat dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen kepada Komisi DPR/Lembaga/Kementerian/Instansi Pemerintah terkait tentang hasil-hasil Sidang/Konferensi regional guna ditindaklanjuti di tingkat nasional

e. Sekretariat Pendukung Pelaksana Diplomasi Parlemen Indonesia

Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menetapkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR maka dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR. Jadi DPR RI didukung oleh suatu lembaga pendukung kinerja DPR RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

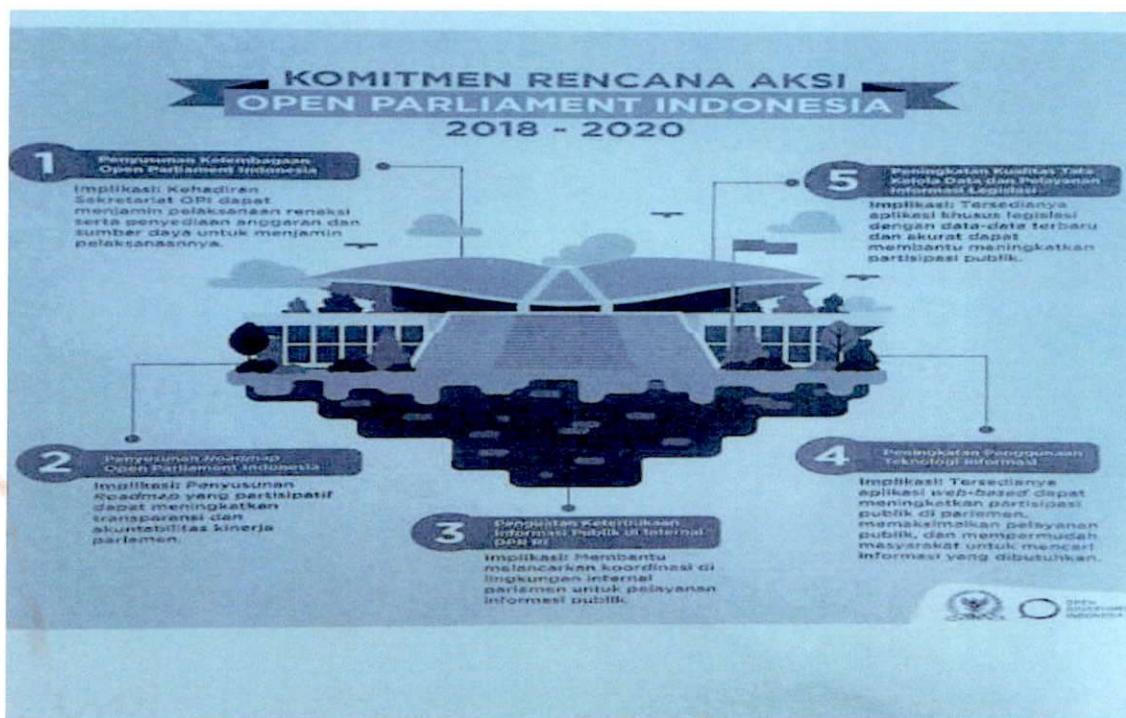
Menurut Pasal 182, Pasal 184 dan Pasal 189 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa BKSAP didukung oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang bertugas secara khusus menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar parlemen dan layanan alih bahasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. Salah satu bagian di Biro KSAP adalah Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (Bagian Set. KSR) yang mempunyai fungsi penyelenggaraan rapat dan tata usaha *desk* organisasi parlemen regional dan kerja sama organisasi multilateral regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. Pasal 190 PERSEKJEN Nomor 6 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok dari Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional adalah pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kedudukan dan Struktur Organisasi Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional dijelaskan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kedudukan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (KSR) dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

f. Tantangan Desk Kerja Sama Regional BKSAP

Pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan HUT DPR RI ke-73, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan pencanangan *Open Parliament* dan kemudian, pada tanggal 28 September 2018, menyusun Rencana Aksi Nasional ***Open Parliament Indonesia*** 2018 – 2020, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 7, yang mencakup lima komitmen utama yaitu: ***pertama***, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; ***kedua***, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; ***ketiga***, penguatan keterbukaan informasi publik di parlemen; ***keempat***, penyusunan peta jalan atau *roadmap* ***Open Parliament Indonesia***; dan ***kelima***, penyusunan kelembagaan ***Open Parliament Indonesia***. Melalui ***Open Parliament Indonesia*** tersebut DPR RI memantapkan langkah menjadi “Parlemen Modern” dengan terus berusaha menjadi lembaga legislatif yang informatif dan transparan di era keterbukaan informasi publik melalui teknologi digital saat ini.



Gambar 7. Komitmen Rencana Aksi *Open Parliament* Indonesia 2018 – 2020 yang ditetapkan oleh DPR RI pada tanggal 28 September 2018

Kebijakan DPR atas *Open Parliament Indonesia* tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memiliki Rencana Aksi Nasional (Renstranas) *Open Parliament* yang terpisah dari Renstranas Pemerintah, sebagai negara ke-3 di kawasan Asia Pasifik yang mendeklarasikan *Open Parliament*, dan sebagai negara ke-10 di tingkat internasional yang mendeklarasikan *Open Parliament* dan memiliki Renstranas.

Open Parliament Indonesia bertujuan membuat DPR RI menjadi semakin dekat dengan masyarakat dan semakin memperkuat peran DPR RI dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. Pemikiran dasar *Open Parliament* adalah upaya menjembatani kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan para wakil rakyat dalam mendapatkan informasi publik dan “parlemen dapat diberdayakan apabila terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif”. Deklarasi ***Open Parliament Indonesia*** tersebut memantapkan langkah DPR RI menjadi “Parlemen Modern” yang ditandai dengan tiga indikator utama yaitu transparansi, representasi dan pemanfaatan teknologi. Sesuai *Declaration on Parliamentary Openness* yang diluncurkan pada penyelenggaraan *IPU World e-Parliament Conference on International Day of Democracy* pada tanggal 15 September 2012 di Roma, empat prinsip keterbukaan parlemen yaitu budaya keterbukaan, transparansi, akses informasi dan penggunaan teknologi.

“DPR RI sebagai parlemen modern” merupakan komitmen kesiapan DPR menjadi “lembaga representasi rakyat (*people's representation*) yang modern dan terpercaya”, mampu menjamin partisipasi masyarakat (*citizenship participation*) dalam politik¹, dan pelaksanaan diplomasi parlemen yang handal sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang mengatur representasi rakyat (Pasal 210), partisipasi masyarakat (Pasal 215), dan peran diplomasi DPR (Pasal 219). DPR RI harus mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat; menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-

¹ Partisipasi masyarakat (*citizenship participation*) dalam politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

banyaknya; meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*); melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas; dan mengimplementasikan sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan *Open Parliament* Indonesia ini merujuk pula pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang bertujuan untuk:

- Jaminan Hak, yaitu menjamin hak warga negara Indonesia untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik , program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan.
- Partisipasi Masyarakat, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Peran Aktif, yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- *Good Government*, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).
- Pengetahuan, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pelayanan Informasi, yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Untuk pelaksanaan UU KIP di lingkungan DPR RI dikeluarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur ruang lingkup informasi publik di DPR, informasi yang wajib dikecualikan untuk publik, dan standar pelayanan informasi publik. Salah satu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPR (legislasi, pengawasan, anggaran). Sesuai ketentuan dalam UU KIP, Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI diharapkan menyampaikan kepada publik,

informasi yang berkaitan dengan Badan Publik dan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, dalam hal ini Badan Publik yang dimaksud adalah BKSAP.

Semangat *Open Parliament* Indonesia juga sejalan dengan posisi Indonesia sebagai anggota tetap Parlemen Sedunia *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, dimana DPR RI melalui BKSAP mengembangkan tugas meningkatkan citra positif Indonesia sebagai “negara demokrasi dengan parlemen modern”. Pada pertemuan *The 2010 International Conference on Benchmarking and Self-Assessment for Democratic Parliament*, “parlemen modern yang demokratis” diartikan sebagai parlemen yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan dan representasi dengan lebih optimal di tingkat lokal, nasional dan internasional, serta transparansi, mudah diakses dan akuntabel,² sebagaimana dijabarkan pula dalam *Universal Declaration on Democracy*³ dan *Declaration on Parliamentary Openness*⁴.

Di negara-negara modern demokratis, partisipasi politik masyarakat dinilai sebagai aktualisasi dari proses demokratisasi untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik di negaranya dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik tersebut. Pasal 7 Tata Tertib DPR RI Tahun 2014 menyebutkan salah satu tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sedangkan Pasal 215 mengatur partisipasi masyarakat bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR. BKSAP yang fungsinya menitikberatkan pada pengawasan, maka BKSAP dimungkinkan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penerimaan masukan secara lisan dan/atau tertulis

² Anthony Staddon and Dick Toornstra, “Benchmarking for Democratic Parliaments” dalam O’Brien, Rick Stapenhurst, and Lisa von Trapp, Editions, *Benchmarking and Self-Assessment for Parliaments*, World Bank Group, Washington, 2016. Chapter 6 halaman 127-137

³ *Universal Declaration on Democracy* diadopsi pada tanggal 16 September 1999 di Kairo – Mesir oleh Sidang Council ke-161 dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* yaitu organisasi Parlemen Sedunia yang memberikan acuan bagi penyelenggaraan parlemen yang demokratis dan modern

⁴ *Declaration on Parliamentary Openness* diluncurkan pada penyelenggaraan Sidang *World e-Parliament Conference* Tahun 2012 di Roma – Italia, bertepatan dengan Hari Internasional Demokrasi (*International Day of Democracy*) yang jatuh pada tanggal 15 September 2012.

dalam proses pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sedangkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat di BKSAP diperlukan adanya kesadaran publik dan keterlibatan publik (*Public Awareness dan Engagement*) pada kegiatan-kegiatan di BKSAP.

2. Permasalahan

Untuk melihat permasalahan yang ada di BKSAP terkait tugas dan fungsi Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional dalam mendukung kinerja BKSAP sebagai bagian dari “DPR RI parlemen modern demokratis” sesuai prinsip *Open Parliament* dan UU KIP, digunakan dua pendekatan, yaitu *fishbone diagram* atau *cause effect diagram* dan analisa kesenjangan (*gap analysis*).

a. Pendekatan *fishbone diagram* atau *cause effect diagram*

Pendekatan *fishbone diagram* atau *cause effect diagram* digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari permasalahan yang ada di BKSAP pada kondisi sekarang ini dengan mencakup berbagai aspek yang saling terkait yaitu sumber daya manusia (*Man Power*), metode (*Method*), sarana-prasarana (*Machine*), material (*Materials*), lingkungan (*Environment*) dan sistem pengukuran (*Measurement*) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 8.

Dari penggunaan pendekatan *fishbone diagram* atau *cause effect diagram* tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan di BKSAP pada kondisi sekarang ini penekanan terberat pada **metode (method)**, **lingkungan (environment)** dan **sarana-prasarana (machine)** dengan asumsi sebagai berikut:

- **SUMBER DAYA MANUSIA:** Anggota BKSAP *desk* regional sulit menghadiri rapat-rapat dikarenakan kesibukan kedewanan yang sangat padat sehingga pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi terhambat. Tenaga Ahli BKSAP yang mumpuni dan handal mendukung penyediaan bahan/materi rapat *desk* regional BKSAP.
- **METODE:** dalam hal proses, Anggota BKSAP *desk* regional jarang melakukan pertemuan tatap muka dengan masyarakat dan rapat-rapat BKSAP sangat jarang dapat terlaksana. Akibatnya masyarakat kurang mengenal BKSAP dan masyarakat tidak banyak terlibat pada kinerja BKSAP.
- **SARANA-PRASARANA:** dalam hal teknologi, BKSAP telah memiliki *website* yang menginduk kepada *website* utama DPR RI. *Website* tersebut berisi informasi satu arah dan belum ada akses komunikasi interaktif antara BKSAP dengan masyarakat. BKSAP juga telah memiliki akun Instagram, Facebook, Twitter namun pemanfaatannya belum maksimal.
- **MATERIAL:** Penyusunan bahan/materi rapat *desk* regional BKSAP berdasarkan pada bahan-bahan dari KEMENLU RI/instansi terkait dan hasil-hasil sidang/konferensi regional sebelumnya, belum ada pandangan alternatif lainnya.
- **LINGKUNGAN:** DPR RI telah mencanangkan *Open Parliament Indonesia* namun BKSAP dan kinerjanya belum dikenal dekat oleh masyarakat luas
- **SISTEM PENGUKURAN:** Landasan hukum diplomasi parlemen Indonesia telah memadai, termasuk aturan partisipasi masyarakat di parlemen, namun DPR RI belum menyediakan akses partisipasi masyarakat di bidang politik luar negeri. Belum ada mekanisme pengawasan melekat terhadap tindak lanjut hasil Sidang/konferensi regional yang disampaikan kepada AKD DPR/Kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah terkait.

Fishbone Diagram



Gambar 8. Analisa Fishbone Diagram atau Cause and Effect Diagram Permasalahan pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

- b. Pendekatan analisa kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1

Kondisi yang diharapkan terwujud atas kinerja BKSAP yaitu: masyarakat luas memahami nilai strategis diplomasi parlemen; optimalisasi kualitas/mutu bahan/materi rapat Desk Kerja Sama Regional BKSAP dapat memberikan pandangan alternatif atau perspektif lain untuk diplomasi parlemen sebagai representasi masyarakat; dan ada kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) sehingga masyarakat dapat berinisiatif menyampaikan *feedback* kepada BKSAP.

Tabel 1. Analisa Kesenjangan (*Gap Analysis*) Permasalahan pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

NO	KONDISI SAATINI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KESENJANGAN
1	Diplomasi parlemen di kawasan regional belum dikenal masyarakat luas	Masyarakat luas memahami nilai strategis diplomasi parlemen selain tiga fungsi parlemen lainnya	Website yang ada bersifat informasi satu arah dan belum menyediakan informasi komprehensif tentang hasil diplomasi parlemen di kawasan regional
2	Bahan/materi rapat tergantung pada masukan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait sesuai permintaan BKSAP	Optimalisasi kualitas/mutu bahan/materi rapat Desk Kerja Sama Regional BKSAP dapat memberikan pandangan alternatif atau perspektif lain untuk diplomasi parlemen sebagai representasi masyarakat	Belum ada mekanisme pengawasan melekat pada tindak lanjut dari AKD DPR /Kementerian /Lembaga /Instansi Pemerintah terkait terhadap implementasi hasil sidang/konferensi regional di tingkat nasional Penyiapan bahan/materi rapat BKSAP belum melibatkan partisipasi masyarakat (<i>feedback</i>)
3	Hubungan BKSAP dengan masyarakat luas tergantung pada pertemuan tatap muka langsung atas inisiatif BKSAP	Ada kesadaran dan keterlibatan publik (<i>public awareness and engagement</i>) sehingga masyarakat dapat berinisiatif menyampaikan <i>feedback</i> kepada BKSAP	Belum ada media interaktif yang memfasilitasi masyarakat luas menyampaikan secara langsung aspirasinya kepada BKSAP

Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut yaitu *Fishbone Diagram* dan Analisa Kesenjangan (*gap analysis*) tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada di *desk* organisasi regional BKSAP dalam rangka mendukung *Open Parliament* Indonesia adalah masyarakat Indonesia pada umumnya belum mengenal dekat BKSAP dan kinerja diplomasi parlemen khususnya ruang lingkup regional; belum ada kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) pada politik luar negeri; masyarakat belum dilibatkan dalam proses penyiapan bahan/materi rapat *desk* organisasi regional; BKSAP belum mengoptimalkan *website* yang telah ada; belum ada media interaktif yang memfasilitasi akses langsung masyarakat ke BKSAP; dan belum ada mekanisme pengawasan melekat dari BKSAP terhadap tindak lanjut hasil sidang/konferensi regional dari AKD DPR/Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait.

Memperhatikan kondisi ideal yang diharapkan dari permasalahan yang ada di BKSAP tersebut, maka diseminasi kinerja BKSAP perlu ditingkatkan melalui pengembangan *website* BKSAP sebagai sarana informasi dan komunikasi dua arah yang cepat, mudah dan efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air sehingga ada kesadaran masyarakat (*public awareness*) untuk lebih memahami diplomasi parlemen Indonesia dan tertarik untuk memberikan respons (*feedback*) sebagai bentuk partisipasi publik atau keterlibatan publik (*public engagement*) di BKSAP.

Sesuai ketentuan dalam UU KIP, kinerja BKSAP yang perlu diketahui masyarakat adalah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional yang berdampak pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat di tingkat nasional dan harus ditindaklanjuti oleh AKD DPR/Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait. Penyampaian hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional kepada publik adalah bentuk dari transparansi dan pertanggungjawaban kinerja BKSAP kepada masyarakat. Respons (*feedback*) masyarakat dapat membantu BKSAP dalam membentuk mekanisme pengawasan melekat dari BKSAP terhadap tindak lanjut hasil sidang/konferensi regional oleh AKD DPR/Kementerian/Lembaga/Instansi

Pemerintah terkait. Untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas kinerja BKSAP tersebut, maka Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional membuat telaah atas hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk dilaporkan melalui *website* kepada masyarakat luas.

Proyek perubahan dengan menitikberatkan pada pengembangan *website* BKSAP yang memuat telaah atas hasil-hasil Sidang/Konferensi regional ini sangat dibutuhkan oleh BKSAP pada era keterbukaan parlemen saat ini guna meningkatkan citra (*image*) positif DPR kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri, bahwa DPR RI adalah parlemen yang modern, transparan, mudah diakses, akuntabel, responsif dan representatif. *Website* ini membuka ruang interaktif kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif secara langsung pada proses diplomasi parlemen di kawasan regional sehingga BKSAP dapat meningkatkan pula kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada DPR atas kinerjanya.

Meskipun proyek perubahan ini memanfaatkan *website* BKSAP yang telah ada pada www.dpr.go.id namun proyek ini dapat dikatakan sebagai gagasan baru sama sekali di Biro Kerja Sama Antar Parlemen, karena proyek perubahan ini membuat laman baru <http://diparlin.dpr.go.id> dan baru pertama kalinya menyajikan telaah hasil sidang/konferensi regional serta menyediakan akses kepada masyarakat luas untuk menyampaikan tanggapan (*feedback*) secara langsung sebagai masukan pada proses penyusunan bahan/materi rapat *desk* kerja sama regional BKSAP.

Dalam pelaksanaan diplomasi parlemen Indonesia di kawasan regional, BKSAP dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada proses tahapan ketiga penyiapan bahan/materi rapat *Desk Kerja Sama Regional* BKSAP, yaitu tahapan setelah Sidang/Konferensi regional selesai dilaksanakan. Hasil-hasil Sidang/Konferensi regional tersebut akan menjadi bahan/materi rujukan bagi Sidang/Konferensi selanjutnya, dan juga disampaikan dalam bentuk surat tertulis

kepada Komisi DPR/Lembaga/Kementerian/Instansi Pemerintah terkait guna ditindaklanjuti di tingkat nasional. Namun BKSAP belum memiliki mekanisme pengawasan melekat terhadap tindak lanjut di tingkat nasional. Sedangkan pertanggungjawaban kinerja BKSAP kepada masyarakat disampaikan dalam bentuk informasi di website ini berupa telaah hasil Sidang/Konferensi seperti Resolusi, Rekomendasi, *Joint Communique*, Deklarasi, dll, yang ditampilkan per isu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui website ini.

Penerapan *Open Parliament Indonesia* dan UU KIP tersebut telah mendorong BKSAP untuk mengoptimalkan peran diplomasi parlemen di kawasan regional guna mewujudkan DPR RI menjadi parlemen modern yang demokratis dan meningkatkan citra positif Indonesia sebagai negara demokrasi dengan parlemen yang modern, khususnya di kawasan regional.

Tantangan yang dihadapi dari proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” ini antara lain:

1. Sumber Daya Manusia terbatas baik dari segi jumlah tenaga maupun kualitas/mutu kemampuannya (*knowledge capacity*). Pegawai di Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional yang menangani substansi hanya 3 (tiga) orang dan belum semua berlatar pendidikan Pasca-Sarjana (S-2).
2. Padatnya agenda rutin di BKSAP membuat Tenaga Ahli BKSAP tidak dapat diharapkan untuk menyiapkan telaah hasil Sidang/Konferensi regional dalam waktu mendadak
3. Diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang tinggi (*prudence*) dalam menyikapi pandangan masyarakat terhadap kebijakan politik luar negeri mengingat isu-isu yang dibahas sensitif dan berkaitan dengan kedaulatan negara lain
4. Belum ada *Standard Operational Procedure (SOP)* atau pedoman pembuatan telaah hasil Sidang/Konferensi Regional yang dapat digunakan sebagai rujukan menilai kualitas/mutu telaah hasil Sidang/Konferensi regional sudah optimal dan menyentuh hal-hal yang esensi bagi masyarakat Indonesia

5. Pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 dan kondisi politik yang semakin memanas pada pengumuman hasil Pemilihan Umum pada tanggal 22 April 2019, telah menimbulkan keadaan *force majeur* yang mengganggu pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan pada rencana dan capaian (*milestones*) jangka pendek, khususnya kegiatan sosialisasi *website* dan peluncuran website, pelaksanaannya menjadi mundur.

II. TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN

1. Tujuan

Proyek Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan citra positif (*image*) DPR RI dan kepercayaan publik (*public trust*) kepada DPR RI sebagai parlemen modern, terbuka, transparan, terpercaya dan demokratis dalam menjalankan fungsi representasi rakyat; untuk optimalisasi kualitas/mutu bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen; dan untuk menjadi *role model* “parlemen modern demokratis” di kawasan regional.

2. Manfaat Perubahan

Proyek perubahan ini memiliki manfaat yang luas yang mencakup para pemangku kepentingan/pengguna, organisasi DPR secara keseluruhan, Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional sebagai Unit Kerja, dan bagi *Project Leader* sendiri.

Bagi para pemangku kepentingan/pengguna, proyek perubahan ini bermanfaat untuk :

- memperkokoh wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia dan pentingnya fungsi diplomasi parlemen
- mendukung Rencana Strategis Nasional *Open Parliament Indonesia* 2018-2020 dan implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- masyarakat mendapatkan *update* informasi tentang capaian kinerja BKSAP dan hasil-hasil diplomasi parlemen di tingkat regional yang perlu segera diimplementasikan di tingkat nasional
- meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat (*public awareness and engagement*) terhadap kinerja BKSAP
- memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan (*feedback*) terhadap hasil sidang/konferensi regional

- menjadi sarana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk melakukan analisa diplomasi parlemen di tingkat regional

Bagi organisasi DPR secara keseluruhan, proyek perubahan ini bermanfaat untuk :

- Meningkatkan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP sehingga dapat menjadi model atau contoh bagi negara-negara lain di kawasan regional
- DPRRI melalui BKSAP dapat lebih dekat dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan nilai-nilai demokrasi dan parlemen terbuka yang telah disepakati oleh dunia internasional
- meningkatkan citra positif (*image*) DPR RI dan kepercayaan publik (*public trust*) kepada DPR RI sebagai parlemen modern, terbuka, transparan, terpercaya dan demokratis dalam menjalankan fungsi representasi rakyat
- Menjadi sarana sinkronisasi diplomasi parlemen Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri Pemerintah di tingkat regional
- Partisipasi masyarakat secara langsung dapat memberikan pandangan alternatif atau perspektif lain pada diplomasi parlemen sehingga akan meningkatkan kualitas mutu bahan/materi rapat *desk* organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Bagi Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional sebagai Unit Kerja, proyek perubahan ini bermanfaat untuk optimalisasi kualitas mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Proyek perubahan memberikan kesadaran kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja Bagian sesuai sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik.

Sedangkan bagi *Project Leader* sendiri, proyek perubahan ini bermanfaat untuk memperkuat mutu *leadership* dan memberikan keteladanan sebagai *role model* perubahan dalam menghadapi era keterbukaan parlemen.

II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN DAN RUANG LINGKUP

1. Deskripsi Proyek Perubahan

Proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” ini dilakukan melalui pembangunan laman *website* yang baru sama sekali <http://diparlin.dpr.go.id> dan merupakan pengembangan dari *website* BKSAP yang telah ada <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> dengan tampilan sebagaimana Gambar 9 dan Gambar 10. *Website* baru ini ditujukan untuk optimalisasi penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* kerja sama regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dengan persandingan antara *website* BKSAP lama dengan *website* proyek perubahan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.



Gambar 9. Tampilan layout website Badan Kerja Sama Antar Parlemen
<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen>

Tabel 2. Persandingan Website Badan Kerja Sama Antar Parlemen dengan website Proyek Perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

	Website BKSAP http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen	Website Proyek Perubahan http://diparlin.dpr.go.id
Layout	Berlogo DPR RI dengan tulisan Badan Kerja Sama Antar Parlemen dengan warna lembut	Berlogo DPR RI dengan tulisan Diplomasi Parlemen Indonesia Kawasan Regional dengan warna yang lebih terang dan terkesan ceria
Contents	<p>Informasi tentang BKSAP dan kinerjanya sebagai Alat Kelengkapan Dewan Produk BKSAP yang wajib disediakan sesuai UU KIP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kunjungan - Laporan Singkat - Laporan Kegiatan - <i>Press Release</i> - Produk lainnya seperti Buku, Rekomendasi BKSAP dll <p>Catatan: <i>Press Release</i> merupakan informasi berita tentang partisipasi DPR RI yang sedang menghadiri Sidang/Konferensi atau kegiatan kedewanan lainnya yang sedang berlangsung</p> <p>Isi website mencakup seluruh kegiatan BKSAP dalam kerangka multilateral internasional/regional, kerangka bilateral, dan diplomasi individu.</p>	<p>Setelah menghadiri Sidang/Konferensi Regional, BKSAP akan menyampaikan Surat beserta lampiran kepada Kementerian/Lembaga terkait tentang hasil keputusan Sidang/Konferensi regional untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional. website ini dirancang dengan maksud serupa namun ditujukan kepada masyarakat luas dalam bentuk telaah hasil sidang/konferensi sebagai informasi yang wajib disampaikan kepada publik</p> <p>Isi website khusus memuat informasi berupa telaah hasil Sidang/Konferensi regional seperti Resolusi, Rekomendasi, Joint Communique, Deklarasi, dll. yang ditampilkan per isu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan <i>friendly user</i>, sehingga masyarakat tergerak untuk menyampaikan aspirasinya (<i>feedback</i>) melalui <i>feature “kontak”</i> yang disediakan dalam website ini.</p>

Features	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang • Agenda Acara • Indonesia di Organisasi Intl • Daftar Kunjungan Luar Negeri • Daftar Anggota • Laporan Kunjungan • Press Release • Laporan Singkat • Buku Diplomasi DPR • Laporan Kegiatan • Galeri Foto • Sekretariat • Kontak • Diplomasi Regional (www.diparlin.dpr.go.id) <p>Tidak memiliki <i>keywords</i> yang memudahkan publik untuk melakukan pencarian isu.</p>	<p>Merupakan salah satu <i>feature</i> dari Website BKSAP http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen</p> <p>Memiliki <i>feature</i> tersendiri yang <i>friendly user</i> dan terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beranda (Latar Belakang, Landasan Hukum, Organisasi Regional, Resolusi) • Inisiatif DPR • Asia Tenggara • Asia Pasifik • Asia Eropa • Asia Afrika • Asia • Kontak (publik dapat mengirimkan feedback dalam bentuk email) • Artikel Populer • Artikel Terbaru • Memiliki keywords yang memudahkan publik untuk melakukan pencarian isu.
Access	<p>Belum menyediakan fitur khusus yang memberikan akses kepada publik untuk menyampaikan tanggapan (<i>feedback</i>) (meskipun dalam bentuk email)</p> <p>Dibuka melalui <i>browser</i> internet langsung ke alamat <i>website</i> DPR www.dpr.go.id lalu klik ke fitur “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP”</p> <p>Juga dapat dibuka melalui Aplikasi DPR Now! lalu klik “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP”</p>	<p>Menyediakan fitur “Kontak” yang memberikan akses kepada publik untuk menyampaikan tanggapan (<i>feedback</i>) terhadap isu-isu politik regional</p> <p>Dibuka melalui <i>browser</i> internet dengan alamat <i>website</i> DPR www.dpr.go.id BKSAP lalu klik ke fitur “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP” lalu pilih fitur “Diplomasi Regional”</p> <p>Juga dapat dibuka melalui <i>browser</i> internet langsung dengan alamat laman baru http://diparlin.dpr.go.id</p> <p>Aplikasi DPR Now! dapat menjadi pilihan akses namun tidak bisa langsung ke alamat <i>website</i> http://diparlin.dpr.go.id, akses</p>

		harus melalui alamat BKSAP terlebih dahulu, yaitu dengan klik “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP” lalu pilih fitur “Diplomasi Regional”
--	--	---

Website <http://diparlin.dpr.go.id> diharapkan menjadi media yang efektif untuk sosialisasi diplomasi parlemen Indonesia di kawasan regional dan diseminasi informasi atas kinerja BKSAP serta memfasilitasi akses langsung partisipasi masyarakat dengan komunikasi dua arah melalui fitur “kontak” dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya (*feedback*) di bidang politik luar negeri atas hasil-hasil Sidang/Konferensi regional yang dihadiri oleh BKSAP. Aspirasi masyarakat (*feedback*) tersebut kemudian akan ditelaah untuk menjadi “input partisipasi publik” bagi BKSAP pada saat penyiapan bahan/materi rapat berikutnya, sehingga proses penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk kerja sama* regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen di masa depan akan melibatkan partisipasi masyarakat.

Proyek perubahan ini selain untuk mendukung implementasi sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) juga untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness dan engagement*) terhadap inisiatif DPR RI dalam mewujudkan *Open Parliament Indonesia* untuk mendorong DPR RI menjadi parlemen yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, inklusif, representatif dan modern. Keterlibatan masyarakat/publik melalui *website* dalam proses diplomasi parlemen di kawasan regional tersebut diharapkan dapat mencerminkan terlaksananya nilai-nilai demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” dan terwujudnya cita-cita “diplomasi untuk kepentingan rakyat”. Dengan demikian, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga terlaksana secara otomatis.

2. Ruang Lingkup

Fokus proyek perubahan ini adalah mengembangkan website <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> dengan membangun sebuah laman baru <http://diparlin.dpr.go.id> yang berisi informasi komprehensif tentang telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi regional dan menyediakan akses kepada masyarakat luas untuk interaktif atau menyampaikan secara langsung aspirasinya (*feedback*) melalui fitur “kontak”. Website <http://diparlin.dpr.go.id> ini dapat diakses secara langsung melalui alamat website tersebut atau melalui website <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> dengan menekan pilihan fitur “diplomasi regional” maka akan secara otomatis terhubung ke laman <http://diparlin.dpr.go.id>. Website ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*).

Mengingat proyek perubahan ini rintisan maka *tools* untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam proses diplomasi parlemen baru akan disiapkan pada tahapan jangka menengah atau tahapan jangka panjang. Pada tahapan jangka pendek proyek perubahan ini fokus pada diseminasi untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan tanggapan (*feedback*) kepada isu-isu diplomasi regional. Tanggapan (*feedback*) masyarakat selain menjadi tambahan bahan/materi rapat *Desk KSR BKSAP*, juga dapat memberikan pandangan alternatif atau perspektif lain pada diplomasi parlemen regional, serta membantu BKSAP dalam melakukan pengawasan melekat terhadap tindak lanjut dari hasil sidang/konferensi regional di tingkat nasional.

Lokasi website <http://diparlin.dpr.go.id> berada di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.

IV. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*), TIM EFEKTIF DAN TATAKELOLA PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Dalam penyelesaian proyek perubahan ini, identifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan dari internal institusi dan eksternal institusi dimulai dari pembentukan Tim Efektif, pembuatan *website* hingga tahap operasional. *Stakeholder Internal* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 adalah para pihak terkait proyek perubahan dalam lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan *stakeholder eksternal* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4 adalah para pihak terkait di luar lingkup lokus tersebut.

Tabel 3. *Stakeholders Internal* pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

No	Stakeholders	Peran	Posisi	Potensi Dukungan (+/-)	Strategi Komunikasi	Kendala
1	Pimpinan DPR RI (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)	Pelaksana diplomasi parlemen Indonesia memberikan instruksi <i>top-down</i> sesuai hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR RI	Dari <i>Latent</i> menjadi <i>Promoter</i>	Dari Netral (+) menjadi Positif (+)	Konsultasi	
2	Pimpinan BKSAP (Ketua BKSAP)	Pelaksana diplomasi parlemen Indonesia memberikan instruksi <i>top-down</i> sesuai hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP	Dari <i>Promoter</i> menjadi <i>Latent</i>	Netral (+/-)	Konsultasi.	Menghadapi Pemilu tanggal 17 April 2019 dan penetapan pemenang Pemilu tanggal 22 Mei 2019, Pimpinan sering berada di Daerah Pemilihan dan tugas ke sidang/
3	Pimpinan BKSAP (Wakil Ketua BKSAP)	Pelaksana diplomasi parlemen	<i>Latent</i>	Netral (+/-)	Konsultasi	

		Indonesia memberikan instruksi <i>top-down</i> sesuai hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP				konferensi di luar negeri sehingga sulit bertemu di Jakarta
4	Anggota BKSAP (1 dari 50)	Pelaksana diplomasi parlemen Indonesia sesuai hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP	Dari <i>Latent</i> menjadi Promoter	Netral (+/-)	Konsultasi	
5	Anggota Komisi I (50)	Pelaksana diplomasi parlemen Indonesia sesuai hasil keputusan Rapat Komisi I	<i>Latent</i>	Netral (+/-)	Diskusi dan koordinasi melalui Sekretariat Komisi I	
6	Sekretaris Jenderal DPR RI	Memberikan arah kebijakan sesuai Renstra dan hasil keputusan Pimpinan DPR RI	Dari <i>Latent</i> menjadi Promoter	Dari Netral (+) menjadi Positif (+)	Konsultasi	
7	Deputi Bidang Persidangan	Memberikan arah kebijakan sesuai instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI	Promoter	Positif (+)	Konsultasi	
8	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	Sebagai Mentor , memantau perkembangan, memberikan bimbingan, koordinasi vertikal/horisontal	Promoter	Positif (+)	Konsultasi, Diskusi, Koordinasi	
9	Kepala Bagian di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen (2)	Memberikan pandangan, saran dan dukungan substansi serta sebagai kolaborator	Dari <i>Latent</i> menjadi Promoter	Dari Netral (+) menjadi Positif (+)	Diskusi dan koordinasi	
10	Kepala Bagian Sekretariat Komisi I	Memberikan dukungan substansi dan sebagai kolaborator	Dari <i>Apathetic</i> menjadi Promoter	Dari Netral (+/-) menjadi Positif (+)	Koordinasi	

11	Tenaga Ahli BKSAP	Memberikan dukungan substansi dan sebagai kolaborator	Promoter	Positif (+)	Diskusi dan koordinasi	
12	Kepala Pusat Data dan Informasi	Mengawal perkembangan pembuatan dan operasional website	Dari Latent menjadi Promoter	Dari Netral (+) menjadi Positif (+)	Koordinasi	
13	Kepala Bagian Data dan Informasi	Mengawal perkembangan pembuatan dan operasional website	Dari Apathetic menjadi Latent	Dari Netral (+/-) menjadi Postifif (+)	Koordinasi	Sudah bertemu tatap muka satu kali dan pada prinsipnya mendukung namun belum kesampaian mendapatkan dukungan tertulis
14	Staf Bagian Data dan Informasi (3)	Pembuatan dan operasional website	Promoter	Positif (+)	Diskusi dan koordinasi	
15	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Mengawal tercapainya pembuatan website untuk pendukung UU KIP	Promoter	Positif (+)	Diskusi dan koordinasi	

Tabel 4. *Stakeholders Eksternal* pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

No	Stakeholders	Peran	Posisi	Potensi Dukungan (+/-)	Strategi Komunikasi	Kendala
1	Direktur Asia Pasifik dan Afrika KEMENLU RI	Pelaksana diplomasi Indonesia sesuai kebijakan Pemerintah	Latent	Netral (+/-)	komunikasi WA/surel	Kesibukan tugas sangat padat dan sering ditugaskan ke luar negeri

2	NGO terkait (Wakil Sekretaris Jenderal AIPA Secretariat, ASEAN Secretariat)	Pendukung dana/program, substansi dan <i>capacity building</i>	Dari <i>Defenders menjadi Promoter</i>	Dari Netral (+/-) menjadi Positif (+)	Diskusi, komunikasi WA/surel	
3	Direktur Hubungan Internasional Parlemen Kamboja	Pendukung pelaksanaan diplomasi parlemen sesuai kaidah internasional	Promoter	Positif (+)	komunikasi WA/surel	
4	Akademisi Ilmu Sosial Politik	Memberi masukan terkait diplomasi parlemen	<i>Defenders</i>	Netral (+/-)	komunikasi WA/surel	Waktu tidak mencukupi untuk mencari sampel
5	Mahasiswa President University	Memberi masukan terkait diplomasi parlemen	Dari <i>Defenders menjadi Promoter</i>	Dari Netral (+/-) menjadi Positif (+)	komunikasi WA/surel	
6	Masyarakat umum (Jurnalis CNN Indonesia)	Memberi masukan terkait diplomasi parlemen	Dari <i>Defenders menjadi Promoter</i>	Dari Netral (+/-) menjadi Positif (+)	website	

2. Analisis Stakeholder

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan, penggolongan *stakeholders* pada proyek perubahan berjudul “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” kedalam *quadran influence versus Interest* dapat diilustrasikan dalam Gambar 10 sebagai berikut:

1. **Latents (High Influence, Low Interest)** adalah *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan namun memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan proyek perubahan yang sedang dilakukan. Yang termasuk kedalam quadran ini yaitu, Ketua/Wakil Ketua BKSAP, Anggota BKSAP, Anggota Komisi I karena mereka memiliki pengaruh yang tinggi namun kepentingan yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan ini.

2. **Promoters** (*High Influence, High Interest*) adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan dukungan yang tinggi dan pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan proyek perubahan yang sedang dilakukan. Yang termasuk dalam quadran ini yaitu Wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Anggota BKSAP DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI dan jajaran terkait (Deputi Bidang Persidangan, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen terutama selaku mentor, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen terutama selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kepala Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota selaku Ketua Pelaksana PPID Unit Kerja di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen, Kepala Bagian Sekretariat Komisi I), Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* sebagai wakil *Non-Government Organization*, Direktur Hubungan Internasional Parlemen Kamboja dan Jurnalis CNN Indonesia sebagai wakil dari masyarakat, serta mahasiswi President University Jababeka Cikarang sebagai wakil dari dunia akademis.
3. **Defenders** (*Low Influence, High Interest*) adalah *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan dukungan yang tinggi namun pengaruh yang dimilikinya kecil terhadap keberhasilan proyek perubahan yang sedang dilakukan. Yang termasuk dalam quadran ini yaitu Direktur Asia Pasifik dan Afika Kementerian Luar Negeri, akademisi ilmu sosial politik, karena mereka kurang memiliki pengaruh namun kepentingannya tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan ini.
4. **Apathethics** (*Low Influence, Low Interest*) adalah *stakeholders* yang kurang mempunyai kepentingan dan pengaruh bagi keberhasilan proyek perubahan ini. Yang termasuk kedalam quadran ini tidak terdeteksi.



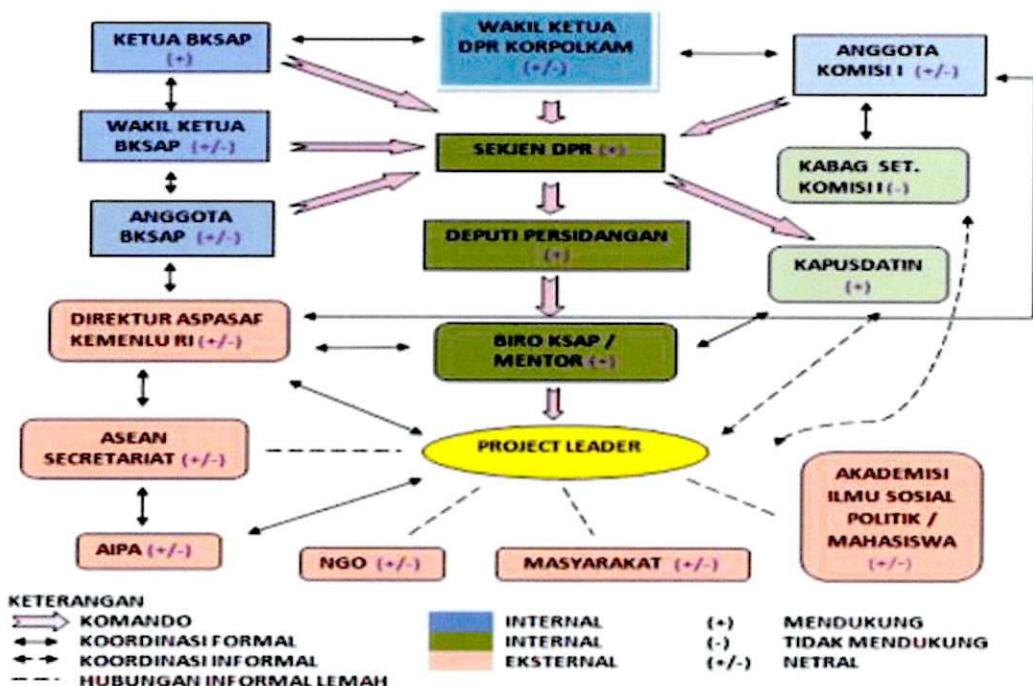
Gambar 10. Tingkat pengaruh dan kepentingan pada penggolongan *stakeholders* pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

Sedangkan pola hubungan antara *stakeholder* dengan proyek perubahan ini dapat dijelaskan melalui pemetaan *Net Mapping* dalam Gambar 11.

Keterangan Gambar 10

- ↔ koordinasi timbal balik bersifat formal di lingkungan internal instansi (konsultasi, diskusi)
- hubungan satu arah dari atas ke bawah bersifat formal di lingkungan internal institusi (arahan, petunjuk, perintah, persetujuan)
- hubungan netral bersifat informal
- ↔ koordinasi timbal balik bersifat informal dengan lingkungan eksternal instansi (konsultasi, diskusi)
- hubungan satu arah bersifat informal dari pihak yang berkepentingan (arahan, petunjuk, perintah, persetujuan)
- hubungan netral bersifat informal
- hubungan netral bersifat informal

NET MAPING STAKEHOLDERS



Gambar 11. Pemetaan hubungan jaringan *stakeholders* (*Net Mapping*) pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

2. Tim Efektif

Tim Efektif untuk proyek perubahan ini dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor dan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia yang ada dengan susunan dan komposisi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 dan struktur organisasi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 12.

STRUKTUR TIM EFEKTIF



Gambar 12. Struktur Organisasi Tim Efektif pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

Tabel 5. Susunan dan Komposisi Tim Efektif pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Dra Damayanti, MSi	Deputi Bidang Persidangan	Pengarah
2	Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti, SS, M.Phil	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	Pembimbing (Mentor)
3	Warsiti Alfiah, SIP, DESS	Kepala Bagian Set. Kerja Sama Regional	<i>Project Leader</i>
4	Anne Widyana, SS, M.Si	Kepala Sub Bagian Rapat Bagian Set KSR	Ketua Tim Substansi
5	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Set KSR	Ketua Tim Administrasi
6	Hilda Kurnia Ningsih, SH	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
7	Gadis Anggiani Marha, S.Sos	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
8	Ani Puji Lestari	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
9	Siti Masitoh	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
10	Ahmadi	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
11	Wiryawan Narendro Putro, SIP	Staf Bagian Set KSR	Administrator website
12	Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc	Pranata Komputer Muda Bagian Data dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Desain Website

13	Fariza Emra, ST, M.Sc	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
14	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
15	Dewi Amelia Tresna Wijayanti	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
16	Tide Aji Pratama	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
17	Masyithoh Annisa Ramadhani	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi

3. Tatakelola Pelaksanaan Proyek Perubahan

Tatakelola pelaksanaan proyek perubahan ini dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Susunan dan Komposisi Tim Efektif pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

NO	POSISI	PERAN	TANGGUNGJAWAB
1	Pengarah (Deputi Bidang Persidangan)	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Surat Tugas pembentukan Tim Efektif penyusunan proyek perubahan Mengarahkan dan membina <i>Project Leader</i> dalam merancang proyek perubahan 	Memantau perkembangan keberhasilan proyek perubahan dan implementasinya
2	Mentor (Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen)	<ul style="list-style-type: none"> Membimbing dan mengawasi secara profesional serta berperan sebagai inspirator/motivator Memberikan dukungan penuh kepada <i>Project Leader</i> dalam merancang proyek perubahan Memberikan bimbingan dan arahan kepada <i>Project Leader</i> dalam merumuskan permasalahan organisasi yang memerlukan perubahan Membantu <i>Project Leader</i> dalam memetakan agenda proyek yang akan dilaksanakan Memberikan persetujuan dokumen proposal dan dokumen pelaksanaan proyek perubahan 	Mengevaluasi perkembangan dan capaian proyek perubahan yang dilaksanakan oleh <i>Project Leader</i> dan Tim Efektif

		<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi project leader dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek Memantau perkembangan dan capaian sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan 	
3	Coach (Dr. Taufik Muhammad)	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan motivasi, memantau dan memberikan bimbingan dalam semua tahap proyek perubahan Melakukan diskusi dan memberikan masukan dalam menyusun rancangan proyek perubahan Memonitor kegiatan peserta selama tahap <i>taking ownership</i> dan tahap laboratorium kepemimpinan Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap <i>taking ownership</i> dan tahap laboratorium Memberikan solusi bila peserta mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan Mengembangkan instrumen monitoring terhadap progress yang dilaporkan peserta bimbingan Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil <i>coaching</i> kepada Panitia penyelenggara Diklat Kepemimpinan Tingkat III 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau perkembangan pelaksanaan proyek perubahan agar berjalan sesuai rencana Memastikan keberhasilan/capai an implementasi proyek perubahan sesuai rencana
4	Project Leader (Warsiti Alfiah, SIP, DESS)	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin proyek perubahan secara keseluruhan Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Efektif untuk bekerja efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan Tim Efektif bekerja secara efektif dan <i>stakeholder</i> memberikan

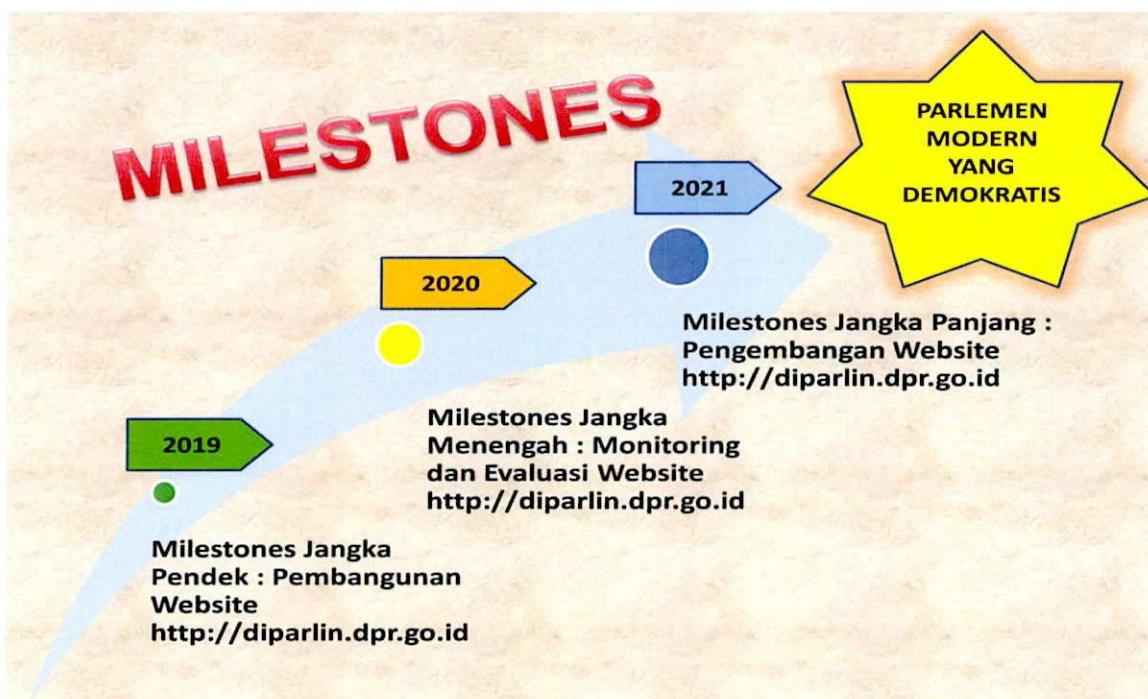
		<ul style="list-style-type: none"> • Berprakarsa melakukan diskusi interaktif dengan mentor dan <i>coach</i> serta mengikuti arahan dan masukannya • Menggalang komunikasi, kerjasama, koordinasi, kesepakatan, kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait • Memimpin rapat-rapat yang melibatkan <i>stakeholder</i> terkait • Mengacu rumusan <i>milestones</i> dalam dokumen rancangan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan • Melakukan keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki • Menggerakkan seluruh <i>stakeholder</i> dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan • Menyusun laporan proyek perubahan mulai dari rancangan proyek perubahan hingga hasil/capaian implementasi proyek perubahan 	<p>dukungan maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan proyek perubahan berhasil dilaksanakan sesuai rencana
5	Tim Desain Website (Erdinal Endradjaja dkk)	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rancangan <i>template</i> website termasuk Desain Grafis • Menerjemahkan gagasan kedalam desain website • Membuat desain dan konten website agar tampil menarik • Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Sekretariat Jenderal DPR RI terkait penempatan website kedalam server internet • Menjamin keamanan website dari serangan virus atau <i>hacks</i> • Menyiapkan dan membuat dokumentasi <i>evidence</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan website dapat dioperasikan dengan lancar tanpa hambatan serta terjamin keamanannya • Memastikan website dapat diakses dengan mudah oleh publik
6	Administrator Website (Wiryawan Narendro)	<ul style="list-style-type: none"> • Meng-upload <i>content website</i> secara rutin sesuai arahan <i>Project Leader</i> • Memantau konten/isi website 	Memastikan <i>content website</i> selalu <i>update</i> dan tepat waktu.

	Putro, S.Sos)	<p>dan aplikasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Tim Substansi 	
7	Tim Substansi (Anne Widyana, SS,M.Si dkk)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan telaah terhadap hasil-hasil Sidang/Konferensi • Membuat <i>content website</i> dari hasil telaah secara tepat waktu • Melakukan <i>editing</i> dan <i>proof-reading</i> terhadap <i>content website</i> yang akan di-upload • Mencatat dan meringkas hasil rapat-rapat dengan <i>stakeholder</i> dan membuat Laporan Singkat rapat. • Membuat narasi untuk pembuatan dokumentasi <i>evidence</i> • Melakukan koordinasi dengan Tim Desain Website dan Administrator Website untuk pengisian content website dan pembuatan dokumentasi <i>evidence</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat telaah terhadap hasil-hasil Sidang/Konferensi • Memastikan <i>content website</i> selalu terkini dan di-update tepat waktu
8	Tim Administrasi (Rifan Safari Andalas, SIP, M.Si dkk)	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat <i>draft</i> Surat Tugas dan memastikan proses administrasi lancar hingga Surat Tugas ditandatangani oleh Deputi Bidang Persidangan • Membuat surat-surat dan daftar kehadiran dari rapat-rapat dengan <i>stakeholders</i> • Mendokumentasikan semua kegiatan dalam proyek perubahan dan tidak ada dokumentasi yang tercecer atau hilang • Menyiapkan tempat rapat dan fasilitasnya termasuk jamuan pada rapat-rapat dengan <i>stakeholders</i> • Melakukan koordinasi dengan Tim Substansi terkait Laporan Singkat sebagai pertanggungjawaban • Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait 	Memastikan kegiatan administrasi dan dokumentasi berjalan lancar

V. RENCANA TAHAPAN DAN CAPAIAN (MILESTONES)

Tahapan-tahapan utama dalam pencapaian tujuan proyek perubahan ini, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 13, terbagi kedalam tiga tahapan dan capaian sebagai berikut:

1. Jangka Pendek dimulai sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 (2 bulan) berupa pembangunan website <http://diparlin.dpr.go.id> dengan rincian rencana kegiatan dan relaisasi pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6
2. Jangka Menengah dimulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2020 (1 tahun) yaitu *monitoring* dan evaluasi website <http://diparlin.dpr.go.id> dengan rincian kegiatan dengan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 8
3. Jangka Panjang dimulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 2 Juni 2021 yaitu pengembangan website <http://diparlin.dpr.go.id> dengan rincian kegiatan dengan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 9



Gambar 13. Rencana Tahapan dan Capaian (*Milestones*) pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

Tahapan dan capaian untuk Jangka Pendek dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7 dengan rincian rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan (*time schedule*) dan hasil implementasinya.

Tabel 7. Rencana dan Pelaksanaan Jadwal Milestones Jangka Pendek : Pembangunan Website diparlin.dpr.go.id

NO	KEGIATAN	MARET	APRIL				MEI				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	Sebelum Tim Efektif dibentuk telah dilakukan rapat-rapat persiapan dan surat-menyurat kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yaitu: Surat tanggal 15 Februari 2019 Surat tanggal 22 Februari 2019 Surat tanggal 25 Februari 2019 Rakor pada tanggal 19 Februari 2019 Rakor pada tanggal 22 Februari 2019 Rakor pada tanggal 20 Maret 2019 Surat Tugas Nomor 05/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/3/2019 tanggal 27 Maret 2019										
1	Pembentukan Tim Efektif (27 Maret 2019)										X
	Pembentukan Tim Efektif terlaksana sesuai jadwal pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Surat Keputusan SEKJEN DPR RI Nomor 752/SEKJEN/2019										
2	Rapat Tim Efektif untuk <i>brainstorming</i> (28 – 29 Maret 2019)										X
	Rapat Tim Efektif untuk <i>brainstorming</i> terlaksana pada tanggal 27 Maret 2019										
3	Rapat Tim Efektif untuk pembangunan website (1-5 April 2019)										X
	Tidak dilaksanakan rapat-rapat formal namun terjalin komunikasi efektif melalui aplikasi whatsaapps atau email serta kunjungan ke masing-masing anggota Tim Efektif										
4	Rapat Tim Efektif untuk pengumpulan bahan/materi <i>content</i> website (27 Maret - 12 April 2019)										X

	Tidak dilaksanakan rapat-rapat formal namun terjalin komunikasi efektif melalui aplikasi whatsaapps atau email serta kunjungan ke masing-masing anggota Tim Efektif										
5	Pembangunan website (12 April 2019) Pembangunan website berhasil disepakati bentuk dan isi pada tanggal 15 April 2019				orange						
6	Konsultasi dengan Deputi Persidangan dan Mentor untuk arahan dan persetujuan (1-12 April 2019) Konsultasi dengan Mentor terkait perubahan judul proyek perubahan menjadi “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” pada tanggal 29 Maret 2019			grey	grey						X
	Konsultasi dengan Mentor terkait perubahan judul proyek menjadi “Telaah hasil Sidang/ Konferensi regional dalam pengembangan Website BKSAP DPRRI” pada tanggal 12 April 2019			green							
	Konsultasi dengan Deputi Bidang Persidangan terkait perubahan judul proyek menjadi “Telaah hasil Sidang/ Konferensi regional dalam pengembangan Website BKSAP DPRRI” pada tanggal 16 April 2019				green						
	Konsultasi dengan Mentor terkait penetapan judul proyek perubahan menjadi “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” pada tanggal 18 April 2019				green						
7	Konsultasi dengan Ketua BKSAP dan Wakil Ketua BKSAP untuk arahan dan persetujuan (1-12 April 2019) Pertemuan dengan Pimpinan BKSAP tidak terlaksana dikarenakan selalu berada di daerah pemilihan konstituen untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tanggal 17 April 2019 dan pengumuman hasil pemilihan umum pada tanggal 22 Mei 2019.		light green	light green							X

	Selain itu, juga karena penugasan delegasi DPR RI ke luar negeri										
8	Koordinasi dengan para <i>Stakeholder</i> guna mendapatkan dukungan (April 2019)										X
	Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk surat dukungan pada tanggal 28 Maret 2019										
	Konsultasi dengan Coach terkait penetapan judul proyek perubahan menjadi “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” pada tanggal 16 April 2019 dan Laporan Dwimingguan II pada tanggal 16 April 2019										
	Konsultasi dengan Coach terkait Laporan Dwimingguan III pada tanggal 6 Mei 2019										
	Konsultasi dengan Coach terkait Laporan Dwimingguan IV pada tanggal 23 Mei 2019										
9	Pengumpulan dokumen <i>evidence</i> (1 April - 3 Mei 2019)										X
	Pengumpulan dokumen <i>evidence</i> pada tanggal 24 April 2019, tanggal 7, 14, 25, 16, 21 Mei 2019										
10	Pembuatan dokumen <i>evidence</i> (6-9 Mei 2019)										X
	Pembuatan dokumen <i>evidence</i> terlaksana pada tanggal 25 Mei 2019										
11	Pembuatan buku panduan tutorial (6-9 Mei 2019)										X
	Pembuatan buku panduan tutorial terlaksana dan dicetak pada tanggal 24 Mei 2019										
12	Rapat Tim Efektif untuk finalisasi Laporan Proyek Perubahan (10 Mei 2019)										X
	Rapat Tim Efektif untuk finalisasi Laporan Proyek Perubahan terlaksana pada tanggal 16 Mei 2019										

13	Konsultasi dengan Deputi Persidangan dan Mentor untuk arahan dan persetujuan (13-15 Mei 2019)									X
	Telah dilaksanakan pada awal April 2019									
14	Uji coba website diparlin.dpr.go.id (16 Mei 2019)									X
	Uji coba website diparlin.dpr.go.id tidak terlaksana dikarenakan content website belum layak tayang dan diundur pelaksanaannya namun waktu tidak mencukupi									
15	Rapat Tim Efektif untuk evaluasi dan perbaikan (17 Mei)									X
	Rapat Tim Efektif untuk evaluasi dan perbaikan terlaksana pada tanggal 16 Mei 2019									
16	Penyusunan Laporan Proyek Perubahan dan penggandaan (19-22 Mei 2019)									X
	Penyusunan Laporan Proyek Perubahan dan penggandaan terlaksana pada tanggal 27 Mei 2019									
17	Peluncuran website diparlin.dpr.go.id (23 Mei 2019)									X
	Peluncuran website http://diparlin.dpr.go.id tidak terlaksana dikarenakan pada tanggal 22-23 Mei 2019 terjadi demonstrasi dan kantor diliburkan									

Tabel 8. Milestones Jangka Menengah : Monitoring dan Evaluasi Website diparlin.dpr.go.id

No	Jenis Kegiatan	Output/Evidence	Target Waktu
1	Pembentukan Tim Efektif	Surat Tugas	Triwulan I
2	Rapat dengan Tim Efektif untuk memonitoring pelaksanaan website dan partisipasi masyarakat serta menyusun <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> atau Pedoman yang dibakukan, mengevaluasi website http://diparlin.dpr. go.id, dan membuat usulan aplikasi baru pada	Laporan singkat rapat dan rekomendasi	Triwulan I Triwulan II Triwulan III

	<i>website</i> http://diparlin.dpr.go.id apabila diperlukan		
3	Konsultasi dengan Deputi Persidangan dan Kepala Biro KSAP serta Pimpinan BKSAP	Arahan	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
4	Menyusun hasil monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dan aplikasi	Rekomendasi	Triwulan III Triwulan IV
5	Uji Coba Usulan aplikasi baru untuk menjaring partisipasi masyarakat yang lebih banyak	Masukan publik	Triwulan III
6	Persetujuan perubahan/ penambahan aplikasi baru di <i>website</i> http://diparlin.dpr.go.id untuk penyempurnaan	Disposisi	Triwulan IV

Tabel 9. Milestones Jangka Panjang : Pengembangan Website diparlin.dpr.go.id

No	Jenis Kegiatan	Output/Evidence	Target Waktu
1	Pembentukan Tim Efektif	Surat Tugas	Triwulan I
2	Rapat-rapat Tim Efektif untuk menindaklanjuti usulan perubahan/ penambahan aplikasi baru di <i>website</i> http://diparlin.dpr.go.id	Laporan singkat rapat dan rekomendasi	Triwulan I Triwulan II Triwulan III
3	Menyusun metode pengukuran peran partisipasi masyarakat melalui <i>website</i> dalam penyusunan bahan diplomasi parlemen	Draft Usulan Metode pengukuran	Triwulan III
4	Konsultasi dengan Pimpinan BKSAP Konsultasi dengan Deputi Persidangan dan Kepala Biro KSAP	Arahan dan persetujuan	Triwulan II Triwulan III
5	Persetujuan untuk mengimplementasikan metode dan aplikasi baru	Disposisi	Triwulan III
6	Implementasi metode pengukuran peran partisipasi masyarakat melalui <i>website</i>	Buku Panduan	Triwulan IV

VI. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Proyek perubahan ini akan terlaksana dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor kunci keberhasilan, khususnya telah adanya beberapa fasilitas berikut ini:

1. Website www.dpr.go.id telah mengembangkan banyak fitur yang memfasilitasi masyarakat, termasuk aplikasi DPR Now! Atau aplikasi "DPR Dalam Genggaman" yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan, sehingga website www.dpr.go.id telah dikenal masyarakat luat. Hal ini membantu mempermudah sosialisasi laman <http://diparlin.dpr.go.id>
2. DPR RI dan BKSAP telah mengelola berbagai akun media sosial media resmi (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube) yang juga bisa menjadi sarana pendukung untuk sosialisasi dalam mengakses <http://diparlin.dpr.go.id>
3. DPR RI telah membangun stasiun Radio Parlemen yang bekerja sama dengan sekitar 200 stasiun radio di seluruh pelosok tanah air yang juga bisa menjadi sarana pendukung untuk sosialisasi dalam mengakses <http://diparlin.dpr.go.id>
4. DPR RI telah memiliki aplikasi "SMS Gateway" yang memungkinkan BKSAP bekerja sama dengan Bagian Data dan Informasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang akses <http://diparlin.dpr.go.id>
5. Bagian Data dan Informasi telah memiliki personil Tim Teknologi Informasi Komunikasi yang handal dan mampu mengembangkan website <http://diparlin.dpr.go.id> yang aman dari ancaman virus atau *hackers*.
6. Desk KSR didukung oleh Tim Substansi dan Tim Tenaga Ahli BKSAP yang mumpuni untuk membuat telaahan yang *prudence* atas kinerja BKSAP secara tepat waktu
7. BKSAP memiliki Tim Tenaga Ahli yang mumpuni untuk melakukan evaluasi dan monitoring serta membuat kajian untuk program Jangka Menengah dan Jangka Panjang
8. Organisasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sedang mengembangkan program kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) terhadap hasil keputusan AIPA sehingga dapat bekerja sama di bidang *capacity building*

VII. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Proyek perubahan ini berjalan sesuai dengan tahapan/milestones jangka pendek sebagai berikut:

1. Pembangunan website <http://diparlin.dpr.go.id>

Website <http://diparlin.dpr.go.id> merupakan salah satu fitur dari website <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> dengan tampilan Website <http://diparlin.dpr.go.id> sebagaimana dijelaskan pada Gambar 14, sedangkan *content* dan *feature* dijelaskan pada Tabel 10. Website ini khusus menampilkan isu-isu terkini dalam perspektif regional berdasarkan atas telaah hasil-hasil sidang/konferensi regional. Website ini dibuat berkesan *user friendly* yaitu semacam *blog* yang baik dan nyaman untuk para pembaca. Demikian juga sajian telaah dibuat dengan bahasa yang mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh masyarakat.



Gambar 14. Tampilan Layout Website <http://diparlin.dpr.go.id>

Tabel 10. Website Proyek Perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

 Website Proyek Perubahan http://diparlin.dpr.go.id	
Layout	Berlogo DPR RI dengan tulisan Diplomasi Parlemen Kawasan Regional dengan warna yang terang dan lebih ceria
Contents	<p>Isi website ini khusus menampilkan telaah hasil Sidang/ Konferensi regional yang disarikan dari Resolusi/Rekomendasi/Deklarasi/Chair's Summary, dll. dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan ditampilkan per isu</p> <p>Sebelumnya, informasi hasil Sidang/ Konferensi Regional yang dihadiri oleh BKSAP, hanya disampaikan melalui Surat dengan lampiran kepada AKD DPR/ Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional. Sehingga masyarakat kurang mengenal kinerja BKSAP dan tidak memahami fungsi diplomasi parlemen.</p> <p>Dengan Informasi website berupa telaah hasil Sidang/Konferensi regional seperti Resolusi, Rekomendasi, Joint Communique, Deklarasi, dll ini ditujukan untuk menginformasikan kepada publik tentang kinerja BKSAP.</p>
Features	<p>Merupakan salah satu <i>feature</i> dari Website BKSAP http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen</p> <p>Memiliki <i>feature</i> tersendiri yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beranda Memuat informasi tentang pengantar website, landasan hukum diplomasi parlemen Indonesia, organisasi parlemen regional, resolusi, arsip • Kontak Memuat informasi tentang alamat Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional dan akses publik untuk menyampaikan aspirasinya • Inisiatif DPR Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional dimana DPR RI merupakan inisiatornya misalnya Sidang <i>Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Asia Tenggara</u> Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional di kawasan Asia Tenggara dimana DPR RI menjadi anggotanya misalnya <i>ASEAN Inter-parliamentary Assembly (AIPA)</i> • <u>Asia Pasifik</u> Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional di kawasan Asia Pasifik dimana DPR RI menjadi anggotanya misalnya <i>Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)</i> • <u>Asia Eropa</u> Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional di kawasan Asia Eropa dimana DPR RI menjadi anggotanya misalnya <i>Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP)</i> • <u>Asia Afrika</u> Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional di kawasan Asia Afrika dimana DPR RI menjadi anggotanya misalnya <i>Asia Africa Conference</i> • <u>Asia</u> Memuat informasi tentang telaah hasil Sidang/konferensi Regional di kawasan Asia dimana DPR RI menjadi anggotanya misalnya <i>Asian Parliamentary Assmby (APA)</i> <p>Selain itu terdapat pilihan “Artikel Terbaru” yang menampilkan artikel yang baru saja diupload. Juga ada pilihan ‘Artikel Populer’ untuk menampilkan Artikel yang paling sering dibaca oleh publik.</p> <p>Tersedia pula layanan “keywords” yang memudahkan masyarakat untuk mencari isu-isu terkini yang sedang dibahas di kawasan</p>
Access	<p>Masyarakat diharapkan tertarik untuk mengenal lebih dekat BKSAP dan diplomasi parlemen dalam lingkup regional sehingga tergerak untuk menyampaikan aspirasinya (<i>feedback</i>) melalui <i>feature</i> “kontak”.</p> <p>Dibuka melalui <i>browser</i> internet dengan alamat <i>website</i> DPR www.dpr.go.id BKSAP lalu klik ke fitur “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP” lalu pilih fitur “Diplomasi Regional”</p> <p>Juga dapat dibuka melalui <i>browser</i> internet langsung dengan alamat laman baru http://diparlin.dpr.go.id</p> <p>Aplikasi DPR Now! dapat menjadi pilihan akses namun tidak bisa langsung ke alamat <i>website</i> http://diparlin.dpr.go.id, akses harus melalui alamat BKSAP terlebih dahulu, yaitu dengan klik “Alat Kelengkapan” lalu pilih fitur “BKSAP” lalu pilih fitur “Diplomasi Regional”</p>

Sebagaimana dijelaskan pada diatas, website <http://diparlin.dpr.go.id> dapat dibuka melalui website BKSAP <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> sebagaimana pada Gambar 15 atau dibuka secara langsung melalui browser internet ke alamat laman baru sebagaimana pada Gambar 16.

The screenshot shows the official website of the Indonesian人大代表会 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). The top navigation bar includes links for Menu, Pencarian, Webmail, Kontak, PPIQ, TVR Parlemen, Layanan, EN, and a search bar. The main header features the DPR logo and the text 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA'. A banner at the top right says 'TEMUKAN WAHLANDA' with a link to 'Rabu, 09 Februari 2011' and a 'CARA' button. Below the banner, there are tabs for BERITA, AGENDA, LEGISLASI, JUDI, DAFTAR ANGGOTA, ALAT KELENGKAPAN (highlighted in yellow), and TENTANG DPR. The central content area features a large image of a parliamentary session with the text 'Badan Kerja Sama Antar Parlemen' overlaid. On the left, a red arrow points from the text 'Tentang' to a sidebar titled 'DIPLOMATI PARLEMEN'. This sidebar contains a list of links: Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Tentang, Agenda Acara, Indonesia di Organisasi Internasional, Daftar Kunjungan Luar Negeri, Daftar Anggota, Laporan Kunjungan, Press Release, Laporan Singkat, Buletin Diplomasi DPR, Laporan Negosiasi, Galeri Foto, Sekretariat, Kontak, and Daftar Pidato. At the bottom right of the sidebar, there is a small image of a man in a suit and a 'Leadership Speeches' banner.

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi sumber tumbuhan diplomasi parlemen. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). BKSAP mempunyai fungsi untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang mengumpulkan parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR berkaitan masalah kerja sama antar parlemen. Kerja menghadirkan berbagai sidang baik di kawasan maupun di forum internasional. BKSAP menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Selain kiprah di luar negeri, BKSAP menerima kunjungan delegasi parlemen negara sahabat yang mengadakan tamu DPR dan mengadakan tuan rumah perwakilan sidang regional/internasional. BKSAP juga memberdayakan parctis kerja untuk mendeklanguji isu-isu yang menjadi perhatian BKSAP, terutama yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals dan penerjemahan kerja sama ekonomi regional. Sepanjang periode ini, BKSAP telah menggrasasi DPR RI untuk menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Asia Afrika, World Parliamentary Forum on Sustainable Development dan sidang Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership. Selain itu juga menginisiasi pembentukan struktur khusus yang membahas isu-isu perempuan dalam berbagai organisasi antar parlemen seperti: Meeting of Women Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Meeting of Women Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan Meeting of Women Asian Parliamentary Assembly (APA). Dalam hubungan bilateral, BKSAP juga menggal hubungan dengan parlemen negara lain dengan mendeklare Grup Kerja Sama Bilateral serta menjaga hubungan baik dengan berbagai negara melalui pertemuan dengan duta besar negara sahabat. Pada periode ini, BKSAP memfasilitasi peran diplomasi individu dalam kerangka bilateral. Diplomasi individu merupakan konsep diplomasi yang harus diimplementasikan oleh DPR RI guna memberikan ruang diplomasi melalui pendeklarasi personal (*one-on-one approach*). Pada praktiknya, diplomasi individu dapat mengembangkan *networking* maters yang muncul dalam hubungan Indonesia dengan negara sahabat. Dalam melanjutkan peran diplomasi parlemen ini, BKSAP selalu berupaya untuk berperan aktif dalam forum antar parlemen baik nasional maupun multilateral yang dilakukan secara menurut sinyal untuk dasar mendukung berhasil proses

Gambar 15 Akses masuk ke laman website <http://diparlin.dpr.go.id> melalui laman website BKSAP <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen>

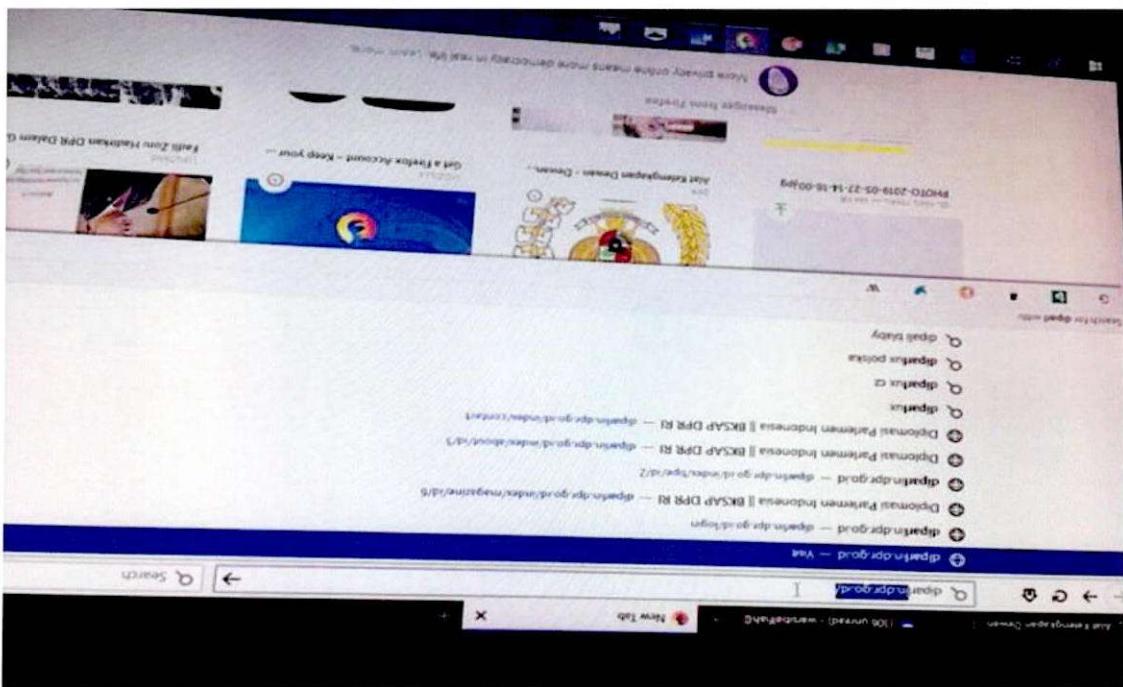
Apabila akses masuk melalui laman website BKSAP <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> maka pengguna perlu klik pilihan fitur "Diplomasi Regional" di sisi kanan bawah maka laman website <http://diparlin.dpr.go.id> akan muncul otomatis di layar.

- Aplikasi dirancang untuk tampilan layar kecil ukuran telepon genug gam biaya kuota
 - Ada kalanya upload sistem tidak berbayar namun penggunaannya memerlukan aplikasi memerlukan upload sistem aplikasi tersebut dahulu sebelum digunakan.
 - Sebagai berikut:
- Computer (PC) bukan menggunakannya aplikasi, dengan beberapa perimbangan sehingga website ini dirancang untuk dibuka melalui browser internet pada Personal Computer (PC) bukan menggunakannya aplikasi, dengan beberapa perimbangan sehingga website ini berisi informasi dalam kapasitas besar
- Website <http://diparin.dpr.go.id> ini berisi informasi dalam kapasitas besar**

<http://diparin.dpr.go.id> akan muncul di layar.

Internet dengan cara ketik diparin.dpr.go.id maka laman website

Gambar 16 Akses masuk ke laman browser internet melalui laman browser internet <http://diparin.dpr.go.id>



- <http://diparlin.dpr.go.id> dirancang untuk memberikan informasi sehingga pengguna akan lebih nyaman mencari informasi dengan menggunakan PC berlayar lebar agar lebih banyak mendapatkan informasi dan tidak berbayar. website idak disarankan dibuat dalam bentuk aplikasi karena memerlukan rancang ulang format kapasitas menjadi “ukuran layar telepon genggam” yang menyebabkan daya angkat tampilan sangat berat. Format tampilan layar lebar PC sangat berbeda dengan format layar telepon genggam. Selain memakan waktu lama, energi baterei boros, dan biaya pulsa membengkak, juga banyak informasi akan tidak terbaca sehingga merugikan pengguna sendiri.
- Website dpr.go.id dirancang “adaptable screen” yang tampilan layar dapat dengan mudah menyesuaikan ukuran layar gadget, artinya dapat dibuka di PC maupun di smartphone.

2. Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional

Website <http://diparlin.dpr.go.id> berisi informasi berupa telaah hasil Sidang/Konferensi Regional dimana masing-masing negara yang menjadi anggotanya diharapkan untuk mengimplementasikannya di tingkat nasional. Format Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Format Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional untuk Website Proyek Perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

	Format Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional untuk Website http://diparlin.dpr.go.id
JUDUL	Mencerminkan judul resolusi/ rekomendasi/ deklarasi/ joint communique/ Chair Statement/ MoU dan lain sebagainya yang merupakan keputusan organisasi parlemen dimana DPR RI menjadi anggota
	Bahasa Indonesia yang mudah dicerna oleh masyarakat umum dan menimbulkan minat untuk membaca

ISI	Keputusan yang tercantum dalam resolusi/ rekomendasi/ deklarasi/ <i>joint communique/ Chair Statement/ MoU</i> dan lain sebagainya Diberikan penekanan talaah pada hal-hal yang perlu diimplementasikan di tingkat nasional Telaah disajikan dengan alur bahasa yang mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh masyarakat
PENUTUP	Mencantumkan <i>link</i> ke sumber data
UPLOAD	Setelah Sidang/Konferensi regional selesai
OUTPUT KINERJA	Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional

Judul Telaah mencerminkan keputusan yang disepakati atas isu-isu yang dibahas dan ditetapkan dalam bentuk resolusi/ rekomendasi/ deklarasi/ *joint communique/ Chair Statement/ MoU* dan lain sebagainya. Isi Telaah adalah keputusan itu sendiri. Pada akhir telaah disebutkan *link* yang memungkinkan untuk mendukung data telaah. Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional berbeda dengan *Press Release* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Persandingan Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *Website* Proyek Perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” dengan *Press Release* untuk *website* BKSAP <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen>

	Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional untuk Website http://diparlin.dpr.go.id	Press Release untuk Website BKSAP
JUDUL	Mencerminkan judul resolusi/ rekomendasi/ deklarasi/ <i>joint communique/ Chair Statement/ MoU</i> dan lain sebagainya Bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum sebagai pengantar untuk memahami isi	Mencerminkan isu yang menjadi perhatian utama DPR dan sedang diperjuangkan dalam Sidang Mencerminkan peran DPR RI atau peran masing-masing Anggota Delegasi DPR RI dalam

	hasil Sidang/Konferensi Regional	Sidang/ konferensi Bahasa koran, bombastis
ISI	<p>Keputusan yang tercantum dalam resolusi/ rekomendasi/ deklarasi/ <i>joint communiqué/ Chair Statement/ MoU</i> dan lain sebagainya</p> <p>Diberikan penekanan telaah pada hal-hal yang perlu diimplementasikan di tingkat nasional</p> <p>Telaah disajikan dengan alur bahasa yang mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh masyarakat</p>	<p>Informasi tentang pentingnya isu bagi kepentingan nasional Indonesia</p> <p>Upaya-upaya Indonesia dalam memperjuangkan isu kepentingan nasional Indonesia dan keberhasilan yang dicapai</p> <p>Informasi kepada masyarakat luas tentang kinerja BKSAP selama mengikuti persidangan</p>
PENUTUP	Mencantumkan <i>link</i> ke sumber data	Berdiri sendiri, tidak terhubung ke <i>link</i> manapun
UPLOAD	Setelah Sidang/Konferensi selesai	<p>Umumnya, pada saat Sidang/Konferensi masih berlangsung. Namun adakalanya juga sebelum dan sesudah Sidang/Konferensi tergantung pada beban isu yang dibahas.</p> <p>Apabila setelah Sidang/Konferensi maka isi berita biasanya berupa hasil sidang secara sekilas saja.</p>
TINDAK LANJUT (<i>FOLLOW-UP</i>)	<p>Masyarakat diberikan akses untuk memberikan <i>feedback</i> atas telaah hasil Sidang/Konferensi regional.</p> <p>Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (<i>public awareness and engagement</i>) terhadap hasil Sidang/Konferensi regional.</p> <p><i>Feedback</i> dari masyarakat akan menjadi masukan dalam penyiapan bahan/materi rapat</p>	Tidak ada tindak lanjut dari BKSAP

	Desk Kerja Sama Regional dan menjadi sarana pengawasan atas tindak lanjut hasil sidang/konferensi regional di tingkat nasional	
OUTPUT KINERJA	Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	Bagian Pemberitaan

Proses pembuatan telaah hasil Sidang/Konferensi Regional merupakan tanggung jawab Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional atas persetujuan Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen. Dalam menetapkan telaah, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen perlu memperhatikan arahan/masukan Pimpinan BKSAP. Pedoman penyusunan Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *Website Proyek Perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”* adalah sebagai berikut”:

1. Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (Kabag Set. KSR) menugaskan Kepala Sub Bagian Rapat (Kasubbag Rapat) untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional guna disampaikan kepada AKD/Instansi terkait dan untuk *content* website
2. Kabag Set. KSR menugaskan Kasubbag Rapat untuk membuat telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website
3. Kasubbag Rapat menugaskan Analis Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) untuk membuat draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website
4. Analis KSLN menyerahkan kepada Kasubbag Rapat draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website untuk dikoreksi
5. Kasubbag Rapat menugaskan Analis KSLN untuk memperbaiki sesuai hasil koreksi draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website
6. Analis KSLN menyerahkan kepada Kasubbag Rapat perbaikan draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website untuk disetujui

7. Kasubbag Rapat menyerahkan kepada Kabag Set. KSR draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website untuk dikoreksi
8. Kabag Set. KSR menugaskan Kasubbag Rapat untuk memperbaiki sesuai hasil koreksi
9. Kasubbag Rapat menyerahkan kepada Kabag Set. KSR perbaikan draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website untuk disetujui
10. Kabag Set. KSR menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) untuk meminta masukan dari Tenaga Ahli (TA) BKSAP
11. Kasubbag TU menugaskan Pengadministrasi Umum (PU) untuk membuat Nota Dinas dari Kabag Set. KSR tembusan Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Karo KSAP) untuk meminta masukan TA BKSAP atas draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional untuk *content* website
12. PU memproses Nota Dinas dan menyampaikannya beserta lampiran kepada TA BKSAP
13. TA BKSAP memberikan masukan terhadap draft telaah atas hasil Sidang/Konferensi Regional
14. TA BKSAP menyampaikan draft hasil telaah kepada Kabag Set. KSR
15. Kabag Set. KSR menugaskan Kasubbag Rapat untuk mengoreksi draft telaah hasil-hasil Sidang/Konferensi yang telah mendapatkan masukan dari TA BKSAP
16. Kasubbag Rapat menyerahkan kepada Kabag Set KSR hasil koreksi
17. Kabag Set. KSR menyelia hasil koreksi Kasubbag Rapat guna disesuaikan dengan kepentingan nasional pada perspektif politik luar negeri Indonesia di kawasan regional
18. Kabag Set. KSR menugaskan Kasubbag TU untuk membuat Nota Dinas kepada Karo KSAP guna menyampaikan hasil menyelia atas draft telaah hasil Sidang/Konferensi Regional guna mendapatkan persetujuan
19. Kasubbag TU menugaskan PU untuk membuat Nota Dinas dan menyerahkannya beserta lampiran kepada Karo KSAP

20. Karo KSAP mengoreksi draft hasil telaah atas Hasil Sidang/Konferensi Regional dengan memperhatikan pertimbangan/masukan/arahan dari Pimpinan BKSAP
21. Karo KSAP menugaskan Kabag Set KSR untuk memperbaiki draft telaah sesuai koreksi
22. Kabagset KSR menyerahkan kepada Karo KSAP perbaikan hasil koreksi
23. Karo KSR membuat disposisi persetujuan agar hasil telaah di-upload di website
24. Kabagset KSR melalui Kasubbag TU menugaskan Analis Tata Usaha/Administrator Website untuk meng-upload hasil telaah di website <http://diparlin.dpr.go.id>

Standard Operational Procedure (SOP) atau Pedoman penyusunan Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional tersebut pada *milestone* Jangka Panjang perlu dibuat secara lebih rinci dan mendalam lagi serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

3. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Strategi Mengatasi Kendala/Masalah

Dalam melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini dihadapkan pada kendala/masalah yang dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan proyek perubahan ini. Kendala/masalah muncul dikarenakan proyek ini melibatkan berbagai *stakeholder* dan keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 telah memasuki periode akhir. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada tanggal 17 April 2019 turut menjadi kendala untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD maupun Anggota Dewan. Agar proyek perubahan ini dapat berhasil maka kendala/masalah yang ada sedapat mungkin harus diatasi. Beberapa potensi kendala/masalah yang mungkin ditemui dan strategi mengatasinya dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasi Kendala/Masalah pada proyek perubahan “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional”

NO	POTENSI KENDALA /MASALAH	STRATEGI MENGATASI KENDALA/ MASALAH
1	Masing-masing anggota Tim Efektif sibuk dengan tugas pokok sehari-hari	Melakukan komunikasi intensif melalui media yang ada untuk memberikan arahan dan memantau pelaksanaan tugas
2	Beberapa Anggota Tim Efektif ditugaskan mendampingi Delegasi DPR RI untuk kunjungan kerja ke luar negeri atau ada yang sedang cuti	Mencari tenaga pendukung substansi untuk menggantikan tugas
3	Mengingat tahun 2019 adalah tahun politik, Pimpinan DPRRI, Pimpinan dan Anggota BKSAP tidak fokus pada program <i>Open Parliament</i> dan sering berada di daerah pemilihan sehingga sulit untuk meminta waktu konsultasi	Memantau kesibukan , Pimpinan DPRRI, Pimpinan dan Anggota BKSAP dan mencari waktu yang tepat untuk konsultasi
4	Sekretaris Jenderal DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan bertugas menghadiri sidang parlemen di luar negeri atau pertemuan kedewanan di daerah	Memantau kesibukan Pimpinan SETJEN DPRRI dan mencari waktu yang tepat untuk konsultasi
5	Waktu pelaksanaan sangat singkat	Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya
6	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen selaku Mentor sedang melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Melakukan komunikasi intensif melalui media yang ada dan melakukan konsultasi dengan atasannya yaitu Deputi Bidang Persidangan untuk persetujuan
7	Tenaga Ahli BKSAP sangat sibuk dengan tugas rutin dan koordinator TA melakukan cuti sehingga Tim TA tidak bisa fokus kepada tugas proyek perubahan	Melakukan diskusi dan komunikasi dengan Tenaga Ahli yang bertugas untuk Desk Regional agar bisa mendukung program

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

1. Proyek perubahan berjudul “Pengembangan *Website* Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” telah berhasil dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan meskipun ada kendala/hambatan
2. Pada *quadran influence versus Interest* terjadi perubahan posisi beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang semula berada di posisi *Latents /Defenders/Apathetic* berpindah ke posisi *Promoters* setelah dilakukan pendekatan personal
3. Tim Efektif “Pengembangan *Website* Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” telah bekerja maksimal sehingga proyek perubahan ini dapat selesai tepat waktu
4. Sebagai hasil pengembangan dari *website* BKSAP <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> maka *website* <http://diparlin.dpr.go.id> tidak lepas dari induknya sehingga merupakan salah satu fitur dari *website* induk dan berfungsi untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan *website* BKSAP
5. Meskipun meskipun merupakan pengembangan, namun *website* <http://diparlin.dpr.go.id> adalah hasil pembangunan karena laman ini merupakan laman baru yang belum pernah ada sebelumnya dan berbeda fungsi dengan induknya tersebut yaitu khusus menyampaikan telaah hasil sidang/konferensi regional
6. *Website* <http://diparlin.dpr.go.id> memiliki beberapa kelebihan, yaitu layout lebih berwarna, *user friendly*, fokus pada telaah hasil sidang/konferensi regional yang perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional, bahasa yang mudah dipahami, menyediakan fitur “kontak” sebagai akses publik bagi masyarakat untuk menyampaikan *feedback*.

7. Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional yang dimuat di website <http://diparlin.dpr.go.id> berbeda dalam bentuk, isi dan konteks dengan *Press Release* yang dimuat di website www.dpr.go.id. Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional merupakan *output* kinerja Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional, sedangkan *Press Release* merupakan *output* kinerja Bagian Pemberitaan
8. BKSAP harus terus berbenah diri dengan inovasi baru agar dapat mendukung DPR RI secara optimal untuk mengimplementasikan *Open Parliament Indonesia* dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

2. Rekomendasi

1. Untuk menjamin kelanjutan dan kelancaran website <http://diparlin.dpr.go.id> ini perlu melibatkan lebih banyak tim substansi, khususnya Analis Parlemen dan Tenaga Ahli BKSAP agar isi website lebih optimal mutunya, lebih variatif menampilkan isu-isu terkini dan dapat di-update tepat waktu.
2. Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang/Konferensi Regional perlu segera diselesaikan pembuatannya paling lambat seminggu setelah ketibaan di tanah air sehingga website <http://diparlin.dpr.go.id> ini dapat di-update tepat waktu sesuai isu-isu terkini.
3. Perlu disusun *Standar Operational Procedure (SOP)* atau Pedoman penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional secara lebih rinci dan mendalam lagi serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI sehingga dapat menjamin kualitas/mutu hasil telaah.
4. Membuat *gimmick* atau *merchandise* untuk sosialisasi website <http://diparlin.dpr.go.id> yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada saat Delegasi BKSAP melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri

IX. LAMPIRAN EVIDENCE

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 752/SEKJEN/2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional
 - Surat Nomor 80a/AP.02/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal pembentukan Tim Efektif Website dari Pelaksana Harian Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional kepada Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI
 - Nota Dinas Nomor 83a/AP.02/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal permohonan persetujuan pembuatan website dan alamat email baru dari Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen kepada Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK DPR RI
 - Nota Dinas Nomor 85/AP.02/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal permohonan persetujuan pembuatan website dan alamat email baru dari Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI
 - Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 19 Februari 2019 beserta lampirannya
 - Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 22 Februari 2019 beserta lampirannya
 - Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019 beserta lampirannya
 - Surat Tugas Nomor 05/D/ST-PD.DN/BKSAP KSR/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang pembentukan Tim Efektif
 - Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 27 Maret 2019 beserta lampirannya

2. Laporan Singkat Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 15 April 2019 beserta lampirannya
3. Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka pembangunan website diplomasi parlemen Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
4. Surat Pernyataan Dukungan Proyek Perubahan dari:
 - Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc. (F-P.Gerindra/A-347), Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
 - Amelia Anggraini (F-P.Nasdem), Anggota BKSAP/Anggota Komisi IX
 - Ir. Indra Iskandar, M.Si (NIP.196611141997031001), Sekretaris Jenderal DPR RI
 - Dra. Damayanti, M.Si (NIP.196202111987032002), Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 - Yohannes O.I Tahapari, SH, M.Si. (NIP 196010021982031004), Kepala Biro Pemberitaan Parlemen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 - Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. (NIP. 196106231988031001), Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 - Sartomo, SS, M.Si. (NIP 196808111996031001), Kepala Bagian Kepala Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota selaku Ketua Pelaksana PPID Unit Kerja di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI
 - Chairi Patria, SIP, M.Si. (NIP 197111051998031002), Kepala Bagian Sekretariat Organisasi Kerja Sama Internasional, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 - Ibu Suprihartini, SIP, M.Si, (NIP 197101061990032001), Kepala Bagian Sekretariat Komisi I, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
 - Mario Pandu Dewono selaku Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* sejak 2017
 - Adhi Dwinanda Oktavian selaku *Field Producer CNN Indonesia*

- Sajida Fasya (NIM 016201600007), mahasiswi President University Jababeka Cikarang
- 5. Laporan Pengembangan Proyek Perubahan Dwi Mingguan (I), (II), (III), (IV)
- 6. Buku Panduan Aplikasi <http://diparlin.dpr.go.id>
- 7. Foto Rapat/Pertemuan dengan *stakeholders*
- 8. Video Evidence Pengembangan Website Diplomasi Parlemen di Kawasan Regional <http://diparlin.dpr.go.id>

X. PENUTUP

Demikian Laporan Proyek Perubahan ini berjudul “Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” telah selesai disusun sebagai persyaratan wajib kelulusan kelulusan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XII yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Penulis berharap Laporan Proyek Perubahan ini dapat menjadi bahan *lesson learnt* dan *best practices* serta inspirasi bagi para pembaca untuk melakukan inovasi yang lebih maju dan modern di bidang pengawasan politik luar negeri Indonesia, khususnya di kawasan regional.

Jakarta, Mei 2019

Penulis,

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP.197002191998032002

Lampiran 1. Formulir Persetujuan oleh Coach

FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA

Nama Peserta	: WARSITI ALFIAH, SIP, DESS
Unit Kerja	: BAGIAN SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI REGIONAL
Gagasan Perubahan	: PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>..... - Jelaskan - Perhatikan catatan mentor jln cr dst</p>	
Rekomendasi	
<p>..... - Lanjutkan dst</p>	
Jakarta,	
COACH,  (Dr Ahmad Taufik, S.Sos, M.Si)	

Lampiran 2. Formulir Persetujuan oleh Mentor

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

1. Nama Peserta	: WARSITI ALFIAH, SIP, DESS
2. Unit Kerja	: BAGIAN SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI REGIONAL
3. Gagasan Perubahan	: PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<i>Lainnya</i>	
.....dst	
Rekomendasi	
.....dst	
Jakarta, MENTOR,  (Endah T.D. Retnoastuti)	

Lampiran 1. Formulir Persetujuan oleh Coach

**FORMULIR PERSETUJUAN COACH
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

Nama Peserta	: WARSITI ALFIAH, SIP, DESS
Unit Kerja	: BAGIAN SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI REGIONAL
Gagasan Perubahan	: DISEMINASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA MELALUI WEBSITE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>..... <i>Silakan ditanyakan</i> dst</p>	
Rekomendasi	
<p>..... <i>Pershatkan catatan mentor!</i> dst</p>	
Jakarta,	
COACH,	
	
(Dr Ahmad Taufik, S.Sos, M.Si)	

Lampiran 2. Formulir Persetujuan oleh Mentor

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

1. Nama Peserta	: WARSITI ALFIAH, SIP, DESS
2. Unit Kerja	: BAGIAN SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI REGIONAL
3. Gagasan Perubahan	: DISEMINASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA MELALUI WEBSITE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p>mosatika masyarakat mendukung projek perubahan ini karena dapat memperkuat posisi Indonesia di berbagai lau... Internasional... dst</p>	
Rekomendasi	
<p>projek perubahan ini untuk disampaikan ke... pimpinan... G.K.S.A.C. untuk mendapat masukan lebih lanjut dst</p>	
Jakarta, 26/02/2019	
MENTOR,	
 (Endah T.D. Retnoastuti)	

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA COACH DENGAN PESERTA
DIKLATPIM TK. III ANGKATAN XII TAHUN 2019

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS Nama Coach : Dr. Ahmad Taufik, S.Sos. M.Si
Instansi : SETJEN & BK DPRRI
NIP. : 197002191998032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	18. 2. 2019	Perwujudan gagasan proper	- WA	- laung	JR
2		proper	- Tatap muka		
3	22. 2. 2019	Finalisasi			
4		gagasan proper	— a —		JR
5	26-2-2019	Pembahasan			
6		Rekomendasi kantor	— a —		JR
7	06.3 - 2019	Merancang RPP	- WA - Tatap Muka		
8					JR
9	20. 3. 2019	Finalisasi RPP	— a —		JR
10					JR
11	26. 3. 2019	Penyamaan persepsi	— a —		JR
12		Halil Seminar RPP			
13	16. 4. 2019	Diskusi Laporan	— " —		JR
14	Dst..	Dwiminguhan I			

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan Beasiswa Pendidikan,

Hermawan Setiaji, S.E., M.M.

**KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA COACH DENGAN PESERTA
DIKLATPIM TK. III ANGKATAN XII TAHUN 2019**

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS Nama Coach : Dr. Ahmad Taufik, S.Sos. M.Si
Instansi : SETJEN & BK DPRRI
NIP. : 197002191998032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	06-05-2019	Laporan	- WA	- lanjut	R
2		Dwimingguan III	- tatac muka		
3					
4	23-05-2019	Laporan			R
5		Dwimingguan IV	---	lanjut	R
6					
7	26-05-2019	Laporan Akhir	---	lanjut	R
8		Phoner			
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan Beasiswa Pendidikan,

Hermawan Setiaji, S.E., M.M.

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
DIKLATPIM TK. III ANGKATAN XII TAHUN 2019

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
Instansi : SETJEN & BK DPRRI
NIP. : 197002191998032002

Nama Mentor : Endah TD Retnoastuti

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	4/02/2019	usulan gagasan proyek perubahan	Tatap Muka	membuat website berisi penguantan parlemen	✓
2	17/02/2019	Judul gasproper dan rancangan website	Tatap Muka	menyekjui judul diplomasi parlemen Indonesia	✓
3	26/02/2019	permohonan persetujuan gagasan proyek perubahan	Tatap Muka	in Paragraf masukan BPK APP	✓
4	20/03/2019	permohonan persetujuan rancangan proyek perubahan	Tatap Muka	Focus ke scope wewenang	✓
5	29/03/2019	perubahan judul proper pengembangan website ke diplomasi parlemen Indonesia	Tatap Muka		✓
6	12/04/2019	Pembahasan judul proper telah hasil Sidang/konferensi regional dalam pengembangan website BPK APP DPR RI	Tatap Muka	disampaikan pada sidang	✓
7					
8	18/04/2019	Judul proper pengembangan website untuk peningkatan diplomasi parlemen Indonesia di kawasan regional	Tatap Muka	Setuju mengikuti	✓
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst ..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Mentor

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dan Beasiswa Pendidikan,

Hermawan Setiaji, S.E., M.M.



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 752 /SEKJEN/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN WEBSITE
DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra positif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai parlemen modern yang demokratis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada keterbukaan informasi publik di parlemen terkait pengawasan politik luar negeri di kawasan regional maka diperlukan diseminasi informasi tentang kinerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen terkait diplomasi parlemen Indonesia di kawasan regional dan memfasilitasi partisipasi masyarakat langsung melalui umpan balik (*feedback*) dalam jaringan website pada proses penyiapan bahan/materi rapat *Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen*;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 002.02.1.001012/2019 tanggal 5 Desember 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

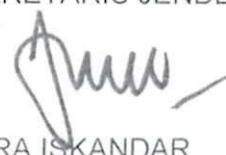
KEDUA : Tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan kegiatan pelaksanaan pengembangan website untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Membuat konsep pengembangan website (*desain, layout, content*) dan implementasinya;
- c. Memonitor pelaksanaan pengembangan website berjalan sesuai konsep dan jadwal serta memastikan keberhasilan/capaian;
- d. Mengevaluasi perkembangan dan capaian pengembangan website;
- e. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar mendukung sepenuhnya pengembangan website;
- f. Memastikan website dapat dioperasikan dengan lancar tanpa hambatan dan terjamin keamanan datanya;
- g. Memastikan publik mudah untuk mengakses website dan menggunakan *fitur* untuk menyampaikan *feedback* di website;
- h. Membuat telaah terhadap hasil-hasil Sidang/Konferensi;
- i. Memastikan *content* website selalu terkini (*up-to-date*) dan *di-update* tepat waktu;
- j. Memastikan kegiatan administrasi dan dokumentasi berjalan lancar;
- k. Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) sebagai lampiran Laporan;
- l. Membuat buku panduan *tutorial* (manual/video).

- KETIGA : Masa kerja Tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini tidak diberikan honorarium dan akan melaksanakan kegiatan rapat-rapat dengan anggaran yang tersedia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Mata Anggaran Kegiatan 002.01.001012.01.51.01.5783.001.001.053.A.521211 (Belanja Bahan).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
 2. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Teknologi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
 4. Kepala Biro/Pusat : Pengaduan Masyarakat, Perencanaan dan Keuangan, Kerja Sama Antar Parlemen, Data dan Teknologi Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
 5. Kepala Bagian/Bidang: Administrasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, Hukum, Arsip dan Museum, Sekretariat Kerja Sama Regional Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
 6. Anggota yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS JENDERAL,


INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001

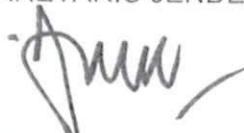
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
 JENDERAL DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 752/SEKJEN/2019
 TANGGAL : 27 Maret 2019

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN WEBSITE
 DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL
 SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN
1.	Dra Damayanti, MSi	196202111987032002 IV/d	Deputi Bidang Persidangan	Pengarah
2.	Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti, SS, M.Phil	196804021993022001 IV/c	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	Pembimbing
3.	Warsiti Alfiah, SIP, DESS	197002191998032002 IV/a	Kepala Bagian Set. Kerja Sama Regional	Ketua (<i>Project Leader</i>)
4.	Anne Widiana, SS, M.Si	197201011998032001 III/d	Kepala Sub Bagian Rapat Bagian Set KSR	Wakil Ketua Bidang Substansi
5.	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos, MH	198301232009121001 III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Set KSR	Wakil Ketua Bidang Administrasi
6.	Hilda Kurnia Ningsih, SH	198602132009122002 III/c	Staf Bagian Set KSR	Anggota Tim Substansi
7.	Gadis Anggiani Marha, S.Sos	197503181999032004 III/d	Staf Bagian Set KSR	Anggota Tim Substansi
8.	Ani Puji Lestari	197507171997032001 III/b	Staf Bagian Set KSR	Anggota Tim Administrasi
9.	Siti Masitoh	197302021997032004 III/b	Staf Bagian Set KSR	Anggota Tim Administrasi
10.	Ahmadi	197803172008101001 II/c	Staf Bagian Set KSR	Anggota Tim Administrasi
11.	Wiryawan Narendro Putro, SIP	198406082009121004 III/c	Staf Bagian Set KSR	Administrator <i>Website</i>
12.	Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc	198008132009121001 III/d	Pranata Komputer Muda Bagian Data dan	Wakil Ketua Bidang Desain <i>Website</i>

			Teknologi Informasi	
13.	Fariza Emra, ST, M.Sc	198001082009121001 IV/a	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Anggota Tim Desain Website
14.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI	198210032009121001 IV/a	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Anggota Tim Desain Website
15.	Dewi Amelia Tresna Wijayanti	SK SETJEN DPRRI No.1132/SEKJEN/TAAKD/2014	Tenaga Ahli BKSAP	Anggota Tim Substansi
16.	Tide Aji Pratama	SK SETJEN DPRRI No.6/SEKJEN/TAAKD/2018	Tenaga Ahli BKSAP	Anggota Tim Substansi
17.	Masyithoh Annisa Ramadhani	SK SETJEN DPRRI No.17/SEKJEN/TAAKD/2018	Tenaga Ahli BKSAP	Anggota Tim Substansi

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

NIP. 196611141997031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : OS /D/ ST-PD.DN / BKSAP-KSR /3/2019

- Menimbang :
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
 - Untuk memberikan dukungan administratif kepada pelaksanaan tugas maka diperlukan Surat Tugas

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

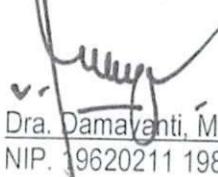
No.	Nama	Jabatan	TUGAS
1.	Dra Damayanti, MSi	Deputi Bidang Persidangan	Pengarah
2.	Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti, SS, M.Phil	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	Pembimbing (Mentor)
3.	Warsiti Alfiah, SIP, DESS	Kepala Bagian Set. Kerja Sama Regional	Project Leader
4.	Anne Widyan, SS, M.Si	Kepala Sub Bagian Rapat Bagian Set KSR	Ketua Tim Substansi
5.	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Set KSR	Ketua Tim Administrasi
6.	Hilda Kurnia Ningsih, SH	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
7.	Gadis Anggiani Marha, S.Sos	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
8.	Ani Puji Lestari	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
9.	Siti Masitoh	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
10.	Ahmadi	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
11.	Wiryawan Narendro Putro, SIP	Staf Bagian Set KSR	Administrator website
12.	Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc	Pranata Komputer Muda Bagian Data dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Desain Website
13.	Fariza Emra, ST, M.Sc	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
14.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
15.	Dewi Amelia Tresna Wijayanti	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
16.	Tide Aji Pratama	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
17.	Masyithoh Annisa Ramadhani	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi

Untuk: Menjadi anggota Tim Efektif guna pelaksanaan proyek perubahan berjudul "Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia Melalui Website Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

Target kinerja atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah optimalisasi penyiapan bahan/materi rapat dan pelayanan rapat desk kerja sama regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian surat tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta, 27 Maret 2019
Deputi Bidang Persidangan


Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PROYEK PERUBAHAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
Nomor Anggota : A-347
Fraksi : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Jabatan : Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Wakil Ketua DPR RI
Koordinator Bidang Politik Keamanan

Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc
A-347



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PROYEK PERUBAHAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amelia Anggraini
Nomor Anggota : A-17
Fraksi : Partai Nasional Demokrat (F-P.Nasdem)
Jabatan : Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
Instansi : Anggota Komisi IX
Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Mendukung kegiatan DPR dalam mensosialisasikan hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional
2. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
3. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Anggota
Badan Kerja Sama Antar Parlemen

Amelia Anggraini
A-17



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP : 196611141997031001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

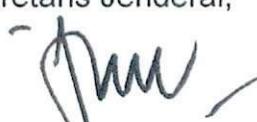
dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Sekretaris Jenderal,


Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 196611141997031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra.Damayanti, M.Si
NIP : 196202111987032002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Deputi Bidang Persidangan,

Dra. Damayanti, M.Si
NIP.196202111987032002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si
NIP : 196010021982031004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Pemberitaan Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk* organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,


Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si
NIP. 196010021982031004



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.
NIP : 196106231988031001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Kepala Pusat
Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Pusat Data dan Informasi,

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H
NIP. 196106231988031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sartomo, S.S., M.Si
NIP : 196808111996031001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat *desk organisasi regional* Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Bagian Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chairil Patria, S.I.P., M.Si.
NIP : 197111051998031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Bagian Sekretariat Kerja
Sama Organisasi Internasional

Chairil Patria, S.I.P., M.Si.
NIP. 197111051998031002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP : 197101061990032001
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi I
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan citra positif DPR RI sebagai parlemen modern dan demokratis
2. Peningkatan kinerja Desk Kerja Sama Regional BKSAP dalam mendukung *Open Parliament Indonesia* sehingga DPR RI dapat menjadi *role model* bagi negara-negara di kawasan
3. Optimalisasi kualitas/mutu penyediaan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen sesuai prinsip sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan keterbukaan informasi publik.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Bagian Sekretariat Komisi I

Suprihartini, S.I.P., M.Si
NIP. 197101061990032001

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mario Pandu Dewono
Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal (*Deputy Secretary General*)
Instansi : Sekretariat Tetap ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA)

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Mendukung Sekretariat Tetap ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dalam mensosialisasikan AIPA, *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dan kinerjanya kepada masyarakat Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) terhadap nilai strategis AIPA dan pentingnya mewujudkan masyarakat ASEAN
3. Diseminasi keputusan dan hasil-hasil Sidang AIPA yang perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Mei 2019

Wakil Sekretaris Jenderal AIPA



Mario Pandu Dewono

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhi Dwinanda Oktavian
Jabatan : *Field Producer*
Instansi : CNN Indonesia

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) terhadap kinerja BKSAP
2. Mempermudah publik untuk mengakses hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional yang dihadiri oleh DPR RI dan perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019



Adhi Dwinanda Oktavian

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sajida Fasya
Jabatan : Mahasiswi
NIM : 016201600007
Instansi : Jurusan Hubungan Internasional
President University Jababeka Cikarang

dengan ini menyatakan mendukung dalam penyusunan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh :

Nama : Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP : 197002191998032002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bagian
Unit Kerja : Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI

dengan judul "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional" karena proyek perubahan dimaksud bermanfaat untuk:

1. Mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan sumber data terkait hasil-hasil Sidang/Konferensi Regional yang perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional
2. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik (*public awareness and engagement*) terhadap kinerja BKSAP

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019



Sajida Fasya



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : PW/02343 /BKSAP/DPR RI/II/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Resolusi Sidang Umum ke-39 AIPA

6 Februari 2019

YTH.
PIMPINAN KOMISI I DPR-RI
JAKARTA

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPR-RI telah mengirimkan Delegasi untuk menghadiri Sidang Umum ke-39 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada tanggal 3 - 7 September 2018 di Singapura. Sidang tersebut telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berupa resolusi-resolusi, dan diharapkan dapat diimplementasikan oleh masing-masing parlemen negara AIPA.

Sehubungan dengan itu, terlampir kami sampaikan butir-butir resolusi hasil sidang dimaksud yang perlu mendapat perhatian terkait dengan bidang tugas Komisi I, yaitu:

1. *Resolution on Strengthening Cooperation to Promote Cross-Border Data Flows in ASEAN;*
2. *Resolution on Promoting Innovation and e-Commerce in ASEAN;*
3. *Resolution on Deepening Regional Economic Integration in ASEAN;*
4. *Resolution on Good Regulatory Practices in the ASEAN Economic Integration;*
5. *Resolution on Regional Effort to Address the Impact of Global Trade Tension Between Economic Powerhouses;*
6. *Resolution on Promoting Digital Literacy and Combating Fake News;*
7. *Resolution on Support for Persons with Disabilities (PWDs);*
8. *Resolution on Environmental Sustainability and Sustainable Urban Ecosystems.*

Kami mengharapkan kiranya resolusi tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Komisi dalam menghadapi rapat-rapat dengan instansi terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
KETUA,

DR. HJ. NURHAYATI ALI ASSEGAE, M.SI



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 802 /AP.02/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Tim Efektif Website

15 Februari 2019

YTH.
KEPALA BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SETJEN DAN BK DPRRI
JAKARTA

Dengan hormat diberitahukan bahwa Biro Kerja Sama Antar Parlemen SETJEN dan BK DPRRI merencanakan akan membangun sebuah website dalam rangka sosialisasi kinerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen di bidang diplomasi parlemen. Guna kelancaran kegiatan tersebut, Bagian Set KSR akan membentuk Tim Efektif yang melibatkan beberapa pegawai lintas Unit, termasuk 3 (tiga) orang Pranata Komputer dari BDTI yaitu:

1. Sdr. Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.
2. Sdr. Fariza Emra, S.T., M.Sc.
3. Sdr. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.

Sehubungan dengan hal itu, mohon perkenan Saudara kiranya dapat mengijinkan 3 (tiga) orang Pranata Komputer dimaksud untuk ditugaskan sebagai anggota dalam Tim Efektif dimaksud.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Pelaksana Harian Kepala Bagian Set. KSR

Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos.
NIP: 197705121999031003

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
SETJEN DAN BK DPRRI



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOMOR: 83 a /AP.02/2019

Yth. : DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
Dari : KEPALA BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembuatan Website dan Alamat Email Baru
Tanggal : 22 Februari 2019

Dengan hormat diberitahukan bahwa Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional sedang mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan Tingkat III dan membuat gagasan proyek perubahan berjudul "Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia Melalui Website Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" (deskripsi terlampir) yang mempersyaratkan pembuatan **website diparlin.dpr.go.id**. yang menginduk pada website dpr.go.id dengan laman baru dari tombol alat kelengkapan BKSAP. Pada laman diparlin tersebut akan dilengkapi dengan 'pushed e-mail' diparlin@dpr.go.id melalui fitur KONTAK. Website tersebut akan dipergunakan dalam jangka panjang oleh Biro KSAP untuk kegiatan diseminasi capaian kinerja BKSAP dan penguatan diplomasi parlemen Indonesia.

Pembuatan website tersebut telah dikomunikasikan kepada Ibu pada tanggal 19 Februari 2019 lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Ibu kiranya menyetujui pemberian fasilitasi pembuatan website dan alamat email baru tersebut (termasuk tenaga pendukung dari BDTI) agar kegiatan berjalan lancar.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

Endah TD Retnoastuti
NIP. 196804021993022001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN (GPP)

A. Identitas Proyek

DISEMINASI DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA MELALUI WEBSITE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Proyek ini untuk mendukung implementasi sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan inisiatif DPR RI mewujudkan *Open Parliament Indonesia (OPI)* yang dideklarasikan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang bertujuan untuk mendorong DPR RI menjadi parlemen yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, inklusif dan modern. Keterlibatan masyarakat/publik melalui website dalam proses diplomasi parlemen diharapkan dapat mencerminkan terlaksananya nilai-nilai demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” dan terwujudnya cita-cita “diplomasi untuk kepentingan rakyat”.

B. Latar Belakang (*Burning Platform*)

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan pencanangan Keterbukaan Parlemen (*Open Parliament*) yang diharapkan membuat DPR RI menjadi dekat dengan masyarakat dan semakin memperkuat peran DPR RI dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. *National Action Plan (NAP)* atau Rencana Aksi Nasional *Open Parliament Indonesia* disusun terpisah dari Pemerintah dan terdiri dari lima agenda yaitu: *pertama*, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; *kedua*, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; *ketiga*, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI; *keempat*, penyusunan peta jalan atau roadmap *Open Parliament Indonesia*; dan *kelima*, penyusunan kelembagaan *Open Parliament Indonesia*.

Keterbukaan Parlemen mengisyaratkan kondisi bahwa DPR RI telah siap menjadi “lembaga representasi rakyat (*people's representation*) yang makin modern dan terpercaya” dan telah siap untuk mengakomodir partisipasi masyarakat (*citizenship participation*) atau partisipasi publik (*public participation*) dalam politik, yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Di masa depan, DPR RI dituntut menjadi parlemen modern yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, mampu menyerap aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi representasi rakyat (*public representative*) dengan lebih optimal, meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*), aspiratif partisipatif, akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas.

Di negara-negara demokratis, partisipasi politik masyarakat merupakan aktualisasi dari proses demokratisasi untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat,

untuk rakyat, oleh rakyat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik di negaranya dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik tersebut.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai alat kelengkapan DPR RI (AKD) yang bersifat tetap dan pelaksana diplomasi parlemen, tidak luput dari tuntutan Keterbukaan Parlemen dan kontribusi untuk mendorong DPR RI menjadi parlemen yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, inklusif, modern dan mengimplementasikan sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Masyarakat Indonesia pada umumnya belum mengenal dekat BKSAP dan fungsi diplomasi parlemen. Gerakan mensosialisasikan BKSAP dan diplomasi parlemen Indonesia serta diseminasi capaian-capaian kinerja BKSAP perlu digalakkan. Website menjadi pilihan, karena dewasa ini, website merupakan sarana komunikasi yang paling mudah dan efektif untuk menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air dan masyarakat dapat memberikan respon (*feedback*) pada saat itu juga (*real time*).

Gagasan proyek perubahan pembangunan website diparlin.dpr.go.id ditujukan untuk **optimalisasi penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen**. Website diparlin.dpr.go.id dipandang sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi diplomasi parlemen Indonesia dan diseminasi informasi atas kinerja BKSAP. Website ini akan dilengkapi dengan “pushed e-mail” dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya (*feedback*) di bidang politik luar negeri. Aspirasi publik (*feedback*) tersebut kemudian akan ditelaah untuk menjadi “input partisipasi publik” bagi BKSAP pada saat penyiapan bahan/materi rapat berikutnya. Bahan/materi rapat BKSAP berupa antara lain draft resolusi, *joint-communique*, deklarasi, rekomendasi, *points of intervention*, speech/remarks, *memorandum of understanding (MoU)* dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang, hasil dari partisipasi masyarakat (*feedback*) tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepopuleran BKSAP dan diplomasi parlemen Indonesia maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik luar negeri.

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, BKSAP didukung oleh Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional yang mempunyai tugas penyelenggaraan rapat dan tata usaha desk organisasi parlemen regional dan kerja sama organisasi multilateral regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Salah satu fungsi dari Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional adalah pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional merupakan bagian dari Biro Kerja Sama Antar Parlemen dibawah Deputi Bidang Persidangan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu lembaga pendukung kinerja DPR RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga.

C. Tujuan Perubahan

- Partisipasi masyarakat secara langsung akan meningkatkan kualitas penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat desk organisasi regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen
- Peningkatan keterlibatan partisipasi publik dalam proses diplomasi parlemen Indonesia
- Meningkatnya citra positif (*image*) DPRRI sebagai lembaga penguatan demokrasi
- Meningkatnya kepercayaan publik (*public trust*) kepada DPRRI sebagai parlemen modern

D. Manfaat Perubahan

- Memperkokoh wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia
- Masyarakat lebih mengenal BKSAP dan memahami peran strategis DPRRI dalam diplomasi parlemen Indonesia
- Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasinya secara langsung untuk diperjuangkan oleh BKSAP di forum internasional
- Masyarakat mendapatkan *update* informasi tentang capaian kinerja BKSAP dan hasil-hasil diplomasi parlemen
- DPRRI melalui BKSAP dapat lebih dekat dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan nilai-nilai demokrasi dan implementasi keputusan internasional yang mendukung kepentingan nasional Indonesia
- Dapat menjadi tolok ukur sinkronisasi diplomasi parlemen Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri Pemerintah

E. Ruang Lingkup

Fokus proyek perubahan ini adalah mengembangkan website dpr.go.id dengan membangun sebuah laman baru diparlin.dpr.go.id. yang berisi informasi tentang diplomasi parlemen Indonesia dalam bentuk *summary* capaian-capaian kinerja BKSAP dan menyediakan akses kepada masyarakat luas untuk interaktif atau menyampaikan secara langsung aspirasinya (*feedback*) melalui "pushed-email".

Website diparlin.dpr.go.id. dapat diakses secara langsung melalui alamat web tersebut atau melalui website dpr.go.id dengan menekan pilihan "diplomasi parlemen Indonesia" maka akan secara otomatis terhubung ke laman diparlin.dpr.go.id.

Lokus website diparlin.dpr.go.id berada di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 85 /AP.02/2019

Yth. : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
Dari : KEPALA BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
Perihal : Permohonan Bantuan Pembuatan Website dan Alamat Email Baru
Tanggal : 25 Februari 2019

Dengan hormat diberitahukan bahwa Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional sedang mengikuti Pendidikan Latihan Kepemimpinan Tingkat III dan membuat gagasan proyek perubahan berjudul "Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia Melalui Website Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" (deskripsi terlampir) yang mempersyaratkan pembuatan **website diparlin.dpr.go.id**. yang menginduk pada website dpr.go.id dengan laman baru dari tombol alat kelengkapan BKSAP. Pada laman diparlin tersebut akan dilengkapi dengan 'pushed e-mail' diparlin@dpr.go.id melalui fitur KONTAK. Website tersebut akan dipergunakan dalam jangka panjang oleh Biro KSAP untuk kegiatan diseminasi capaian kinerja BKSAP dan penguatan diplomasi parlemen Indonesia.

Pembuatan website tersebut telah dikomunikasikan dengan Deputi Bidang Persidangan pada tanggal 19 Februari 2019 dan telah mendapatkan persetujuan beliau.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara kiranya dapat memfasilitasi pembuatan website dan alamat email baru tersebut (termasuk tenaga pendukung dari BDTI) agar kegiatan berjalan lancar.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

Endah TD Retnoastuti
NIP. 196804021993022001

Tembusan:
Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA**

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 19 Februari 2019
Waktu	:	12.00 WIB – selesai (didahului makan siang)
Tempat	:	Ruang Rapat BKSAP Gedung Nusantara III Lantai 4
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Efektif2. Perencanaan Laman Website3. Lain-Lain
Ketua Rapat	:	Drs. Robert Juheng Purba (Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen)
Sekretaris Rapat	:	Warsiti Alfiah, SIP, DESS (Kepala Bagian Set.Kerja Sama Organisasi Regional)
Hadir	:	<u>BDTI</u> <ol style="list-style-type: none">1. Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc2. Fahriza Emra, ST, M.Sc3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI

TENAGA AHLI BKSAP

1. Amelia Tresna Dewi Wijayanti

BAG. SET. KSR

1. Warsiti Alfiah, SIP, DESS
2. Anne Widyanawati, SS, M.Si
3. Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos
4. dll

I. PEMBUKAAN

Sehubungan Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan maka Ketua Rapat Pertemuan didelegasikan kepada Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS .

Sebelum rapat dimulai, para peserta rapat dipersilahkan menikmati hidangan makan siang yang telah disiapkan oleh Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional.

Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS selaku Ketua Rapat.

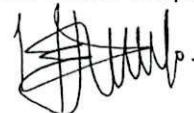
II. KESIMPULAN RAPAT

1. Rapat membahas dua isu utama yaitu Pembentukan Tim Efektif dan Perencanaan Laman Website dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membuat sebuah laman baru website tentang diplomasi parlemen Indonesia yang menginduk ke website dpr.go.id dengan menambahkan sebuah link berjudul Diplomasi Parlemen Indonesia. Ketika klik link baru tersebut langsung tampilan website baru.
 - b. Website akan berisi topik besar Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, Sosial dan Budaya, Women, Kawasan dan KONTAK dengan tambahan 3 (tiga) item Tentang DIPARLIN, BKSAP, Dasar Hukum
 - c. Bentuk website disesuaikan dengan template yang ada dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Perlu dibuatkan panduan manual untuk administrator dan tutorial untuk publik
 - d. Tim Efektif website akan terdiri dari staf lintas Unit dan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I seperti Deputi Bidang Persidangan
 - e. Pembiayaan kegiatan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2. Rapat menyepakati untuk melanjutkan rapat pada hari Jum'at, 22 Februari 2019 setelah Jum'atan/makan siang guna membahas *draft layout* laman website

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB oleh Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS . Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, selaku Ketua Rapat.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 80 b /AP.02/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

16 Februari 2019

YTH.

1. Sdr. ERDINAL HENDRADJAJA, ST., M.Sc.
2. Sdr. FARIZA EMRA, S.T., M.Sc.
3. Sdr. AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom., M.T.I.

JAKARTA

Dengan hormat diberitahukan bahwa Biro Kerja Sama Antar Parlemen SETJEN dan BK DPRRI merencanakan akan membangun sebuah website dalam rangka sosialisasi kinerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen di bidang diplomasi parlemen.

Terkait dengan hal itu, Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional akan membentuk Tim Efektif dan akan mengadakan rapat persiapan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 19 Februari 2019
Waktu	:	12.00 WIB s.d. selesai (didahului makan siang)
Acara	:	1. Pembentukan Tim Efektif 2. Perencanaan laman website 3. Lain-lain
Tempat	:	Ruang Rapat BKSAP Gedung Nusantara III Lantai 4

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat tersebut guna memberikan masukan-masukannya.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Pelaksana Harian Kepala Bagian Set. KSR

Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos.
NIP: 197705121999031003

Tembusan:

1. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi;
3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
SETJEN DAN BK DPRRI



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 80 b /AP.02/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

16 Februari 2019

YTH.
**TENAGA AHLI BKSAP
JAKARTA**

Dengan hormat diberitahukan bahwa Biro Kerja Sama Antar Parlemen SETJEN dan BK DPRRI merencanakan akan membangun sebuah website dalam rangka sosialisasi kinerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen di bidang diplomasi parlemen.

Terkait dengan hal itu, Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional akan membentuk Tim Efektif dan akan mengadakan rapat persiapan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019
Waktu : 12.00 WIB s.d. selesai (didahului makan siang)
Acara :
1. Pembentukan Tim Efektif
2. Perencanaan laman website
3. Lain-lain
Tempat : Ruang Rapat BKSAP
Gedung Nusantara III Lantai 4

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat tersebut guna memberikan masukan-masukannya.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Pelaksana Harian Kepala Bagian Set. KSR

Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos.
NIP: 197705121999031003

Tembusan:

1. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi;
 3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
- SETJEN DAN BK DPRRI**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. Set. KSR, Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

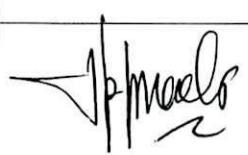
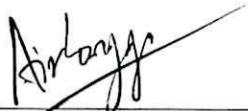
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019

Pukul : 12.00 wib - selesai (didahului makan siang)

Tempat : Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Lantai 4

Acara : 1. Pembentukan Tim Efektif;
2. Perencanaan Laman Website;
3. Lain-lain.

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. DAMAYANTI, M.Si.	Pengarah / Deputi Bidang Persidangan	
2.	ENDAH T.D. RETNOASTUTI, S.S.,M.Phil.	Pembimbing (Mentor) / Kepala Biro KSAP	
3.	Drs. ROBERT JUHENG PURBA	Plh. Kepala Biro KSAP	
4.	WARSITI ALFIAH, S.I.P.,DESS	Project Leader / Kepala Bagian Set. KSR.	
5.	Rd. ANNE WIDYANA, S.S., M.Si.	Kasubbag. Rapat Set. KSR.	
6.	KEYA MUHAMAD NURCAHYO, S.Sos.	Kasubbag. TU Set. KSR.	
7.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Analis Kerjasama Luar Negeri	

NO.	NAMA PEGAWAI	TUGAS / JABATAN	TANDA TANGAN
8.	GADIS ANGGIANI MARHA, S.Sos.	Analis Data dan Informasi Bag. Set KSR	
9.	ANIE PUJI LESTARI	Pengolah Data Bag. Set KSR	
10.	SITI MASITOH	Pengelola Persidangan Bag. Set KSR	
11.	AHMADI	Pengadministrasi Umum Bag. Set KSR	
12.	WIRYAWAN NARENDRO PUTRO, S.Sos.	Analis Tata Usaha Bagian Set. KSR.	
13.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	Tenaga Ahli BKSAP	
14.	TIDE AJI PRATAMA	Tenaga Ahli BKSAP	
15.	MASYITOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	Tenaga Ahli BKSAP	
16.	FARIZA EMRA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
17.	AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom.,M.T.I	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
18.	ERDINAL HENDRADJAJA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda Bagian BDTI	
19.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	TENAGA AHLI BKSAP	
20.	TIDE AJI PRATAMA	TENAGA AHLI BKSAP	
21.	MASYITOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	TENAGA AHLI BKSAP	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Jum'at, 22 Februari 2019
Waktu	:	13.00 WIB – selesai (didahului makan siang)
Tempat	:	Ruang Rapat BKSAP Gedung Nusantara III Lantai 4
Acara	:	1. Pengembangan Laman Website 2. Lain-Lain
Ketua Rapat	:	Drs. Robert Juheng Purba (Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen)
Sekretaris Rapat	:	Warsiti Alfiah, SIP, DESS (Kepala Bagian Set.Kerja Sama Organisasi Regional)
Hadir	:	<u>BDTI</u> 1. Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc 2. Fahriza Emra, ST, M.Sc 3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI 4. Surya

TENAGA AHLI BKSAP

1. Amelia Tresna Dewi Wijayanti

BAG. SET. KSR

1. Warsiti Alfiah, SIP, DESS
2. Anne Widyanawati, SS, M.Si
3. Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos
4. dll

I. PEMBUKAAN

Sehubungan Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan maka Ketua Rapat Pertemuan ini didelegasikan kepada Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS .

Sebelum rapat dimulai, para peserta rapat dipersilahkan menikmati hidangan makan siang yang telah disiapkan oleh Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional.

Rapat dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS selaku Ketua Rapat.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Rapat membahas model laman website diparlin.dpr.go.id dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laman website diparlin.dpr.go.id. menggunakan model/template *MagBlog a Magazine Category Flat*
 - b. Website akan berisi topik besar Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, Sosial dan Budaya, Women, Kawasan, HAM, SDGs dan KONTAK dengan tambahan 3 (tiga) item Tentang DIPARLIN, BKSAP, Dasar Hukum
 - c. Agar website terlihat maka perlu segera disampaikan isi/bahan/article dari masing-masing laman tersebut
2. Rapat menyepakati untuk melanjutkan rapat pada minggu pertama bulan Maret 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB oleh Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS . Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, selaku Ketua Rapat.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 80C /AP.02/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

20 Februari 2019

YTH.

1. Sdr. ERDINAL HENDRADJAJA, ST., M.Sc.
2. Sdr. FARIZA EMRA, S.T., M.Sc.
3. Sdr. AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom., M.T.I.

JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 19 Februari 2019, dengan hormat diberitahukan bahwa Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional telah membentuk Tim Efektif Website dan akan melanjutkan rapat persiapan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Februari 2019
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai (didahului makan siang)
Acara :

1. Pengembangan laman website
2. Lain-lain

Tempat : Ruang Rapat BKSAP
Gedung Nusantara III Lantai 6

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat tersebut guna memberikan masukan-masukannya.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Kepala Bagian Set. KSR

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002

Tembusan:

1. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi;
 3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
- SETJEN DAN BK DPRRI



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 80C /AP.02/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

20 Februari 2019

YTH.
TENAGA AHLI BKSAP
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 19 Februari 2019, dengan hormat diberitahukan bahwa Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional telah membentuk Tim Efektif Website dan akan melanjutkan rapat persiapan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Februari 2019
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai (didahului makan siang)
Acara : 1. Pengembangan laman website
 2. Lain-lain
Tempat : Ruang Rapat BKSAP
 Gedung Nusantara III Lantai 4

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat tersebut guna memberikan masukan-masukannya.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Kepala Bagian Set. KSR

Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002

Tembusan:

1. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
 2. Kepala Pusat Data dan Informasi;
 3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
- SETJEN DAN BK DPRRI

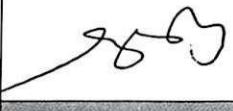


**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. Set. KSR, Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Februari 2019
Pukul : 13.00 wib – selesai (didahului makan siang)
Tempat : Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Lantai 4
Acara : 1. Pengembangan Laman Website;
 2. Lain-lain.

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. DAMAYANTI, M.Si.	Pengarah / Deputi Bidang Persidangan	
2.	ENDAH T.D. RETNOASTUTI, S.S.,M.Phil.	Kepala Biro KSAP	
3.	Drs. ROBERT JUHENG PURBA	Plh. Kepala Biro KSAP	
4.	WARSITI ALFIAH, S.I.P.,DESS	Projecck Leader / Kepala Bagian Set. KSR.	
5.	Rd. ANNE WIDYANA, S.S., M.Si.	Kasubbag. Rapat Set. KSR.	
6.	KEYA MUHAMAD NURCAHYO, S.Sos.	Kasubbag. TU Set. KSR.	
7.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	

NO.	NAMA PEGAWAI	TUGAS / JABATAN	TANDA TANGAN
8.	GADIS ANGGIANI MARHA, S.Sos.	Analis Data dan Informasi Bag. Set KSR	
9.	ANIE PUJI LESTARI	Pengolah Data Bag. Set KSR	
10.	SITI MASTOH	Pengelola Persidanganan Bag. Set KSR	
11.	AHMADI	Pengadilanstrasi Umum Bag. Set KSR	
12.	WIRYAWAN NARENDRO PUTRO, S.Sos.	Analis Tata Usaha Bagian Set. KSR.	
13.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	Tenaga Ahli BKSAp	
14.	TIDJE AJI PRATAMA	Tenaga Ahli BKSAp	
15.	MASYITO ANNISA RAMADHANI, M.A.	Tenaga Ahli BKSAp	
16.	FARIZA EMRA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
17.	AIRLANGGA EKA WARDHANA,	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
18.	ERDINAL HENDRADJAJA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda Bagian BDTI	
19.	SURYA	PTT BAG. BDTI	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	TENAGA AHLI BKSAP	
21.	TIDE AJI PRATAMA	TENAGA AHLI BKSAP	
22.	MASYITOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	TENAGA AHLI BKSAP	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 20 Maret 2019
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III Lantai 6
Acara	:	1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan 2. Lain-Lain
Ketua Rapat	:	Sartomo, SS, M.Si (Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen)
Sekretaris Rapat	:	Warsiti Alfiah, SIP, DESS (Kepala Bagian Set.Kerja Sama Organisasi Regional)
Hadir	:	<u>BDTI</u> 1. Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc 2. Fahriza Emra, ST, M.Sc 3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI 4. Agus Yamin

TENAGA AHLI BKSAP

1. Amelia Tresna Dewi Wijayanti
2. Tide Aji Pratama
3. Masyitoh Annisa Ramadhani, MA

BAG. SET. KSR

1. Warsiti Alfiah, SIP, DESS
2. Hilda Kurnia Ningsih, SH
3. Wirawan Narendro Putro, S.Sos
4. dll

=====

I. PEMBUKAAN

Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Bapak Sartomo, SS,M.Si, Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen, selaku Ketua Rapat.

Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat yaitu persiapan pembentukan Tim Efektif untuk pelaksanaan proyek perubahan di Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Atas permintaan Ketua Rapat, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS . Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, selaku *Project Leader* menjelaskan proyek perubahan yang akan dikerjakan sebagai berikut:
 - a. Proyek perubahan berjudul “Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia Melalui Website Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat” akan diuji dalam Seminar tanggal 25 Maret 2019
 - b. Proyek perubahan ini menitik beratkan pada Deklarasi *Open Parliament* yang dicanangkan DPRRI pada tanggal 29 Agustus 2019 yaitu agenda DPR RI menuju Parlemen Modern dan Demokratis yang ditandai oleh tiga indikator utama yaitu transparansi, representasi dan pemanfaatan teknologi. Deklarasi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyampaikan informasi kinerja kepada masyarakat
 - c. Proyek perubahan ini berupa pembangunan website www.diparlin.dpr.go.id sebagai pengembangan dari website <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> untuk menjawab persoalan yang dihadapi BKSAP yaitu masyarakat Indonesia pada umumnya belum mengenal dekat BKSAP dan diplomasi parlemen khususnya ruang lingkup regional; masyarakat belum dilibatkan secara luas dalam proses penyiapan bahan/materi rapat desk organisasi regional BKSAP; belum mengoptimalkan website yang telah ada; dan belum ada media interaktif yang memfasilitasi akses langsung masyarakat ke BKSAP.
 - d. Website berjudul “Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional” dengan pembagian fitur berdasarkan pembagian kawasan regional sesuai organisasi yang diikuti oleh BKSAP yaitu Asia Tenggara (AIPA), Asia (APA), Indo-Pasifik (IPPP), ASIA-Eropa (ASEP) dan featur “feedback” untuk partisipasi masyarakat
 - e. Isi Website (*content*) berupa hasil telaah dari hasil Sidang/Konferensi regional yang disampaikan kepada publik dengan referensi hasil Sidang/Konferensi regional yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk ditindaklanjuti
 - f. Tim Efektif akan beranggotakan seluruh pegawai di Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional ditambah Tenaga Ahli BKSAP dan pegawai dari Bidang Data dan Informasi Teknologi yang dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

2. Rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai pelengkap dokumen diperlukan tutorial penggunaan website
 - b. Tim Desain Website sangat menunggu hasil telaah Tim Materi untuk upload content website
 - c. Tim Desain Website sudah membuat draft laman www.diparlin.dpr.go.id sehingga mudah untuk melakukan perubahan sesuai permintaan/kebutuhan
 - d. Surat Keputusan segera disusun agar Tim Efektif dapat segera bekerja
 - e. Rapat selanjutnya di awal April 2019

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Bapak Sartomo, SS,M.Si, Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen, selaku Ketua Rapat

Mengingat waktu makan siang telah tiba, para peserta rapat dipersilahkan menikmati hidangan makan siang yang telah disiapkan oleh Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN Rakyat REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/047/41 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/03/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

19 Maret 2019

YTH.
PLT. KEPALA BAGIAN
WATUA DPR RI BID. KORPOLKAM
SETJEN DAN BK DPR RI
JAKARTA

Disampaikan dengan hormat bahwa Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional – Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan rapat yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Persidangan
Lakhar Kepala Biro KSAP,


Sartomo, S.S.,M.Si.
NIP. 196808111996031001

Tembusan :
Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Setjen dan BK DPR RI.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

SET. KSR

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ENDAH T.D. RETNOASTUTI, S.S.,M.Phil.	Kepala Biro KSAP	
2.	SARTOMO, S.S., M.Si.	Plh. Karo KSAP (Kepala Bagian Set. MINLUNA)	
3.	WARSITI ALFIAH, S.I.P.,DESS	Kepala Bagian Set. KSR.	
4.	Rd. ANNE WIDYANA, S.S., M.Si.	Plt. Kabag Set. WATUA Bid. KORPOLKAM	
5.	RIFAN RACHMAN SAFARI ANDALAS, S.Sos.,M.H.	Kasubbag. TU Set. KSR.	
6.	WIRYAWAN NARENDRO PUTRO, S.Sos.	Analis Tata Usaha Bagian Set. KSR.	
7.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Analis Kerjasama Luar Negeri Bagian Set. KSR.	

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
8.	GADIS ANGGIANI MARHA, S.Sos.	Analis Data dan Informasi Bag. Set KSR	
9.	ANIE PUJI LESTARI	Pengolah Data Bag. Set KSR	
10.	SITI MASITOAH	Pengelola Persidangan Bag. Set KSR	
11.	AHMADI	Pengadministrasi Umum Bag. Set KSR	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/04741 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/03/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

13 Maret 2019

YTH.
KEPALA BAGIAN
BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SETJEN DAN BK DPR RI
JAKARTA

Disampaikan dengan hormat bahwa Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional – Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan rapat yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Persidangan
Lakhar Kepala Biro KSAP,

Sartomo, S.S.,M.Si.
NIP. 196808111996031001

Tembusan :
Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Setjen dan BK DPR RI.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/04741 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/03/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

19 Maret 2019

Yth.

1. Erdinal Hendradjaja, S.T.,M.Sc.
2. Fariza Emra, S.T.,M.Sc.
3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.,M.T.I.
4. Agus Yamin

Bidang Data dan Teknologi Informasi
Setjen dan BK DPR RI

Jakarta

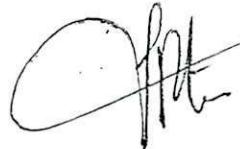
Disampaikan dengan hormat bahwa Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional – Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan rapat yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Persidangan
Lakhar Kepala Biro KSAP,



Sartomo, S.S.,M.Si.
NIP. 196808111996031001

Tembusan :

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Setjen dan BK DPR RI.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT (Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
 2. Lain-lain.

BAGIAN BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (BDTI)

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DJOKO HANGGORO, S.T.	Kepala Bagian BDTI	
2.	FARIZA EMRA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
3.	AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom.,M.T.I	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
4.	ERDINAL HENDRADJAJA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda Bagian BDTI	
5.	AGUS YAMIN	Pengadministrasi Umum Bagian Pusat Data dan Informasi	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/04741 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/03/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

19 Maret 2019

Yth.

1. Dewi Amelia Tresna Wijayanti, M.A.
2. Tide Aji Pratama
3. Masyitoh Annisa Ramadhani, M.A.

Tenaga Ahli BKSAP
Setjen dan BK DPR RI

Jakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional – Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan rapat yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Persidangan
Lakhar Kepala Biro KSAP,


Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001

Tembusan :

Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Setjen dan BK DPR RI.



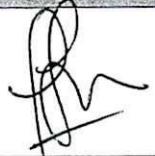
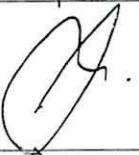
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pukul : 10.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6
Acara : 1. Rencana Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Lain-lain.

TENAGA AHLI BKSAP DPR RI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	TENAGA AHLI	
2.	TIDE AJI PRATAMA	TENAGA AHLI	
3.	MASYITOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	TENAGA AHLI	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : OS /D/ ST-PD.DN / BKSAP-KSR /3/2019

- Menimbang :
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI
 - Untuk memberikan dukungan administratif kepada pelaksanaan tugas maka diperlukan Surat Tugas

Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Dengan ini Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Jabatan	TUGAS
1.	Dra Damayanti, MSi	Deputi Bidang Persidangan	Pengarah
2.	Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti, SS, M.Phil	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	Pembimbing (Mentor)
3.	Warsiti Alfiah, SIP, DESS	Kepala Bagian Set. Kerja Sama Regional	<i>Project Leader</i>
4.	Anne Widyana, SS, M.Si	Kepala Sub Bagian Rapat Bagian Set KSR	Ketua Tim Substansi
5.	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Set KSR	Ketua Tim Administrasi
6.	Hilda Kurnia Ningsih, SH	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
7.	Gadis Anggiani Marha, S.Sos	Staf Bagian Set KSR	Tim Substansi
8.	Ani Puji Lestari	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
9.	Siti Masitoh	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
10.	Ahmadi	Staf Bagian Set KSR	Tim Administrasi
11.	Wiryawan Narendro Putro, SIP	Staf Bagian Set KSR	Administrator website
12.	Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc	Pranata Komputer Muda Bagian Data dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Desain Website
13.	Fariza Emra, ST, M.Sc	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
14.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI	Pranata Komputer Madya Bagian Data dan Teknologi Informasi	Tim Desain Website
15.	Dewi Amelia Tresna Wijayanti	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
16.	Tide Aji Pratama	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi
17.	Masyithoh Annisa Ramadhani	Tenaga Ahli BKSAP	Tim Substansi

Untuk: Menjadi anggota Tim Efektif guna pelaksanaan proyek perubahan berjudul "Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia Melalui Website Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

Target kinerja atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah optimalisasi penyiapan bahan/materi rapat dan pelayanan rapat desk kerja sama regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian surat tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta, 27 Maret 2019
Deputi Bidang Persidangan


Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 19620211 198703 2002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 27 Maret 2019
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Set AIPA Gedung Nusantara III Lantai 6
Acara	:	1. Pengembangan Layout, Design dan Content Substansi Website 2. Lain-Lain
Ketua Rapat	:	Sartomo, SS, M.Si (Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen)
Sekretaris Rapat	:	Warsiti Alfiah, SIP, DESS (Kepala Bagian Set.Kerja Sama Organisasi Regional)
Hadir	:	<u>BDTI</u> 1. Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc 2. Fahriza Emra, ST, M.Sc 3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI 4. Surya Fajar

TENAGA AHLI BKSAP

1. Amelia Tresna Dewi Wijayanti

BAG. SET. KSR

1. Warsiti Alfiah, SIP, DESS
2. Anne Widyanawati, SS, M.Si
3. Hilda Kurnia Ningsih, SH
4. dll

I. PEMBUKAAN

Sehubungan Pelaksana Harian Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan maka Ketua Rapat Pertemuan ini didelegasikan kepada Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS .

Dikarenakan ada pertemuan dengan Ketua BKSAP yang tidak dapat diwakilkan maka kegiatan rapat website ditunda hingga pertemuan selesai.

Rapat dibuka pada pukul 11.30 WIB oleh Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS selaku Ketua Rapat.

II. KESIMPULAN RAPAT

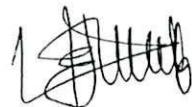
1. Rapat membahas model laman website diparlin.dpr.go.id dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laman website diparlin.dpr.go.id. diganti judul dengan Diplomasi Parlemen Regional dengan warna yang tidak jauh beda dengan laman website DPRRI
 - b. Website akan berisi topik besar sesuai kawasan dimana DPR RI menjadi anggota organisasi yaitu Indo-Pasifik (IPPP), Asia Tenggara (AIPA), Asia (APA), Asia Eropa (ASEP) dan feedback
 - c. Tim Desain Website menunggu Tim Substansi untuk segera meng-upload telaah hasil sidang/konferensi regional untuk menguji coba layout dan desain
 - d. Diperlukan pembuatan video evidence dengan durasi 10 menit dengan alur isi (*content*) sebagai berikut:
 - Pengenalan diri (pendahuluan, permasalahan, usulan solusi)
 - Persandingan kinerja dulu dan hasil proyek perubahan
 - Video seperti model iklan sehingga tidak monoton
 - Di bagian akhir memuat evidence testimoni dukungan terhadap proyek perubahan
 - Tim video menunggu alur cerita pembuatan video untuk segera dibuat draft nya
2. Rapat menyepakati untuk melanjutkan rapat dalam waktu dekat untuk membahas isi video evidence

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB oleh Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS . Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, selaku Ketua Rapat.

Mengingat waktu makan siang telah tiba, para peserta rapat dipersilahkan menikmati hidangan makan siang yang telah disiapkan oleh Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/OS318 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/03/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

27 Maret 2019

YTH.
(Daftar nama terlampir)
TIM EFEKTIF PEMBUATAN WEBSITE
DIPLOMASI PARLEMEN REGIONAL
SETJEN DAN BK DPR RI
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 20 Maret 2019 tentang pembangunan website Diplomasi Parlemen Regional, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa *Project Leader* akan mengadakan rapat lanjutan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Maret 2019
Pukul : 11.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Pembuatan Layout, design dan Content Substansi website;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Lakhar Kepala Biro KSAP
Kepala Bagian Set. KSR,



Warsiti Alfiah, S.I.P., DESS.
NIP. 197002191998032002

Tembusan :

1. Lakhar Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
2. Kepala Bagian Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI.



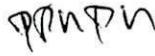
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. Set. KSR, Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2019 *Tim Proper*
Pukul : 10.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6
Acara : 1. Pembuatan *Layout, Design* dan *Content Substansi Website*;
 2. Lain-lain.

BAGIAN BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (BDTI)

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DJOKO HANGGORO, S.T.	Kepala Bagian BDTI	
2.	FARIZA EMRA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
3.	AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom.,M.T.I	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
4.	ERDINAL HENDRADJAJA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda Bagian BDTI	
5.	Serza 		



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. Set. KSR, Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2019
Pukul : 11.00 wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6
Acara : 1. Pembuatan *Layout, Design* dan *Content Substansi Website*;
2. Lain-lain.

SET. KSR

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. DAMAYANTI, M.Si.	Pengarah / Deputi Bidang Persidangan	
2.	ENDAH T.D. RETNOASTUTI, S.S.,M.Phil.	Pembimbing (Mentor) / Kepala Biro KSAP	
3.	SARTOMO, S.S., M.Si.	Plh. Karo KSAP (Kepala Bagian Set. MINLUNA)	
✓4.	WARSITI ALFIAH, S.I.P.,DESS	<i>Project Leader</i> / Kepala Bagian Set. KSR.	
5.	Rd. ANNE WIDYANA, S.S., M.Si.	Ketua Tim Substansi / Plt. Kabag Set. WATUA Bid. KORPOLKAM	
6.	RIFAN RACHMAN SAFARI ANDALAS, S.Sos.,M.H.	Ketua Tim Administrasi / Kasubbag. TU Set. KSR.	
7.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Tim Substansi / Analisis Kerjasama Luar Negeri	

NO.	NAMA PEGAWAI	TUGAS / JABATAN	TANDA TANGAN
8.	GADIS ANGGIANI MARHA, S.Sos.	Tim Substansi / Analisis Data dan Informasi Bag. Set KSR	
9.	ANIE PUJI LESTARI	Tim Administrasi / Pengolah Data Bag. Set KSR	
10.	SITI MASITOH	Tim Administrasi / Pengelola Persidangan Bag. Set KSR	
11.	AHMADI	Tim Administrasi / Pengadministrasi Umum Bag. Set KSR	
12.	WIRYAWAN NARENDRO PUTRO, S.Sos.	Administrator Website / Analisis Tata Usaha Bagian Set. KSR.	
13.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
14.	TIDE AJI PRATAMA	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
15.	MASYITOAH ANNISA RAMADHANI, M.A.	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
16.			
17.			
18.			



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT DALAM KANTOR DI LUAR JAM KERJA BAGIAN SET. KERJASAMA ORGANISASI REGIONAL DENGAN BAGIAN BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2018 - 2019
Masa Persidangan	:	IV
Hari/tanggal	:	Senin, 15 April 2019
Waktu	:	16.30 WIB s/d. 19.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Set. AIPA, Gd. Nusantara III, Lt. 6
Acara	:	Rapat Persiapan Pembuatan Website Diplomasi parlemen Regional
Ketua Rapat	:	Warsiti Alfiah (Kabag Set. KSR)
Sekretaris Rapat	:	R. Anne Widyana (Kasubag Set. KSR)
Hadir	:	<u>Sekretariat KSR :</u> 1. Rifan Rachman Safari A (Kasubag Set. KSR) 2. Siti Masitoh (Staf Set. KSR) 3. Anie Puji Lestari (Staf Set. KSR) 4. Dll

Sekretariat BDTI :

1. Djoko Hanggoro (Kepala BDTI)
2. Fariza Emra (Pranata Komputer)
3. Airlangga Eka Wardhana (Pranata Komputer)
4. Dll

PENDAHULUAN

Rapat membahas Penyusunan Pembuatan Website Diplomasi Parlemen Regional. Rapat dibuka oleh Yth. Sdri. Warsiti Alfiah, Kepala Bagian Set. Kerja Sama Regional (KSR) pada pukul 16.30 WIB di Ruang Rapat Set. AIPA, Gd. Nusantara III Lantai 6;

KESIMPULAN

Rapat menyusun konsep Website Diplomasi Parlemen Regional yang akan dibuatkan oleh Tim dari Bidang Data dan Informasi dan penyusunan substansi website akan disiapkan oleh Sekretariat Kerjasama Regional;

Rapat memutuskan bahwa konsep Website Diplomasi Parlemen Regional berisikan mengenai kegiatan Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang dikategorikan berdasarkan Organisasi Regional dan Isu Regional;

Berikutnya, rapat juga memutuskan untuk melakukan koordinasi rutin dan menyampaikan berupa teknis pembuatan website dan bahan substansi yang akan di upload ke website.

PENUTUP

Rapat Pembuatan Website Diplomasi Parlemen Regional tersebut ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 19.30 WIB.

Jakarta, April 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Warsiti Alfiah, S.IP., DESS.
NIP.197002191998032002

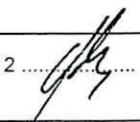
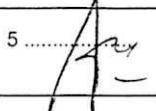
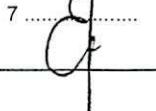
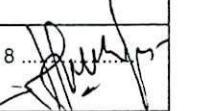
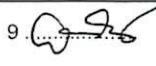
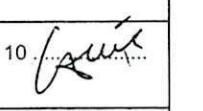
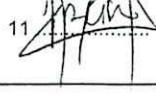
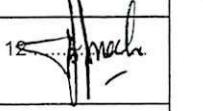
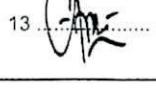
DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional dengan Bagian Bidang Data dan Teknologi
Informasi

Tanggal : Senin, 15 April 2019

Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00

Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA

Acara : Rapat Persiapan Pembuatan Website Diplomasi Parlemen Regional

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Warsiti Alfiah, S.I.P., DESS	197002191998032002	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	1 
2.	Djoko Hanggoro, S.T.	197012282000031003	Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	2 
3.	Raden Anne Widyana, S.S., M.Si.	197201011998032001	Kepala Subbagian Rapat	3 
4.	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos., M.H.	198301232009121001	Kepala Subbagian Tata Usaha	4 
5.	Fariza Emra, S.T., M.Sc.	198001082009121001	Pranata Komputer Madya	5 
6.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.	198210032009121001	Pranata Komputer Madya	6 
7.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	198008132009121001	Pranata Komputer Muda	7 
8.	Siti Masitoh	197302021997032004	Pengelola Persidangan	8 
9.	Gadis Anggiani Marha, S.Sos.	197503181999032004	Analisis Data dan Informasi	9 
10.	Anie Puji Lestari	197507171997032001	Pengolah Data	10 
11.	Wirawan Narendro Putro, S.Sos.	198406082009121004	Analisis Tata Usaha	11 
12.	Ahmadi	197803172008101001	Pengadministrasi Umum	12 
13.	BUDI HANDOKO	140000433	PPNPN	13 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : DP/ 07470 /SETJEN DAN BK DPR RI /AP.02/05/2019 15 Mei 2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat

YTH.

(Daftar nama terlampir)

TIM EFEKTIF PEMBUATAN WEBSITE
DIPLOMASI PARLEMEN REGIONAL
SETJEN DAN BK DPR RI
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 27 Maret 2019 tentang pembangunan website Diplomasi Parlemen Regional, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa *Project Leader* akan mengadakan rapat lanjutan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Pukul : 13.00. WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA
Gedung Nusantara III, Lantai 6.
Acara : 1. Membahas Persiapan Sosialisasi Website;
2. Lain-lain.

Sehubungan dengan hal itu dan mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro KSAP
Kepala Bagian Set. KSR,

Warsiti Alfiah, S.I.P., DESS.
NIP. 197002191998032002

Tembusan :

1. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
2. Kepala Bagian Bidang Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR RI.

**DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PEMBUATAN WEBSITE
DIPLOMASI PARLEMEN REGIONAL**

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dra. Damayanti, M.Si.	Deputi Bidang Persidangan	Pengarah
2.	Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil.	Kepala Biro KSAP	Pembimbing (Mentor)
3.	Warsiti Alfiah, S.I.P., DESS.	Kepala Bagian Sekretariat Kerja sama Organisasi Regional	<i>Project Leader</i>
4.	Rd. Anne Widyana,S.S.,M.Si.	Kepala Subbagian Rapat	Ketua Tim Substansi
5.	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos.,M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim Substansi
6.	Wiryawan Narendra Putro, S.Sos.	Analisis Tata Usaha	Administrator Website
7.	Hilda Kurnia Ningsih, S.H.	Analisis Kerjasama luar Negeri	Tim Substansi
8.	Gadis Anggiani Marha, S.Sos	Analisis Data dan Informasi	Tim Substansi
9.	Anie Puji Lestari	Pengolah Data	Tim Administrasi
10.	Ahmadi	Pengadministrasi Umum	Tim Administrasi
11.	Siti Masitoh	Pengelola Persidangan	Tim Administrasi
12.	Dewi Amelia Tresna Wijayanti, M.A.	Tenaga Ahli BKSAP DPR RI	Tim Substansi
13.	Tide Aji Pratama	Tenaga Ahli BKSAP DPR RI	Tim Substansi
14.	Masyitoh Annisa Ramadhani, M.A.	Tenaga Ahli BKSAP DPR RI	Tim Substansi
15.	Fariza Emra, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya	BDTI
16.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.,M.T.I	Pranata Komputer Madya	BDTI
17.	Erdinal Hendradjaja, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda	BDTI



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT DENGAN INSTANSI / PIHAK TERKAIT
(Bag. Set. KSR, Bag. BDTI dan Tenaga Ahli BKSAP)**

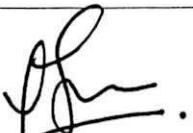
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

Pukul : 13.00 wib – selesai

Tempat : Ruang Rapat Set. AIPA, Gedung Nusantara III, Lantai 6

Acara : 1. Membahas persiapan sosialisasi Website;
2. Lain-lain.

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. DAMAYANTI, M.Si.	Pengarah / Deputi Bidang Persidangan	
2.	ENDAH T.D. RETNOASTUTI, S.S.,M.Phil.	Pembimbing (Mentor) / Kepala Biro KSAP	
3.	WARSITI ALFIAH, S.I.P.,DESS	Projeck Leader / Kepala Bagian Set. KSR.	
4.	Rd. ANNE WIDYANA, S.S., M.Si.	Ketua Tim Substansi / Kasubbag. Rapat Set. KSR.	
5.	RIFAN RACHMAN SAFARI ANDALAS, S.Sos.,M.H.	Ketua Tim Administrasi / Kasubbag. TU Set. KSR.	
6.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.	Tim Substansi / Analisis Kerjasama Luar Negeri	
7.	GADIS ANGGIANI MARHA, S.Sos.	Tim Substansi / Analisis Data dan Informasi Bag. Set KSR	

NO.	NAMA PEGAWAI	TUGAS / JABATAN	TANDA TANGAN
8.	ANIE PUJI LESTARI	Tim Administrasi / Pengolah Data Bag. Set KSR	
9.	SITI MASITOH	Tim Administrasi / Pengelola Persidangan Bag. Set KSR	
10.	AHMADI	Tim Administrasi / Pengadmindistrasi Umum Bag. Set KSR	
11.	WIRYAWAN NARENDRO PUTRO, S.Sos.	Administrator Website / Analis Tata Usaha Bagian Set. KSR.	
12.	DEWI AMELIA TRESNA WIJAYANTI	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
13.	TIDE AJI PRATAMA	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
14.	MASYITOH ANNISA RAMADHANI, M.A.	Tim Substansi / Tenaga Ahli BKSAP	
15.	FARIZA EMRA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
16.	AIRLANGGA EKA WARDHANA, S.Kom.,M.T.I	Pranata Komputer Madya Bagian BDTI	
17.	ERDINAL HENDRADJAJA, S.T.,M.Sc.	Pranata Komputer Muda Bagian BDTI	

18. MUHAMMAD SASMITO
ADI WIBOWO

Pranata Komputer Terampil
Bagian BDTI



19. Daniel Tri Widyatmoko

Pranata Komputer Terampil
BDTI





SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI/PIHAK TERKAIT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 16 Mei 2019
Waktu	:	13.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Set AIPA Gedung Nusantara III Lantai 6
Acara	:	1. Finalisasi Design dan Content Substansi Website 2. Lain-Lain
Ketua Rapat	:	Warsiti Alfiah, SIP, DESS (Kepala Bagian Set.Kerja Sama Organisasi Regional)
Sekretaris Rapat	:	R. Anne Widiana, SS, M.Si (Kasubbag Rapat KSR)
Hadir	:	<u>BDT</u> 1. Erdinal Hendradjaja, ST, M.Sc 2. Fahriza Emra, ST, M.Sc 3. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, MTI 4. Muhammad Sasmito Adi Wibowo 5. Daniel Tri Widyatmoko

TENAGA AHLI BKSAP

1. Amelia Tresna Dewi Wijayanti
2. Tide Aji Pratama

BAG. SET. KSR

1. Gadis Anggiani Marha, S.Sos.
2. dll

I. PEMBUKAAN

Rapat dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat yaitu Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional, Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS selaku *Project Leader* Proyek Perubahan

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Ketua rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tim Efektif perlu persiapan matang menjelang pelaksanaan ujian seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan jadwal siang. Naum sekitar jam 11.00 diharapkan sudah tiba di tempat seminar guna mengantisipasi apabila jadwal ujian dimajukan
 - b. Penguji meminta Tim Website dan Tim Substansi turut hadir di tempat seminar guna dimintai keterangan tambahan tentang proyek perubahan
 - c. Design dan layout website sudah disetujui oleh mentor tinggal finalisasi isi (*content*)
 - d. Pertanyaan penguji tentang website terkait metode pembuatannya dan penggunaan aplikasi
 - e. Pertanyaan penguji tentang *content* (isi) terkait pembuatan telaah dan kinerja sehari-hari sebagai analis kerja sama antar parlemen
 - f. Telaah yang dimaksud adalah resolusi yang diterjemahkan dengan diberikan pengantar sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengerti kinerja BKSAP dan mengenali fungsi diplomasi selain 3 fungsi DPR lainnya yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi
2. Tim Website memberikan penjelasan bahwa website ini tidak memungkinkan jika dibuat dengan android karena web ini bukan aplikasi namun informasi dengan sistem browser. Pengguna website informasi biasanya akan membuka website melalui komputer PC dengan browser internet karena layar lebar dan memuat banyak informasi sehingga memudahkan pencarian. Aplikasi android lebih cocok untuk aplikasi terapan, non informasi, karena pemakaian dengan instal terlebih dahulu di telepon selular (ponsel), misalnya aplikasi gojek, dan tampilan instal tidak memerlukan layar lebar seperti PC, cukup layar ponsel karena lebih praktis.
3. Sosialisasi website direncanakan tanggal 13 Mei 2019 namun karena *content* website belum lengkap maka jadwal sosialisasi ditunda hingga tanggal 23 Mei 2019

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB oleh Ketua Rapat yaitu Ibu Warsiti Alfiah, SIP, DESS , Kepala Bagian Set Kerja Sama Organisasi Regional selaku *Project Leader* Proyek Perubahan

Ketua Rapat



Warsiti Alfiah, SIP, DESS
NIP. 197002191998032002

LAPORAN PERKEMBANGAN PROYEK PERUBAHAN DWI MINGGUAN (I)
'PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL'

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KENDALA/ HAMBATAN
1	Rabu, 27 Maret 2019	Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembentukan Tim Efektif Rapat Tim Efektif	Persiapan Sidang Paripurna DPR
2	Kamis, 28 Maret 2019	Koordinasi dengan Tim Desain Website dan Pembuatan Video <i>evidence</i> Koordinasi dengan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi terkait permohonan dukungan pelaksanaan proyek perubahan	Sekjen DPR RI dan Deputi Persidangan padat agenda Rapat Paripurna. Mentor Dinas Luar
3	Jum'at, 29 Maret 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi Koordinasi dengan Mentor terkait perubahan judul proyek perubahan sesuai masukan dari Pengudi yaitu dari "Diseminasi Diplomasi Parlemen Indonesia melalui Website untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" menjadi " Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional "	Sekjen DPR RI dan Deputi Persidangan Dinas Luar
	Sabtu		
	Minggu		
4	Senin, 1 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi Penyusunan Pedoman Penyusunan Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional Untuk Website Diplomasi Parlemen Indonesia Di Kawasan Regional	Pimpinan dan Anggota DPR berada di Daerah Pemilihan. Pimpinan BKSAP, Sekjen DPR, Deputi Persidangan dan Mentor Dinas Luar
5	Selasa, 2 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi	
	Rabu		
6	Kamis, 4 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi	
7	Jum'at, 5 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi	
	Sabtu		
	Minggu		
8	Senin, 8 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi Menyusun Laporan Proyek Perubahan	Pimpinan dan Anggota DPR berada di Daerah Pemilihan. Pimpinan BKSAP, Sekjen DPR, Pembimbing, Mentor Sidang di Luar Negeri Pembimbing dan Mentor Dinas Luar
9	Selasa, 9 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> oleh Tim Substansi Koordinasi dengan Tim Video untuk <i>evidence</i> Menyusun Laporan Proyek Perubahan	
10	Rabu, 10 April 2019	Penyusunan <i>content website</i> oleh Tim Substansi	

LAPORAN PERKEMBANGAN PROYEK PERUBAHAN DWI MINGGUAN (II)
'PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL'

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KENDALA/ HAMBATAN
1	Kamis, 11 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i>	
2	Jum'at, 12 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i> Pengumpulan data untuk <i>evidence</i>	Pimpinan dan Anggota DPR berada di Daerah Pemilihan. Pimpinan BKSAP, Sekjen DPR, Deputi Persidangan Sidang di Luar Negeri
		Konsultasi dengan Mentor terkait perubahan judul proyek perubahan sesuai masukan dari Penguji yaitu "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional". Mentor memberikan arahan agar judul diubah lagi menjadi " Telaah Hasil Sidang/Konferensi Regional dalam Pengembangan Website BKSAP DPR RI "	Mengubah Isi Laporan Implementasi Proyek Perubahan
	Sabtu		
	Minggu		
3	Senin, 15 April 2019	Pengumpulan data untuk <i>content website</i>	Tim Substansi terbatas juga berpacu dengan tugas rutin, dan ada yang cuti
		Koordinasi dengan Tim Website	Data belum lengkap
		Komunikasi dengan Tim Video/Evidence	Judul belum pasti sehingga kesulitan menetapkan <i>angle cerita</i>
4	Selasa, 16 April 2019	Konsultasi dengan Deputi Bidang Persidangan Konsultasi dengan Kepala Pusat Data dan Informasi	
		Konsultasi dengan Coach dan mendapatkan arahan agar judul kembali ke hasil review ujian RPP dan sesuai masukan dari Penguji yaitu "Pengembangan Website Diplomasi Parlemen Indonesia di Kawasan Regional". Coach juga memberikan masukan isi laporan, istilah untuk features misalnya BERANDA lebih pas dibanding TENTANG, dsb Hasil komunikasi WhatsApp bahwa Mentor menyetujui usulan <i>coach</i> dimaksud	
	Rabu, 17 April 2019		PEMILU SERENTAK
5	Kamis, 18 April 2019	Konsultasi dengan Mentor terkait judul dan isi laporan.	
		Konsultasi dengan Tim Administrasi terkait Surat Keputusan Tim Efektif khususnya perubahan nama Tim	
		Komunikasi dengan Tim Website terkait nama Tim Efektif	

		Konsultasi dengan Tim Video/Evidence terkait rencana alur cerita video dan teknik pengumpulan database video	
	Jum'at		WAFAT ISA ALMASIH
	Sabtu		
	Minggu		
8	Senin, 22 April 2019		Mendapat tugas menghadiri
9	Selasa, 23 April 2019		Workshop AIPA pada tanggal 22-26
10	Rabu, 24 April 2019		April 2019 di Bali

LAPORAN PERKEMBANGAN PROYEK PERUBAHAN DWI MINGGUAN (III)
'PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL'

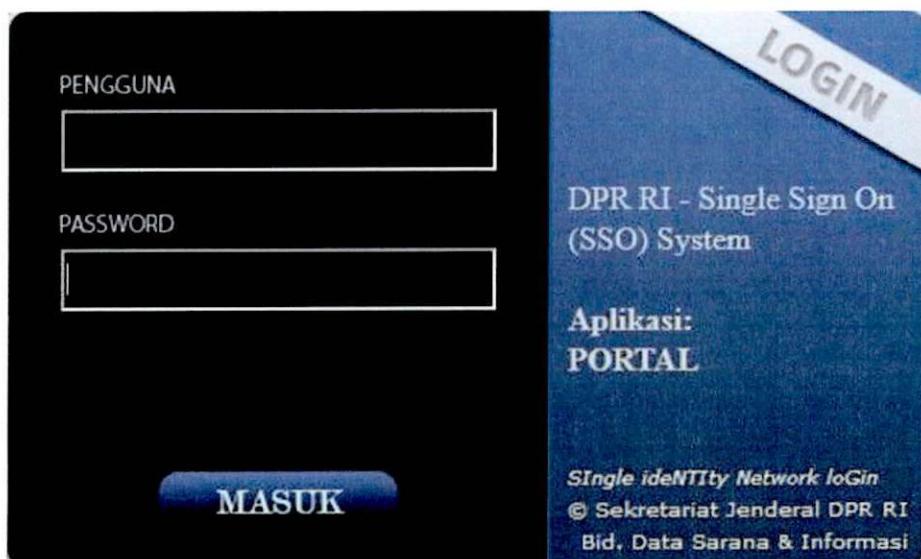
NO	TANGGAL	KEGIATAN	KENDALA/ HAMBATAN
1	Kamis, 25 April 2019	Pengumpulan data oleh Tim Substansi	
2	Jum'at, 26 April 2019	Pengumpulan data oleh Tim Substansi	Mendapat tugas menghadiri Workshop AIPA pada tanggal 22-26 April 2019 di Bali
	Sabtu		
	Minggu		
3	Senin, 29 April 2019	Revisi Draft LPP	
4	Selasa, 30 April 2019	Revisi Draft LPP	
	Rabu		
5	Kamis, 2 Mei 2019	Revisi Draft LPP Diskusi dengan Tim Video evidence	
6	Jum'at, 3 Mei 2019	Revisi Draft LPP	
	Sabtu		
	Minggu		
7	Senin, 6 Mei 2019	Diskusi dengan Tim Website terkait design dan tutorial Konsultasi dengan Coach terkait Laporan Dwimingguan III	
8	Selasa, 7 Mei 2019	Konsultasi, testimoni dan video evidence dengan Sekjen DPR RI	
9	Rabu, 8 Mei 2019	Revisi Draft LPP sesuai arahan Coach	

LAPORAN PERKEMBANGAN PROYEK PERUBAHAN DWI MINGGUAN (IV)
'PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL'

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN
1	Kamis, 9 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional	
2	Jum'at, 10 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional	
	Sabtu		
	Minggu		
3	Senin, 13 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional	Sosialisasi website belum terealisasi dikarenakan content website belum sempurna untuk ditayangkan
4	Selasa, 14 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional Konsultasi, testimoni dan <i>video evidence</i> dengan masyarakat (reporter CNN)	Pimpinan BKSAP kunjungan kerja ke luar negeri dan tugas di daerah pemilihan
5	Rabu, 15 Mei 2019	Konsultasi, testimoni dan <i>video evidence</i> dengan Wakil Wakil Sekjen AIPA Konsultasi, testimoni dan <i>video evidence</i> dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Konsultasi, testimoni dan <i>video evidence</i> dengan Anggota BKSAP, Ibu Amelia Anggraini (F-P.Nasdem) Konsultasi, testimoni dan <i>video evidence</i> dengan Ketua PPID/Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Gedung DPR dijaga ketat TNI/Polisi dan pegawai mendadak diliburkan pada tanggal 22-24 Mei 2019 karena aksi demo 02 Siaga 1 sehingga kesulitan akses masuk ke kantor untuk mengerjakan proyek perubahan
6	Kamis, 16 Mei 2019	<i>video evidence</i> oleh mentor yaitu Kepala Biro KSAP Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional Rapat Tim Website	
7	Jum'at, 17 Meil 2019	Finalisasi LPP	
	Sabtu		
	Minggu		
8	Senin, 20 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional Penyusunan video	
9	Selasa, 21 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional Testimoni dengan Kepala Bagian Sekretariat Komisi I Penyusunan video Finalisasi Executive Summary	Rencana sosialisasi website antara tanggal 23-24 Mei 2019 gagal dilaksanakan karena pegawai mendadak diliburkan dan tidak ada akses masuk ke gedung kantor
10	Rabu, 22 Mei 2019	Penyusunan telaah hasil sidang/konferensi regional	

Buku Panduan Aplikasi Diplomasi Parlemen Regional

DIPARLIN



**Bidang Data dan Sarana Informasi
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI
2019**

1. Masuk (*Log In*) ke Portal

- Sebelum masuk ke aplikasi diparlin kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam Portal Setjen DPR RI. Portal berfungsi sebagai pintu masuk tunggal aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Setjen DPR RI.
- Dengan adanya Portal, kita hanya perlu mengingat satu nama pengguna dan satu password untuk mengakses email DPR dan semua aplikasi yang diijinkan.
- Untuk Sementara Portal dan Aplikasi Diparlin hanya dapat diakses dari dalam jaringan DPR RI.
- Gunakan versi terbaru dari program penjelajah internet seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dsb.
- Buka alamat <http://portal.dpr.go.id/>
- Isi kolom **Pengguna** dan **Password** lalu klik tombol **Masuk**.



- Bila berhasil, Nama Lengkap dan Peran Anda akan tertera di kotak pada pojok kiri atas.

Gerry Kresna Putra
Pangestu H
 Gerry Kresna Putra
Pangestu H

user
[Edit My Profile](#)

2. Keluar (*Log Out*) dari Portal

- Untuk keamanan dan menghindari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya Anda selalu keluar (*logout*) setelah selesai menggunakan aplikasi ini.
- Klik menu **Log out** di sebelah kanan atas untuk keluar dari portal.



3. Input Data

Ada beberapa cara atau ketentuan untuk mengisi/input data:

- **Data Wajib**

Seperti **Judul** dan beberapa masukan data yang lain yang ditandai dengan bintang merah (*) berarti wajib diisi. Bila tidak maka data tidak dapat disimpan. Dan khusus untuk judul pengisian maksimal hanya 255 karakter.

Judul *

- **Data File**

Untuk meng-upload file seperti misalnya file gambar, klik tombol Pilih File lalu pilih file yang akan di-upload.

Tidak ada file yang dipilih

- **Data Tanggal**

Pada beberapa masukan tanggal secara otomatis terisi mengikuti tanggal server. Untuk mengubahnya, klik kolom tanggal, pilih tahun dan bulan lalu akhiri dengan memilih tanggal.

Tanggal : *

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- **Data Pilihan**

Beberapa masukan harus diisi dengan pilihan data yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengeluarkan pilihan yang ada, klik tombol lalu pilih data yang dimaksud.



4. Masuk (*Log In*) ke Aplikasi DIPARLIN

- Pada halaman utama Portal di bagian kiri akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang dapat Anda Akses.
- Klik menu Diparlin.



- Bila berhasil maka halaman depan aplikasi Diplomasi Parlemen Indonesia akan ditampilkan dan logo Portal Setjen DPR akan berganti menjadi logo **DIPARLIN**.



- Untuk menampilkan menu lanjutan klik tombol **MENU** di atas

DIPARLIN ADMIN

MENU

Log Out **Portal**

Artikel

- Daftar Tipe Artikel
- Tambah Tipe Artikel
- Daftar Subtipe Artikel
- Tambah Subtipe Artikel
- Daftar Artikel
- Tambah Artikel

Website

- Daftar FAQ
- Tambah FAQ
- Daftar Konten Setting
- Tambah Konten Setting
- Daftar Konten Status
- Tambah Konten Status
- Daftar Kontak
- Tambah Kontak

Laporan

- Laporan Kustom

- Untuk kembali ke halaman Portal klik tombol **Portal** di pojok kanan atas.

5. Daftar Tipe Artikel

- Daftar Tipe Artikel adalah data yang dimunculkan dibagian atas, sebagai pilihan pada alamat <http://diparlin.dpr.go.id/>

DIPLOMASI PARLEMEN
KAWASAN REGIONAL

CARI

BERANAK INISIATIF DPR ASIA TENGGARA ASIA PASIFIK ASIA-EROPA ASIA-AFRIKA ASIA KONTAK

TOPIK TERHANGAT

▶ INISIATIF DPR ▶ ASIA TENGGARA ▶ ASIA PASIFIK

- Halaman yang muncul ketika memilih menu Daftar Tipe Artikel.

Daftar Tipe Artikel

Tambah Tipe Artikel

Page: 1 1 - 6 / 6 (6) 20

Tipe Artikel	
INISIATIF DPR	EDIT DELETE
ASIA TENGGARA	EDIT DELETE
ASIA PASIFIK	EDIT DELETE
ASIA-EROPA	EDIT DELETE
ASIA-AFRIKA	EDIT DELETE
ASIA	EDIT DELETE

- Untuk menambah tipe artikel yang baru klik tombol **Tambah Tipe Artikel** atau pilih di bagian menu di atas.

Tambah Tipe Artikel

[Back to Daftar Tipe Artikel](#)

Tipe Artikel :

Deskripsi :

Simpan

Kembali

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**. Jika sukses maka akan muncul di daftar tipe artikel.
- Jika ingin merubah data tekan tombol **EDIT** pada bagian yang ingin diubah lalu tekan tombol SIMPAN.

Edit Tipe Artikel

[Back to Daftar Tipe Artikel](#)

Tipe Artikel :

Deskripsi :

Simpan

Kembali

- Jika ingin menghapus data tekan tombol **DELETE** pada bagian yang ingin dihapus lalu tekan tombol OKE pada pop up yang muncul.

6. Daftar Subtipe Artikel

- Daftar Subtipe Artikel adalah submenu dari tipe artikel.
- Halaman yang muncul ketika memilih menu Daftar Subtipe Artikel

Daftar Subtipe Artikel

[Tambah Subtipe Artikel](#)

Page: 1 ▾ 1 - 6 / 6 (6) ▾ 20 ▾

Subtipe Artikel	Tipe Artikel	
INISIATIF DPR	INISIATIF DPR	EDIT DELETE
ASIA TENGGARA	ASIA TENGGARA	EDIT DELETE
ASIA PASIFIK	ASIA PASIFIK	EDIT DELETE
ASIA-EROPA	ASIA-EROPA	EDIT DELETE
ASIA-AFRIKA	ASIA-AFRIKA	EDIT DELETE
ASIA	ASIA	EDIT DELETE

- Untuk menambah subtipe artikel yang baru klik tombol **Tambah Subtipe Artikel** atau pilih di bagian menu di atas.

 **Tambah Subtipe Artikel**

[Back to Daftar Subtipe Artikel](#)

Subtipe Artikel :	<input type="text"/>
Tipe Artikel :	<input type="button" value="Pilih Data..."/>
Deskripsi :	<input type="text"/>

Simpan **Kembali**

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**. Jika sukses maka akan muncul di daftar subtipe artikel.
- Jika ingin merubah data tekan tombol **EDIT** pada bagian yang ingin diubah lalu tekan tombol **SIMPAN**.

 **Edit Subtipe Artikel**

[Back to Daftar Subtipe Artikel](#)

Subtipe Artikel :	Stabilitas Politik Keamanan Kawasan
Tipe Artikel :	<input type="button" value="INDO PASIFIK"/>
Deskripsi :	Deskripsi mengenai Semenanjung Korea

Simpan **Kembali**

- Jika ingin menghapus data tekan tombol **DELETE** pada bagian yang ingin dihapus lalu tekan tombol **Oke** pada pop up yang muncul.

7. Daftar Artikel

- Daftar Artikel adalah artikel-artikel yang ditampilkan di halaman utama, kita bisa menambahkan gambar atau file pendukung ke artikel yang akan kita upload.

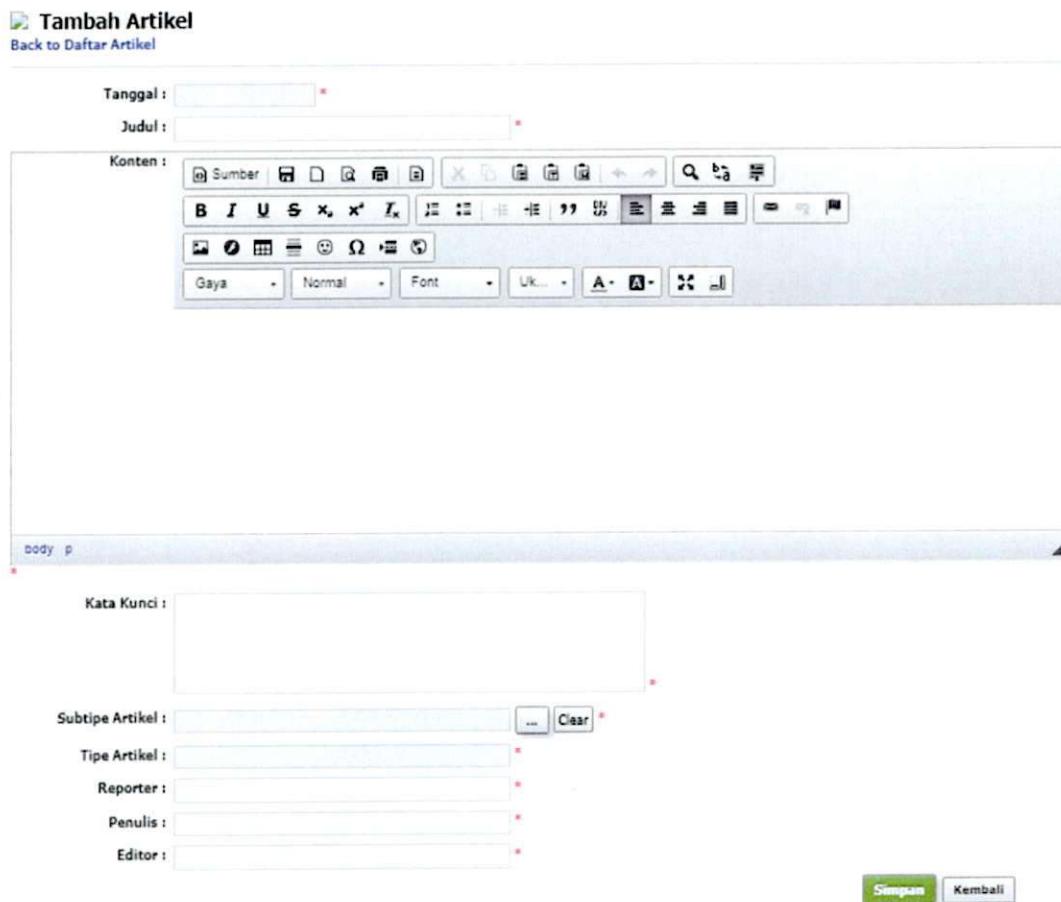
 **Daftar Artikel**

[Tambah Artikel](#)

Page: 1 1 - 20 / 23677 (23677) 20

Tanggal	Judul	Subtipe Artikel	Tipe Artikel	
20-03-2019	Perdamaian dan Keamanan Global	Stabilitas Politik Keamanan Kawasan	INDO PASIFIK	EDIT DELETE
25-02-2019	RJMD Nganjuk Berpotensi Diubah			EDIT DELETE
22-02-2019	BK DPR Perkuat Kerja Sama Penyusunan Legislasi			EDIT DELETE
22-02-2019	RUU Pertanahan Bersifat Lex Specialis	Penanggulangan Narkoba	ASIA	EDIT DELETE

- Untuk menambah artikel yang baru klik tombol **Tambah Artikel** atau pilih di bagian menu di atas.



- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol Simpan. Jika sukses maka akan muncul di daftar artikel.
- Jika ingin menghapus data tekan tombol **DELETE** pada bagian yang ingin dihapus lalu tekan tombol OKE pada pop up yang muncul.
- Jika ingin merubah data tekan tombol **EDIT** pada bagian yang ingin diubah lalu tekan tombol **SIMPAN**.

Edit Artikel

[Back to Daftar Artikel](#)

Tanggal : 16-04-2019 *

Judul : DRI RI MENDUKUNG PERNYATAAN PERANG TERHADAP *

Konten :

Bangkok – Thailand, yaitu

- Resolution on Securing A Drug-Free ASEAN Community for Future Generations
- Resolution on the Terms of Reference on the AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs

Resolution on Securing A Drug-Free ASEAN Community for Future Generations memuat keputusan-keputusan sebagai berikut

- Peran Anggota AIPA diharapkan mempertimbangkan pendekatan yang seimbang untuk menghadapi momok dari narkoba termasuk upaya mengurangi permintaan dan penawaran terhadap narkoba dan hal ini memerlukan pencapaian (bersekuuuh, pendidikan tentang penegakan), penegakan hukum, perawatan, rehabilitasi dan integrasi kembali, dan strategi pembangunan alternatif (usaha menghapus penyalahgunaan obat terlarang) bersama dikerjakan secara terintegrasi.

Kata Kunci : narkoba, BPN, Ibu coklat, AIPA

Subjek Artikel : ASIA TENGGARA

Tipe Artikel : ASIA TENGGARA

Reporter :

Pemulis :

Editor :

Status Publikasi : Dr

Status Topik : Dr

Terhangat :

Simpan **Tambah File** **Kembali**

Page: 1 / 1 | EDIT | DELETE | DOWNLOAD

- Jika ingin menambahkan file atau foto tekan tombol **Tambah File**. Kemudian lengkapi data sesuai dengan kolom yang disediakan. Tombol **Pilih File** digunakan untuk memilih file yang akan diupload dari komputer.



Simpan **Kembali**

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**.
- File yang telah kita upload dapat kita unduh dengan cara tekan tombol **DOWNLOAD** pada file yang ingin kita unduh.
- Jika ingin merubah file yang di upload klik tombol **EDIT** lalu tekan tombol **SIMPAN** jika sudah selesai.

8. Daftar Konten Setting

- Daftar Konten Setting adalah informasi tentang alamat, telepon, email, dan info atau deskripsi.

INFO

 Gedung Nusantara III, Lantai 6
 (021) 5715 XXX
 bksap@dpr.go.id

- Halaman yang muncul ketika memilih menu Konten Setting



Nama	Nilai	
Kontak (Headline)	Kirimkan Pesan Anda	EDIT DELETE
Kontak (Alamat)	Gedung Nusantara III, Lantai 6	EDIT DELETE
Kontak (Telepon)	(021) 5715 XXX	EDIT DELETE
Kontak (Email)	bksap@dpr.go.id	EDIT DELETE
Kontak (Info)	EDIT DELETE

- Untuk menambah konten setting yang baru klik tombol **Konten Setting**  atau pilih di bagian menu di atas.



Tambah Setting

Back to Daftar Setting

Nama :

Nilai :

Simpan **Kembali**

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**. Jika sukses maka akan muncul di daftar tipe artikel.
- Jika ingin merubah data tekan tombol **EDIT** pada bagian yang ingin diubah lalu tekan tombol **SIMPAN**.
- Jika ingin menghapus data tekan tombol **DELETE** pada bagian yang ingin dihapus lalu tekan tombol **OKE** pada pop up yang muncul.

9. Daftar Konten Statis

- Daftar Konten Statis adalah data yang ditampilkan di submenu dari menu Beranda



- Halaman yang muncul ketika memilih menu Konten Statis

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**. Jika sukses maka akan muncul di daftar tipe artikel.
 - Jika ingin merubah data tekan tombol **EDIT** pada bagian yang ingin diubah lalu tekan tombol **SIMPAN**.

Edit Konten Statis

[Back to Daftar Konten Statis](#)

Judul : PENDAHULUAN *

Konten Statis :

- Jika ingin menghapus data tekan tombol **DELETE** pada bagian yang ingin dihapus lalu tekan tombol **OKE** pada pop up yang muncul.

10.Daftar Kontak

- Daftar Kontak adalah
- Untuk menambah kontak yang baru klik tombol **Tambah Kontak** di bagian menu di atas.

The screenshot shows a web page titled "Tambah Kontak" with a "Back to Daftar Kontak" link. It contains four input fields labeled "Nama", "Email", "Judul", and "Pesan", each with a red asterisk indicating it is required. Below the fields is a large text area. At the bottom right are two buttons: a green "Simpan" button and a white "Kembali" button.

- Lengkapi data yang dibutuhkan, lalu klik tombol **Simpan**. Jika sukses maka akan muncul di daftar kontak.

ALBUM FOTO



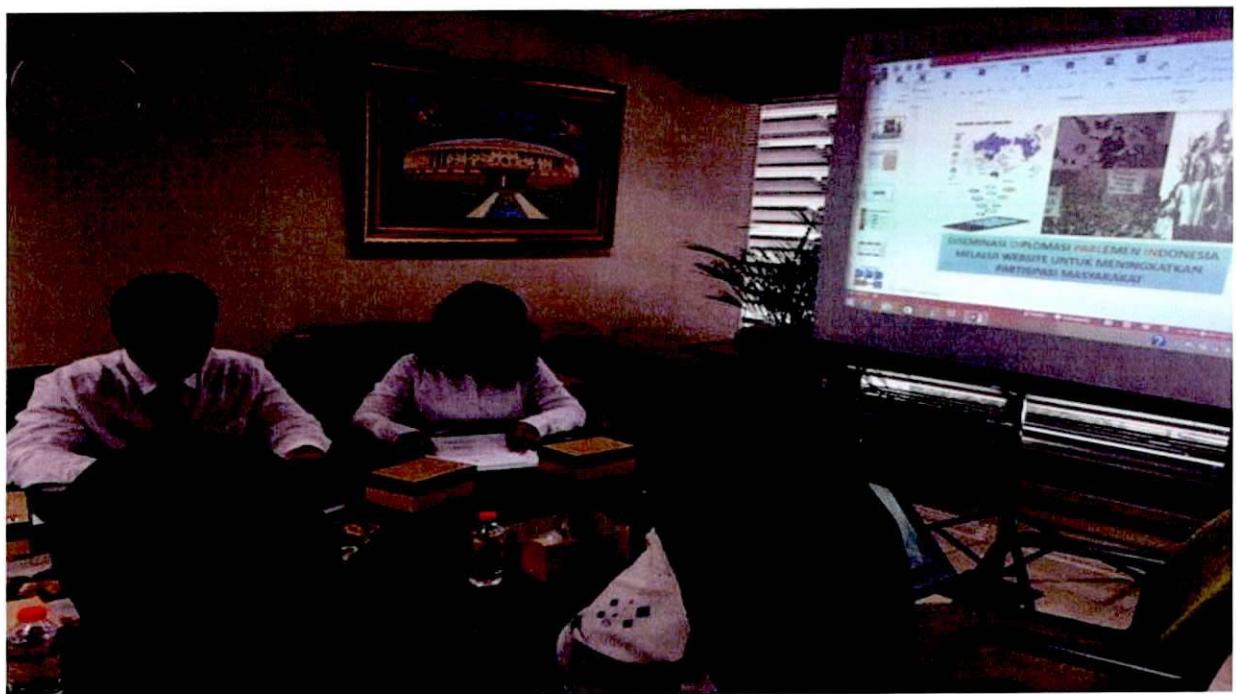
Konsultasi dengan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI
Ibu Dra. Damayanti, M.Si



ALBUM FOTO



Rapat Tim Efektif bulan Maret 2019



ALBUM FOTO



Rapat Tim Efektif tanggal 16 Mei 2019



Kegiatan coaching



DPR-RI



PASAL 68 DAN PASAL 69
UU NOMOR 17 TAHUN 2014



FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN,
FUNGSI PENGAWASAN FUNGSI DIPLOMASI

MEMPERKUAT FUNGSI DIPLOMASI DPR RI YANG TELAH DIJALANKAN OLEH
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)
SEJAK TAHUN 1979.



KAWASAN REGIONAL BKSAP MEMBENTUK
DESK KERJA SAMA REGIONAL (KSR)



DIDUKUNG OLEH
SEKRETARIAT KERJA SAMA ORGANISASI REGIONAL
DIBAWAH SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



MEWAJIBKAN DPR RI PATUH PADA RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN PARLIAMENT INDONESIA 2018 – 2024 UU NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP).

TANTANGAN BARU

PERMASALAHAN

KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT INDONESIA
TERHADAP NILAI STRATEGIS FUNGSI
DIPLOMASI PARLEMEN DI KAWASAN REGIONAL

SOLUSI →

"PENGEMBANGAN WEBSITE DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DI KAWASAN REGIONAL"

<http://dpr.go.id>
lalu klik Diplomasi Regional



ketik pada browser
<http://diparlin.dpr.go.id>



KELEBIHAN:

- LAYOUT LEBIH BERWARNA
- FRIENDLY USER
- FOKUS TELAH HASIL SIDANG /KONFERENSI REGIONAL

- BAHASA MUDAH DIPAHAMI
- ARTIKEL TERBARU
- ARTIKEL TERPOPULER
- TERDAPAT KEYWORDS
- TERSEDIA AKSES KONTAK

3 TAHAPAN MILESTONES

2019 - Milestones Jangka Pendek:
Pembangunan Website diparlin.dpr.go.id

- Pembentukan Tim Efektif
- Pembangunan Website
- Uji coba website diparlin.dpr.go.id
- Peluncuran website diparlin.dpr.go.id

2020 - Milestones Jangka Menengah:
Monitoring & Evaluasi Website diparlin.dpr.go.id

- Pembentukan Tim Efektif
- Rapat dengan Tim Efektif untuk memonitoring pelaksanaan website
- Konsultasi dengan Deputi Persidangan dan Kepala Biro KSAP serta Pimpinan BKSAP

2020 - Milestones Jangka Panjang:
Pengembangan Website diparlin.dpr.go.id

- Menyusun metode pengukuran peran partisipasi masyarakat
- Persetujuan untuk mengimplementasikan metode dan aplikasi baru
- Implementasi metode pengukuran peran partisipasi masyarakat melalui website



MASYARAKAT DIHARAPKAN LEBIH MENGENAL BKSAP DAN KINERJANYA
PADA AKHIRNYA CITA POSITIF DPR DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
MENINGKAT SEBAGAI PARLEMEN YANG MODERN, TRANSPARAN,
MUDAH DIAKSES, AKUNTABEL, RESPONSFUL, DAN REPRESENTATIF